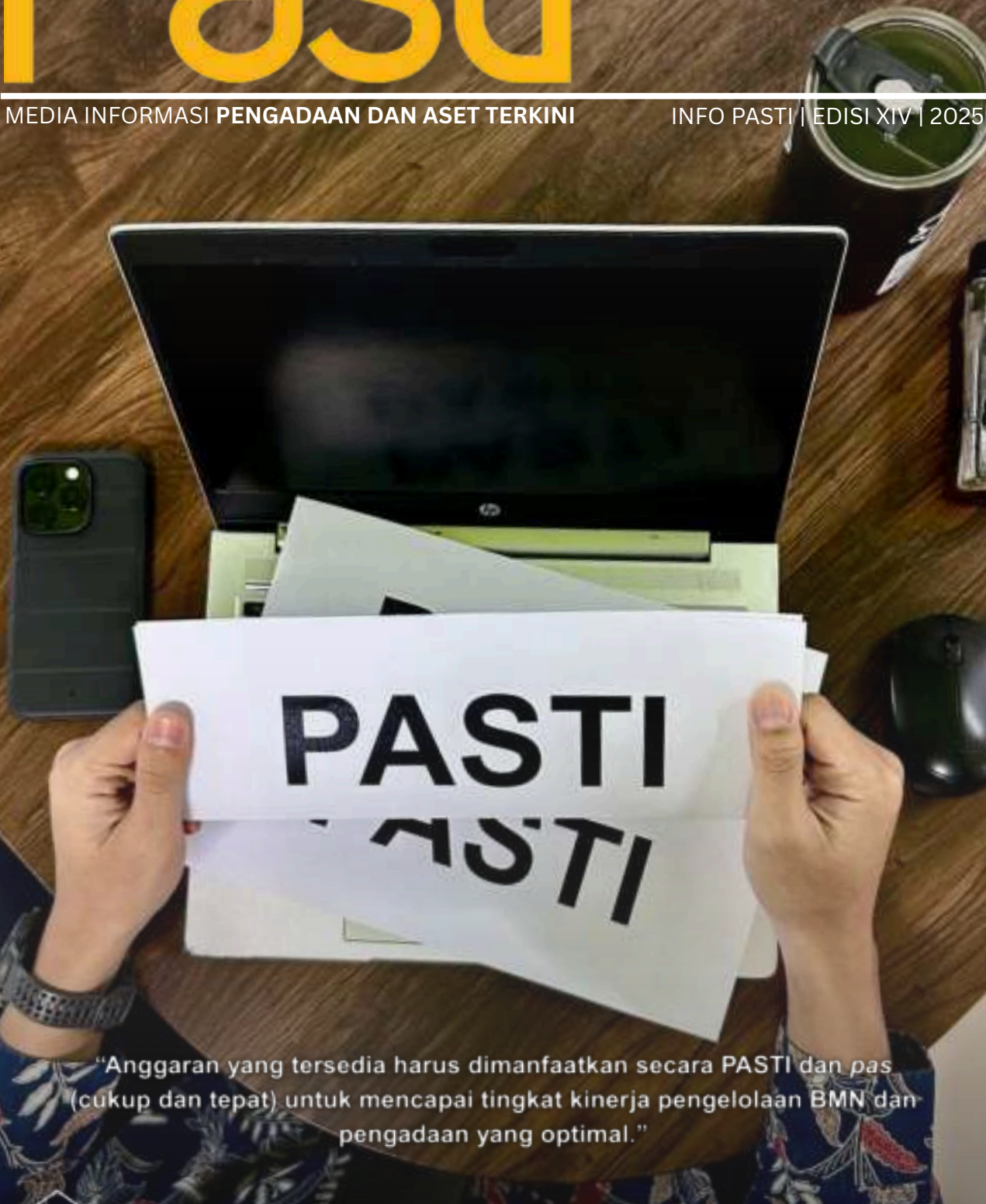


# info Pasti

MEDIA INFORMASI PENGADAAN DAN ASET TERKINI

INFO PASTI | EDISI XIV | 2025



**PASTI**  
**PASTI**

“Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara PASTI dan *pas* (cukup dan tepat) untuk mencapai tingkat kinerja pengelolaan BMN dan pengadaan yang optimal.”



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PUBLIKASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN KEMENTERIAN KEUANGAN



**“Adaptasi Budaya Kerja dan Organisasi di Bidang Pengelolaan BMN dan Pengadaan terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran”**

**Cover Story**

Kami menggunakan foto ini untuk merepresentasikan rasa optimisme bahwa ditengah kebijakan efisiensi anggaran, anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara PASTI dan pas -cukup dan tepat- untuk tetap mencapai tingkat kinerja optimal dalam pengelolaan BMN dan pengadaan.

**Foto Sampul**  
Much Hari Cahyo

**Alamat Redaksi**

Gedung Juanda II Lantai 15-16,  
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru,  
Sawah Besar, Jakarta Pusat (10710)

**Saluran Bantuan**

- ☎ 134
- ☎ +6281283676760 (Helpdesk LPSE)
- ✉ [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)
- 🌐 [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**Ikuti Kami**

pada Digitalisasi Aset di laman Satu Kemenkeu Web

---

**Diterbitkan oleh** Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan | **Penanggung Jawab** : Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Edy Gunawan | **Pimpinan Redaksi** : Kepala Bagian Manajemen Teknis, Data dan Informasi, Anwar Djunaidi | **Redaktur Pelaksana** : Kepala Subbagian Kerja Sama dan Komunikasi, Yulia Candra Kusumarini | **Tim Redaksi** : Muhammad Ibnu Sudjono, Dwi Citra Lestari, Much Hari Cahyo | **Redaktur Foto** : Much Hari Cahyo | **Desain Grafis & Layout** : Much Hari Cahyo & Muhammad Ibnu Sudjono | **Ilustrator** : Much Hari Cahyo

# DAFTAR ISI

## Dari Perencanaan Hingga Pengawasan : **RAHASIA PENGELOLAAN ASET NEGARA**

Cerita Berseri dari 3 (tiga) sekawan yang diminta menyelesaikan penugasan terkait siklus pengelolaan BMN.



Halaman 5

### INFO ASET

Transformasi Kendaraan Dinas di Kementerian Keuangan (8) | Menelisik PMK Nomor 106 Tahun 2024 (11) | Transformasi Keberlanjutan Penataan Kawasan (16) | Renon Yang Baru (26) | Optimalisasi Aset Sitaan (34) | Efisiensi Anggaran Untuk Masa Depan (38) | Succes Story Pemanaan BMN (40) | Budaya Eco Office (48) | Eco Office Kantorku, Efisiensi Jalan Ninjaku (52)

### INFO PENGADAAN

Optimalisasi Layanan Perkantoran (60) | Dampak Inpres No 1 Tahun 2025 (66) | Banting Harga Pekerjaan Konstruksi (70) | Sehabis Jeda, Kita Bicara Lagi (78) | Diet Ketat APBN (82)

### INFO LAIN-LAIN

Ketika Aset Negara Punya Kembaran Digital (88) | Panorama Ampangan, Wisata Tersembunyi di Kaki Gunung Sago Payakumbuh (92)

## GALERI FOTO KAWASAN PERKANTORAN & HUNIAN RENON | Halaman 30



INFO PASTI EDISI XIV 2025

EDISI XIV 2025

#PastikanAsetKita



# KATA PENGANTAR

Pembaca yang budiman,

Edisi kali ini hadir di tengah dinamika perubahan yang menuntut kita semua untuk lebih adaptif dan responsif, khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan. Dengan mengangkat tema “Adaptasi Budaya Kerja dan Organisasi di Bidang Pengelolaan BMN dan Pengadaan terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran”, kami ingin mengajak pembaca merefleksikan kembali bagaimana pergeseran strategi, pola pikir, dan perilaku organisasi menjadi kunci dalam menjawab tantangan keterbatasan anggaran.

Foto sampul edisi ini menyiratkan makna mendalam: kata “PASTI” yang dipotong menjadi “PAS” dan “TI” mencerminkan semangat efisiensi. Fokus pada pemenggalan suku kata “PAS” yang merepresentasikan kondisi anggaran yang cukup -tidak lebih, tidak kurang- namun mampu dioptimalkan untuk tetap mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Ini adalah simbol dari penyesuaian dan kecermatan dalam bertindak, tanpa kehilangan arah tujuan.

Melalui artikel, opini, dan liputan di dalamnya, kami berharap majalah ini dapat menjadi sarana berbagi praktik baik, inspirasi perubahan, serta dorongan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam semangat *value for money*.

Selamat membaca, dan mari terus bergerak menuju pengelolaan aset dan pengadaan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

Salam hangat,  
Penanggung Jawab Tim Redaksi Majalah Info PASTI

ttd.  
Edy Gunawan



{ CERITA BERSERI }  
DARI PERENCANAAN HINGGA PENGAWASAN:

# RAHASIA PENGELOLAAN ASET NEGARA

Ditulis oleh Edy Gunawan

Foto oleh Much Hari Cahyo

**B**

udi, Siti, dan Andi adalah 3 orang pegawai yang bertugas di kantor pusat. Oleh Pimpinan, mereka diminta untuk menyelesaikan tugas mencakup seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, hingga pengawasan dan pengendalian.

Budi yang ditunjuk sebagai koordinator, membuka rapat pertama mereka *"Teman-teman, kita telah diberi tanggung jawab besar. Pengelolaan BMN adalah salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan negara. Kita harus memastikan bahwa aset negara dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel"* ungkapnya.

Siti mengangguk setuju, *"Kita perlu merencanakan setiap langkah dengan cermat. Mulai dari perencanaan dan penganggaran untuk mengidentifikasi kebutuhan BMN dan memastikan ketersediaan anggaran yang memadai"*.

*"Setelah itu, kita harus memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan tepat. BMN yang diperoleh harus dicatat dan dikelola secara administratif melalui penatausahaan yang baik."* tambah Andi.

Tugas ini memang tidak mudah, tetapi mereka yakin bahwa dengan kerja sama dan dedikasi, mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil, membagi tugas, dan menetapkan target waktu untuk menyelesaikan setiap tahap dalam siklus pengelolaan BMN.



## [CHAPTER 1] PERENCANAAN & PENGANGGARAN

Ditulis oleh Edy Gunawan

Pengelolaan BMN dimulai dengan perencanaan dan penganggaran. Budi dan timnya melakukan analisis kebutuhan berdasarkan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta proyeksi penggunaan BMN dalam jangka pendek dan panjang. Penganggaran dilakukan dengan menyusun rencana anggaran yang rinci dan realistis, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan persetujuan dan alokasi anggaran yang sesuai.

Siang itu, Budi menghampiri Siti dengan wajah serius. *“Beberapa usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) kita tidak disetujui. Padahal kita sudah bekerja keras,”* keluhnya. Siti tetap tenang. *“Tenang, Budi. Kita bisa revisi atau cari alternatif lain. Masih banyak jalan.”*

Pembicaraan pun berlanjut ke isu lain.

*“Bagaimana RP4?”* tanya Budi.

*“Berjalan baik,”* jawab Siti. *“Kita pakai E-BMN dan E-Prime Aset. Tapi masih perlu sosialisasi ke pegawai.”*

Budi kemudian menyinggung soal hunian pegawai. *“Masih banyak rumah negara bermasalah. Ada yang tidak layak huni, ada yang ditempati pihak tak berhak.”*

Siti mengusulkan solusi, *“Kita bisa kerja sama dengan K/L lain. Mungkin bangun rumah susun dekat kantor.”*

Terakhir, mereka membahas perlindungan aset.

*“Asuransi BMN harus jadi prioritas,”* ujar Budi.

*“Setuju. Itu penting untuk menghindari kerugian negara,”* timpal Siti.

Salah satu kegiatan utama dalam perencanaan BMN adalah penyusunan RKBMN. RKBMN merinci kebutuhan BMN untuk suatu periode tertentu dan digunakan sebagai dasar bagi K/L dalam pengusulan penyediaan anggaran. Hasil analisis kebutuhan BMN menunjukkan berbagai usulan yang telah diajukan, mulai dari bangunan gedung untuk kantor, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, rumah negara, hingga tanah untuk kantor dan rumah negara.

Selain RKBMN, dalam perencanaan BMN juga terdapat Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara (RP4) yang bertujuan untuk memastikan bahwa BMN dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengoptimalkan penggunaan BMN, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan atau kerugian negara.

Rencana Pemenuhan Hunian Pegawai dilakukan melalui kerja sama dengan K/L lain untuk mewujudkan pembangunan rumah susun, rumah dinas, atau fasilitas hunian yang layak guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan produktivitas pegawai, serta memastikan akses hunian yang setara bagi pegawai. Terdapat berbagai permasalahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan Rumah Negara antara lain rumah negara sering ditempati atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, tidak ada yang bersedia menempati karena jaraknya jauh dari kantor, tidak layak huni, keamanan tidak terjamin, jauh dari fasilitas umum, status hukum lahan/tanah tidak jelas sehingga rawan sengketa, banyak rumah negara rusak karena tidak ada biaya pemeliharaan, dan kondisi rumah dalam keadaan *unfurnished*.

Selain RKBMN, RP4 dan Rencana Pemenuhan Hunian Pegawai, dalam perencanaan BMN juga terdapat kegiatan Rencana Asuransi Barang Milik Negara, dalam rangka melindungi aset-aset negara dari berbagai risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Asuransi BMN mencakup berbagai jenis barang milik negara, seperti gedung dan bangunan, yang memiliki dampak signifikan terhadap pelayanan umum dan kelancaran tugas pemerintahan.

Sambil mematikan komputer dan merapikan meja, Budi mengakhiri diskusi dengan timnya hari ini, *“Terima kasih rekan-rekan, semoga hasil diskusi dan kerja keras kita hari ini membuahkan hasil yang optimal.”* tutupnya.

Aroma kopi menyeruak dari celah pintu ruang istirahat. Budi dan Siti, mereka sedang asik mendiskusikan mengenai pengadaan ditemani 2 cangkir kopi hangat. Pengadaan BMN bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam tahap perencanaan. Tahap ini sangat krusial karena memastikan bahwa BMN yang diperoleh memenuhi spesifikasi yang diperlukan dan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

*Budi menatap Siti yang tengah menikmati kopi hangatnya. "Siti, menurutmu bagaimana sebaiknya penyusunan dokumen pengadaan?"*

*Siti menoleh, suaranya tenang. "Harus teliti. Semua persyaratan dan spesifikasi teknis harus jelas agar tak menimbulkan kesalahpahaman dengan penyedia."*

*Budi mengangguk. "Dan proses lelangnya harus transparan dan kompetitif. Kita juga perlu mengutamakan produk dalam negeri."*

*Siti tersenyum tipis. "Produk lokal kita punya kualitas bagus. Dengan menggunakannya, kita bantu ekonomi nasional dan beri kesempatan untuk penyedia lokal bersaing."*

Setelah proses lelang selesai, kita juga harus memastikan bahwa penandatanganan kontrak dan penerimaan barang berjalan sesuai dengan rencana. Semua barang yang diterima harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain proses pengadaan itu sendiri, pembinaan dan koordinasi memegang peranan penting dalam kelancaran pengadaan BMN. Pembinaan difokuskan pada peningkatan kapasitas organisasi dan kompetensi SDM agar memahami prosedur serta regulasi pengadaan secara mendalam.

Sementara itu, koordinasi dengan penyedia, instansi terkait, dan pengawas dilakukan melalui komunikasi efektif, penyusunan jadwal terintegrasi, serta pemantauan berkala guna memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan mengatasi potensi hambatan.

Budi dan timnya menerapkan strategi sentralisasi pengadaan barang/jasa dengan mengalokasikan pengadaan langsung kepada JFPPBJ, menyadari adanya peningkatan beban kerja pada jabatan tersebut. Uji coba dilakukan pada beberapa unit kerja di Sekretariat Jenderal untuk menemukan skema terbaik, didukung penggunaan Aplikasi SIMPEL yang mempermudah proses pengadaan dan memungkinkan penugasan JFPPBJ secara remote.

Pemilihan penyedia pengadaan langsung diprioritaskan untuk paket dengan SPK oleh JFPPBJ, sementara pengadaan non-SPK tetap melibatkan PPK dengan bantuan tim teknis. Selain itu, mereka juga bekerjasama dengan BPPK untuk sertifikasi personel melalui pelatihan dasar dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa.

Budi meletakkan berkas di meja dengan ekspresi cemas. *"Siti, kita dalam masalah. Beberapa penyedia tak bisa penuhi spesifikasi."*

*Siti menatap serius. "Kita cari alternatif. Hubungi penyedia lokal yang pernah kerja sama. Mereka mungkin bisa bantu."*

*Budi mengangguk. "Kita harus cepat. Jangan sampai ini menghambat proses. Produk dalam negeri bisa jadi solusi."*

*"Aku setuju" sahut Siti. "Kualitasnya bagus, dan kita ikut dukung penyedia lokal."*

Tanpa membuang waktu, Budi dan timnya segera bertindak. Mereka menghubungi penyedia lokal, menjadwalkan pertemuan, dan menegosiasikan solusi. Usaha mereka membuahkan hasil, penyedia yang sesuai berhasil ditemukan dan proses pengadaan kembali berjalan lancar.

Sayup-sayup masih terdengar bunyi suara papan ketik pada komputer di ruang kerja ketika ternyata jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Budi dan timnya baru saja menyelesaikan laporan tentang pengangkatan Pejabat Pengadaan di berbagai satuan kerja.



## INFO ASET

MENUJU MASA DEPAN :

# TRANSFORMASI KENDARAAN DINAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN

Oleh Korry Febriani  
Foto oleh Much Hari Cahyo

### Transformasi Besar Sedang Berlangsung

Dunia sedang berlomba meninggalkan ketergantungan pada energi fosil, menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Di tengah pergeseran ini, Indonesia tidak tinggal diam. Salah satu langkah kunci yang diambil adalah mendorong penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau yang lebih dikenal sebagai kendaraan listrik. Dan di balik upaya ini, Kementerian Keuangan memainkan peran strategis yang jarang disorot, tetapi sangat vital.

### Membidik Masa Depan yang Lebih Hijau

Dalam dokumen penting Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM & PPKF 2025), Pemerintah menetapkan visi ambisius: pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana caranya? reformasi struktural perlu diarahkan untuk mendorong penguatan sektor ekonomi yang lebih ramah lingkungan melalui pengurangan emisi karbon yang memiliki dampak langsung terhadap perubahan iklim global yang terus berlanjut dan membawa dampak yang sangat merusak, seperti meningkatnya risiko banjir, kekurangan pangan, hingga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di masa depan.

Di sinilah beralihnya kendaraan konvensional yang menggunakan energi fosil menjadi kendaraan listrik berbasis baterai masuk sebagai bagian dari solusi. Tidak hanya memberikan dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat industri lokal.

Perkembangan penggunaan kendaraan listrik dapat membangkitkan industri hulu yang lebih besar, terutama karena kendaraan ini didukung oleh bahan baku lokal, seperti nikel, yang mana Indonesia saat ini merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia. Selain itu, penggunaan kendaraan Listrik berpotensi mengurangi emisi karbondioksida secara signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

Namun, tantangan besar masih mengadang. Infrastruktur pengisian daya yang belum merata, harga kendaraan yang relatif tinggi, hingga keterbatasan pilihan model kendaraan menjadi hambatan nyata. Untuk itu, peran Pemerintah termasuk Kementerian Keuangan, menjadi semakin krusial.

### **Kementerian Keuangan: Motor Penggerak dari Balik Layar**

Sebagai Pengelola Barang sekaligus salah satu Pengguna Barang terbesar, Kementerian Keuangan tak sekadar mendukung, tapi aktif mendorong implementasi kendaraan listrik. Ini langkah-langkah nyata yang telah Kementerian Keuangan tempuh:

#### *1. Memprioritaskan penggunaan kendaraan listrik untuk Kendaraan Dinas.*

Sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Keuangan sebagaimana disampaikan melalui surat nomor Surat Menteri Keuangan Nomor S-298/MK.06/2023 tanggal 15 April 2023 hal Penggunaan Kendaraan Dinas Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Kementerian Keuangan telah menetapkan arah kebijakan penggunaan kendaraan dinas melalui Nota Dinas Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Nomor ND-1156/SJ.7/2023 tanggal 31 Agustus 2023. Kebijakan ini memuat beberapa ketentuan utama, yaitu:

- Pertama, pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Keuangan harus memprioritaskan penggunaan kendaraan listrik, dengan tetap mengacu pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).
- Kedua, dilakukan penundaan atau moratorium atas penyediaan kendaraan dinas selain kendaraan listrik, termasuk pengaturan teknis terkait rencana pengadaan kendaraan non-kendaraan listrik dalam kondisi tertentu.

- Ketiga, penyusunan roadmap implementasi penggunaan kendaraan listrik secara bertahap pada periode 2023–2026, serta pemetaan rencana implementasi untuk satuan kerja di wilayah atau lokasi yang telah ditentukan.

#### *2. Membangun Infrastruktur Pengisian Daya.*

Tidak cukup hanya membeli kendaraan listrik, Kementerian Keuangan juga memastikan dukungan infrastruktur. Agar proses pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik pada Kementerian Keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, telah disampaikan kebijakan melalui nota dinas Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Nomor ND-38/SJ.7/2025 tanggal 13 Januari 2025, yang pada intinya mengimbau seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan stasiun pengisian daya (charging station) kendaraan listrik di lingkungan Kantor minimal setingkat Unit Eselon II dan di rumah dinas jabatan pimpinan tertinggi (Menteri dan Wakil Menteri), pejabat Eselon I dan Eselon II. Ini menciptakan ekosistem yang memudahkan transisi penggunaan kendaraan listrik.

#### *3. Berkolaborasi dengan Instansi Lain.*

Kementerian Keuangan juga turut berperan dalam mendukung penggunaan kendaraan listrik melalui partisipasinya dalam program konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian ESDM. Tidak hanya membeli baru, tetapi juga memanfaatkan kendaraan lama untuk diremajakan menjadi lebih ramah lingkungan.

#### *4. Mengutamakan kendaraan listrik dalam Rencana Pengadaan.*

Akselerasi penggunaan kendaraan listrik juga diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pengadaan, dimana Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan agar memprioritaskan kendaraan listrik dalam pengusulan rencana kebutuhan kendaraan dinas.

Berdasarkan usulan RKBMN Pengadaan TA 2025, Kementerian Keuangan telah mengusulkan rencana pengadaan kendaraan listrik sebanyak 1.447 unit dari total usulan kendaraan sebanyak 1.839 unit. Jumlah ini menunjukkan bahwa usulan kendaraan listrik sudah mendominasi usulan kendaraan konvensional dengan persentase mencapai 78,7% dari total usulan kendaraan.



### Tantangan: Tidak Mudah Tapi Bukan Mustahil

Tentu saja, jalan menuju ekosistem kendaraan listrik tidak selalu mulus. Beberapa tantangan yang terus dihadapi antara lain:

1. Infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik masih sangat terbatas, dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar.
2. Harga kendaraan listrik saat ini masih lebih mahal dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, sehingga cukup terkendala karena keterbatasan anggaran, meskipun dalam jangka panjang kendaraan listrik lebih efisien dari segi biaya operasional.
3. Kendaraan listrik yang tersedia di pasaran Indonesia masih terbatas, baik dari segi model, kapasitas, maupun fitur yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.
4. Waktu pengisian yang lama dan kapasitas penyimpanan energi yang terbatas membuat banyak orang meragukan kelayakan penggunaannya.
5. Pemahaman yang terbatas tentang manfaat jangka panjang kendaraan listrik dan keberlanjutan lingkungan.

1. Menetapkan kebijakan nasional yang mewajibkan penggunaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah.
2. Mengatur standar operasional kendaraan dinas ramah lingkungan.
3. Membangun lebih banyak stasiun pengisian listrik di area strategis, termasuk kantor pemerintahan.
4. Melakukan kampanye edukasi kepada pegawai pemerintah tentang keunggulan kendaraan listrik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor publik dapat menjadi teladan, yang akan mendorong sektor swasta dan masyarakat umum untuk ikut beralih.

### Masa depan Indonesia ada di tangan kita.

Melalui komitmen nyata dari Kementerian Keuangan dan seluruh pihak terkait, kendaraan listrik bisa menjadi salah satu kunci utama transformasi ekonomi hijau kita. Bukan hanya untuk memperkuat industri dalam negeri, tapi juga untuk mewariskan bumi yang lebih bersih dan layak huni kepada generasi mendatang.

***Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten.***

### Langkah ke Depan: Rekomendasi untuk Akselerasi.

Untuk mempercepat implementasi penggunaan kendaraan listrik, beberapa langkah strategis bisa diambil, seperti:



**JADI,  
APAKAH ANDA SIAP MENJADI BAGIAN DARI  
PERUBAHAN INI?**





## MEWUJUDKAN HUNIAN LAYAK BAGI APARATUR NEGARA: MENELISIK PMK NOMOR 106 TAHUN 2024

Oleh Gayuh Ardhi Rumpoko  
Foto oleh Much Hari Cahyo

### Sejarah Perumahan Bagi Pegawai Negeri

Kebutuhan akan hunian layak bagi pegawai negeri telah menjadi perhatian sejak era kolonial. Pada tahun 1924, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Burgerlijke Woning Regeling (BWR), sebuah peraturan yang mendorong penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setelah kemerdekaan, perhatian terhadap perumahan PNS terus berlanjut dengan berbagai kebijakan dan program, seperti pembentukan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) pada 1951 dan Djawatan Perumahan Rakyat pada 1952.

Di era sekarang, pemerintah semakin serius dalam menyediakan hunian bagi aparatur negara. Berbagai macam program pemerintah untuk penyediaan kebutuhan perumahan untuk seluruh masyarakat, termasuk bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggantikan Bapertarum-PNS sebagai langkah strategis dalam menyediakan pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Meskipun berbagai program telah diluncurkan, masih banyak PNS yang belum memiliki rumah sendiri. Faktor-faktor seperti pendapatan, usia, dan jumlah tanggungan keluarga memengaruhi kemampuan PNS untuk memiliki rumah. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk terus mencari solusi, salah satunya melalui penerbitan PMK Nomor 106 Tahun 2024.

### Memahami Kebutuhan Hunian Layak untuk Pegawai Negeri

Seiring meningkatnya kompleksitas tugas dan peran aparatur negara, kebutuhan akan fasilitas pendukung yang memadai menjadi semakin penting. Salah satu aspek vital dalam mendukung kesejahteraan dan produktivitas pegawai negeri adalah ketersediaan hunian yang layak, strategis, dan terjangkau.

Perubahan dinamika pekerjaan aparatur, mulai dari mobilitas lintas daerah hingga tuntutan pelayanan terintegrasi, menuntut pegawai negeri untuk selalu siap bertugas tanpa harus khawatir akan tempat tinggal. Di kota-kota besar, kenaikan harga sewa rumah per bulan yang mencapai dua digit persen memaksa sebagian PNS memprioritaskan gaji untuk biaya sewa, mengorbankan kebutuhan lain seperti pendidikan anak dan kesehatan keluarga, begitu juga dengan daerah remote, dimana kualitas dan ketersediaan hunian sangat terbatas dan kurang layak, serta jika ditelisik lebih dalam, harga sewa hunian bisa lebih mahal dibandingkan dengan hunian di kota besar. Hal ini menjadi beban berat bagi pegawai negeri, terutama yang baru memasuki dunia kerja. Kondisi ini berpotensi mengganggu konsentrasi dan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas negara.

Selain faktor ekonomi, aspek psikologis juga tak kalah penting. Hunian yang dekat dengan tempat kerja memungkinkan pegawai mengurangi waktu perjalanan harian hingga 50 persen.



Waktu yang semula terbuang di jalan kini dapat digunakan untuk istirahat, rekreasi singkat, atau berkumpul dengan keluarga. Efeknya adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan tingkat kelelahan, serta semangat yang lebih baik saat memasuki kantor.

➔ Lebih jauh lagi, rumah susun negara sering kali diintegrasikan dengan fasilitas publik seperti ruang serbaguna, taman bermain anak, serta layanan keamanan terpadu. Keberadaan fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penghuni, tetapi juga mendorong terbentuknya komunitas yang solid, saling membantu dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Fasilitas hunian layak ini sangat penting bagi pegawai baru, terutama mereka yang ditempatkan di daerah penugasan jauh dari kampung halaman. Ketersediaan unit yang siap huni membantu mengurangi masa adaptasi, memudahkan pegawai menata kehidupan sehari-hari, serta mempercepat efektivitas kerja.

➔ Melihat urgensi tersebut, negara mengambil peran aktif untuk memastikan bahwa aparat sipil dapat menjalankan tugasnya dengan tenang, salah satunya melalui penyediaan rumah susun negara dengan tarif sewa yang terjangkau. Melalui PMK Nomor 106 Tahun 2024, Kementerian Keuangan berupaya untuk dapat hadir dan memberikan solusi yang konkret untuk kejelasan dan kemudahan akses hunian, sembari menjaga pengelolaan aset negara tetap profesional dan akuntabel.

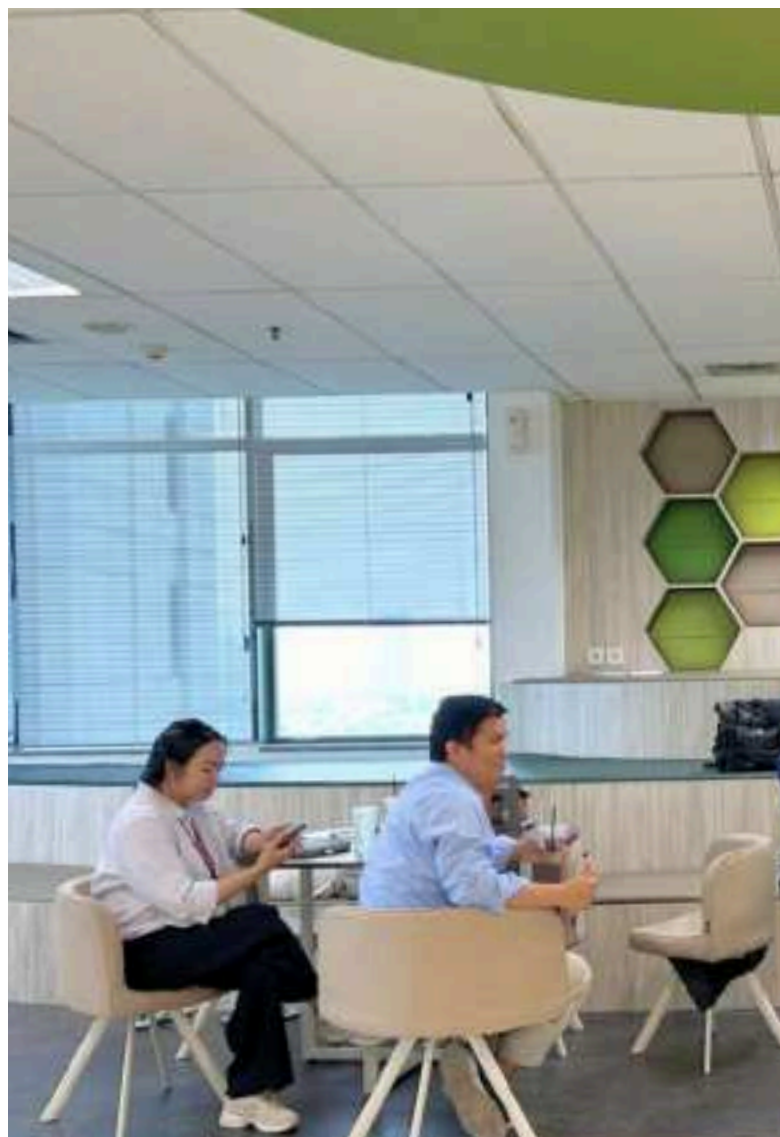
### **Wujud Kebijakan Progresif untuk Memperkuat Fondasi Sosial Aparatur Negara**

PMK Nomor 106 Tahun 2024 bukan sekadar aturan teknis tentang tarif sewa rumah susun negara. Lebih dari itu, kebijakan ini mencerminkan komitmen negara untuk membangun fondasi sosial yang kokoh bagi aparat sipil.

➔ PMK Nomor 106 Tahun 2024 membawa formula baru yang mengatur tarif sewa berdasarkan komponen biaya operasional atau biaya pemeliharaan. Struktur tarif menengah dihitung dari Biaya Operasional atau Biaya Pemeliharaan bulanan dengan nilai terendah, lalu dikalikan faktor penyesuaian sesuai tipe unit. Pendekatan ini memastikan tarif adil, terukur, serta responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Dengan penerapan koefisien penyesuaian dalam penetapan tarif sewa dengan mempertimbangkan memberikan keringanan atas penetapan tarif sewa, kebijakan ini memberi ruang bagi pegawai negeri untuk mendapatkan hunian yang layak tanpa membebani keuangan pribadi secara berlebihan. Ini bisa menjadi salah satu langkah atas berbagai tantangan urbanisasi dan ketimpangan akses terhadap perumahan yang semakin terasa di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan dasar hukum dari PP Nomor 47/2023, regulasi ini memastikan bahwa setiap keputusan penetapan tarif didasarkan pada data/prognosa atas biaya operasional atau pemeliharaan, serta faktor penyesuaian yang jelas. Pendekatan semacam ini memperkuat ikatan sosial antar pegawai, karena setiap penghuni memiliki kesempatan yang adil untuk menempati hunian negara. Fasilitas ini tidak hanya menunjang kesejahteraan, tetapi juga mempercepat adaptasi pegawai baru terhadap lingkungan kerja baru, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan loyalitas serta motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.



## **Kesejahteraan Pegawai: Memperkuat Stabilitas Sosial Melalui Akses Hunian Terjangkau**

Penyediaan hunian layak dan terjangkau memiliki efek domino yang luar biasa terhadap kesejahteraan individu dan stabilitas sosial.

Dengan beban biaya sewa yang ringan, pegawai negeri memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri.

Dampak ekonomi langsung dari kebijakan ini dapat diukur dari penurunan beban biaya hidup per bulan bagi sebagian PNS. Sebagai contoh di wilayah Bali, dengan asumsikan biaya sewa awal indekost sebesar Rp1.000.000 per orang, asumsi tarif sewa hunian berdasarkan usulan awal dan perhitungan tarif sewa dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian membuat pegawai hanya membayar Rp400.000 per sarusun (atau bisa dihuni oleh 2 orang) untuk Sarusun Tipe E. Selisih biaya tersebut dapat dialokasikan untuk investasi pendidikan anak, tabungan pensiun, atau modal usaha kecil.

Pengurangan beban biaya juga berdampak pada kesehatan mental. Dengan kepastian tempat tinggal, pegawai mengalami stres yang lebih rendah, insomnia berkurang, serta semangat kerja meningkat. Lingkungan hunian yang terkelola baik mendukung terciptanya jejaring sosial antar penghuni, membentuk kelompok dukungan informal dalam kehidupan sehari-hari.

Hunian yang dekat dengan tempat kerja juga berkontribusi dalam mengurangi waktu perjalanan harian, sehingga meningkatkan keseimbangan hidup antara pekerjaan dan keluarga. Lingkungan tempat tinggal yang nyaman, aman, dan mendukung interaksi sosial positif turut menciptakan pegawai yang lebih produktif, sehat secara fisik dan mental, serta lebih bersemangat dalam mengabdikan kepada negara.

Dari perspektif organisasi, kepuasan pegawai terhadap tunjangan perumahan berkorelasi positif dengan retensi pegawai. Dengan kata lain, pegawai cenderung lebih bertahan lama di instansi yang memberikan perhatian pada aspek kesejahteraan dasar mereka.

Kebijakan ini, dalam jangka panjang, akan memperkuat stabilitas sosial di kalangan aparatur sipil, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai lapisan masyarakat birokrasi.

## **Tanggung Jawab dalam Pemeliharaan Hunian**

Tidak ada manfaat tanpa tanggung jawab. Menempati rumah susun negara menuntut pegawai untuk aktif terlibat dalam pemeliharaan fasilitas dan kenyamanan lingkungan. Menempati rumah susun negara bukan hanya soal menerima manfaat, tetapi juga tentang mengemban Amanah dan tanggung jawab terhadap negara. Setiap penghuni diharapkan untuk menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab dalam menjaga kenyamanan dan kondisi fisik hunian.

PMK mengatur prinsip kebersamaan: setiap unit berkontribusi melalui pembayaran sewa bulanan dengan filosofi untuk mendukung operasional dan pemeliharaan bulanan yang dihitung berdasarkan dua persen dari Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) per meter persegi, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeliharaan, mulai dari kebersihan, penggunaan fasilitas secara bijak, hingga kesediaan memperbaiki kerusakan akibat kelalaian pribadi, menjadi bagian dari kewajiban penghuni terhadap negara. Kepedulian ini memastikan bahwa fasilitas dapat terus berfungsi optimal dan dapat dinikmati oleh generasi pegawai berikutnya. Budaya peduli bersama ini menciptakan rasa memiliki, mendorong manajemen pengelola rumah susun untuk lebih responsif, serta mengurangi biaya perbaikan besar akibat kerusakan yang tidak tertangani sejak dini. Lebih jauh, kepatuhan terhadap tanggung jawab ini juga mencerminkan nilai-nilai integritas.



## **Tata Kelola Anggaran: Pilar Transparansi dalam Penyediaan Hunian Negara**

Transparansi dalam pengelolaan anggaran operasional dan pemeliharaan rumah susun negara adalah aspek yang tidak bisa ditawar. Biaya yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan (seperti listrik dan air untuk fasilitas umum, keamanan, perawatan fasilitas umum, asuransi bangunan, dan hal lainnya yang diatur dalam peraturan menteri) dikelola dengan cermat dan diaudit secara berkala.

➔ Penentuan struktur tarif sewa didasarkan pada perhitungan biaya operasional atau pemeliharaan, dengan memilih komponen biaya yang paling rendah. Prinsip kehati-hatian ini memastikan bahwa tarif tetap adil, realistis, dan terjangkau bagi seluruh pegawai.

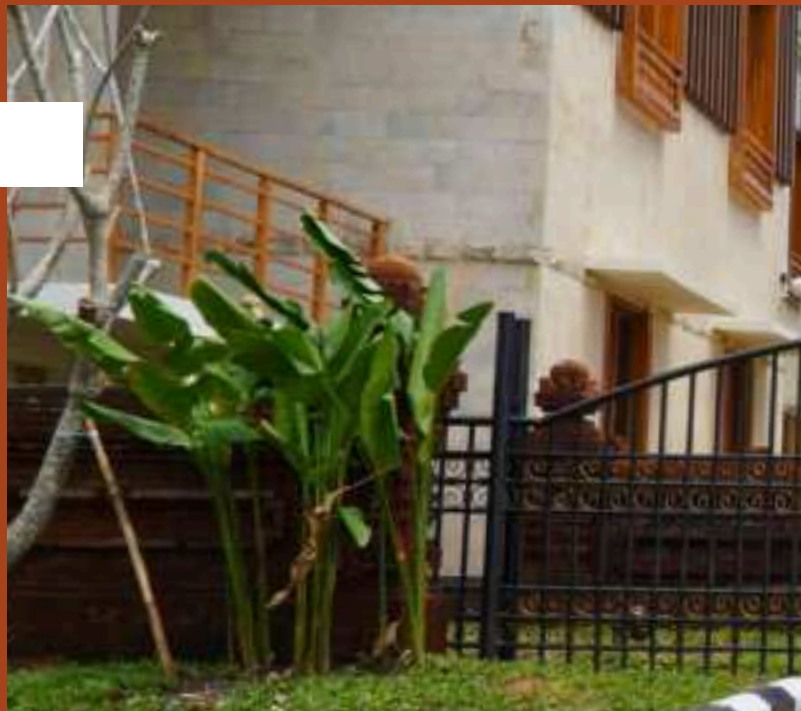
Penerapan sistem sewa berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan dapat diartikan bahwa: hunian negara bukan lagi hak istimewa tanpa tanggung jawab, melainkan fasilitas yang harus dikelola secara profesional dan akuntabel. Seluruh pendapatan dari sewa disetorkan langsung ke kas negara, memperkuat asas akuntabilitas dan menjadikan pengelolaan hunian ini sebagai contoh tata kelola keuangan negara yang baik.

## **Kepastian Hukum: Landasan Stabilitas Hubungan Penghuni dan Pengelola**

Dalam dinamika pengelolaan aset negara, kepastian hukum menjadi landasan utama untuk mencegah sengketa, menyelaraskan hak dan kewajiban, serta menciptakan iklim hubungan yang sehat antara penghuni dan pengelola.

➔ PMK 106 Tahun 2024 memperjelas berbagai aspek krusial: siapa yang berhak menempati rumah susun, bagaimana tarif ditentukan, ketentuan penggunaan, serta bagaimana mekanisme pemeliharaan. Dengan kerangka hukum yang jelas ini, baik negara maupun pegawai negeri memiliki posisi yang setara dalam menghormati dan menjalankan hak serta tanggung jawab masing-masing. PMK Nomor 106/2024 memberikan kerangka hukum yang jelas, mulai dari definisi Rumah Susun Negara dan Sarusun hingga mekanisme penetapan tarif dan persyaratan keringanan.

Dengan aturan baku yang mudah diakses, potensi konflik terkait tarif, durasi sewa, atau pemeliharaan dapat diminimalisir. Kepastian hukum ini menjadi



instrumen penting dalam membangun rasa aman, nyaman, kepastian layanan, serta meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan hunian negara.

## **Sebagai pendorong Kemenkeu Satu**

Selain aspek teknis, rumah susun negara berfungsi sebagai sarana integrasi sosial antar unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Keberadaan organisasi pengelola yang mewakili setiap unit mendorong kolaborasi, saling memiliki, dan semangat kebersamaan. Meski tidak tertulis dalam PMK ini, perlu menjadi perhatian juga adalah bagaimana rumah susun negara baik dalam wujud fisik maupun pengelolaannya dapat mendorong terwujudnya Kemenkeu Satu.

Dalam hal penghunian fisiknya, dalam aturan lain dijelaskan bahwa sebuah rumah susun negara merupakan milik Kementerian Keuangan, tidak eksklusif milik salah satu unit saja dengan kata lain bahwa penghuni dalam rumah susun tersebut harus terdapat seluruh perwakilan dari unit-unit Kementerian Keuangan yang berada dalam wilayah rumah susun tersebut. Selanjutnya, dalam aspek pengelolaan rumah susun negara, dibentuk sebuah organisasi pengelola rumah susun negara yang beranggotakan perwakilan dari seluruh unit di lingkup rumah susun itu berada.

Hal-hal tersebut selain untuk mewujudkan asas keadilan, saling memiliki, dan transparansi pengelolaan rumah susun negara, juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan merekatkan persatuan antar unit Kementerian Keuangan.



Kolaborasi lintas unit ini sejalan dengan visi “Kemenkeu Satu”, di mana sinergi internal menjadi modal utama dalam memajukan tata kelola keuangan negara.

### Hal lain yang Perlu Diperhatikan

Penting untuk dipahami bahwa ruang lingkup penerapan PMK 106 Tahun 2024 bersifat khusus. Hanya rumah susun yang menjadi milik dan dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan yang termasuk dalam cakupan peraturan ini.

Selain itu, kebijakan ini hanya berlaku untuk pegawai negeri sipil aktif yang masih menjalankan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan dengan lingkup kerja wilayah Rumah Susun tersebut. Pegawai yang telah pensiun atau berpindah instansi dan lokasi penugasan tidak lagi menjadi sasaran penerima manfaat. Pendekatan ini memastikan bahwa fasilitas negara digunakan tepat sasaran dan efisien.

Penghitungan tarif sewa berdasarkan formula terstandarisasi yang mengacu pada ketentuan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ini menjamin objektivitas dan keterukuran dalam menentukan besaran tarif bagi seluruh penghuni.

### Hunian Layak sebagai Fondasi Birokrasi

Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar pegawai negeri, tetapi juga membangun fondasi bagi

birokrasi yang produktif, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan zaman. PMK 106 Tahun 2024 adalah wujud nyata dari visi negara untuk tidak hanya menciptakan aparatur sipil yang kompeten, tetapi juga sejahtera dan bangga menjadi bagian dari pelayanan publik. Dengan hunian yang nyaman dan berkualitas, aparatur sipil negara dapat berfokus pada peran mereka dalam mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat ikatan sosial di dalam birokrasi.

Kebijakan ini membuka harapan besar bagi terciptanya lingkungan kerja yang lebih humanis, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hunian negara yang dikelola dengan baik akan menjadi salah satu modal sosial paling berharga dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Di masa depan, keberlanjutan program rumah susun negara akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi. Ketika aparatur sipil merasa dihargai dan diperhatikan, motivasi mereka untuk berinovasi dan melayani masyarakat pun semakin tinggi.

***“PMK 106/2024 bukan hanya soal angka rupiah sewa, tetapi juga wujud komitmen kolektif membangun solidaritas antar aparatur, memaksimalkan aset negara, dan menciptakan iklim kerja yang lebih harmonis.”***





Dokumentasi : Komplek Kantor dan Hunian Renon, Denpasar

# TRANSFORMASI KEBERLANJUTAN PENATAAN KAWASAN

## GEDUNG KANTOR DAN HUNIAN KEMENKEU SATU

Oleh Anita Nofiani, M. Fuzy Wahyudi,  
& Meyzsa Monzana

Foto oleh Much Hari Cahyo

Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara memiliki peran yang strategis dalam mengelola keuangan negara. Dalam menjalankan fungsinya, Kemenkeu tidak hanya berfokus pada aspek regulasi dan kebijakan, tetapi juga memerlukan infrastruktur pendukung yang andal, termasuk kebutuhan gedung kantor dan hunian pegawai yang memadai. Sarana dan prasarana ini menjadi elemen krusial dalam mendukung kinerja para pegawai Kementerian Keuangan.

Seiring dengan semakin kompleksnya tugas dan tanggung jawab Kemenkeu, kebutuhan akan lingkungan kerja yang kondusif dan hunian yang layak bagi pegawai menjadi semakin penting. Gedung kantor tidak hanya berfungsi sebagai tempat bekerja, tetapi juga sebagai ruang yang mendorong kolaborasi antar unit Eselon I dalam pemberian pelayanan publik yang lebih baik. Sementara itu, ketersediaan hunian pegawai Kemenkeu yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan bentuk nyata perhatian terhadap kesejahteraan pegawai.

Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya penggunaan gedung kantor yang ada. Apabila kondisi ini dibiarkan, hal ini berdampak pada efektifitas anggaran, serta menghambat upaya ruang kolaboratif yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Banyaknya kantor yang belum optimal penggunaannya seharusnya dapat digunakan sebagai gedung layanan kolaborasi.

Selain itu, tantangan terkait hunian pegawai juga tidak bisa diabaikan. Ketersediaan hunian yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menjadi isu strategis terkait dukungan manajemen, terutama bagi pegawai yang ditempatkan di daerah-daerah. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan pegawai, tetapi juga berdampak pada motivasi dan kinerja mereka. Hunian yang tidak layak atau terlalu jauh dari lokasi kerja dapat menimbulkan beban tambahan secara finansial maupun psikologis bagi pegawai.

Menyadari pentingnya dukungan manajemen berupa infrastruktur dalam menciptakan kinerja organisasi yang optimal, Kementerian Keuangan terus menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan penataan terhadap aset yang dimiliki. Dukungan manajemen yang konsisten diberikan untuk memastikan bahwa kebutuhan gedung kantor dan hunian pegawai dapat diakomodasi secara bertahap dan terencana.

Penataan kawasan aset di lingkungan Kemenkeu tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi fisik aset, tetapi juga untuk mengoptimalkan fungsinya. Dengan pengelolaan yang lebih strategis, penggunaan aset yang selama ini kurang produktif diupayakan untuk dioptimalisasikan. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan akan kebutuhan gedung kantor dan hunian dalam rangka memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Keuangan.



## PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN

### *Dari Gagasan ke Aksi Nyata*

Sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki infrastruktur kerja dan meningkatkan kesejahteraan pegawai, Kementerian Keuangan melalui unit kerja terkait, yaitu Biro Manajemen Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan, menginisiasi program penataan kawasan kantor dan hunian pegawai. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi dalam pengelolaan aset, sekaligus memastikan bahwa fasilitas yang tersedia dapat mendukung kebutuhan kerja modern, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Langkah awal dari pelaksanaan program ini adalah melakukan asesmen kebutuhan gedung kantor dan hunian pegawai secara menyeluruh. Kegiatan asesmen ini mencakup identifikasi kondisi fisik bangunan yang ada, proyeksi kebutuhan berdasarkan jumlah pegawai, serta kajian lokasi potensial pada seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Melalui asesmen ini, diperoleh gambaran konkret mengenai prioritas penataan yang harus segera dilakukan, baik untuk rehabilitasi, pembangunan baru, maupun optimalisasi pemanfaatan aset eksisting.

Pelaksanaan program ini tidak berjalan secara parsial, melainkan mengedepankan sinergi antar-unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu bersama Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Setiap unit Eselon I diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penataan kawasan, memastikan bahwa kebutuhan masing-masing unit satuan kerja dapat terakomodasi dengan baik, sekaligus memperkuat sinergi lintas fungsi di dalam Kementerian. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi potensi penggunaan bersama (shared facilities) yang lebih efisien dan mendorong terciptanya ekosistem kerja yang integratif.

Komitmen Kementerian Keuangan untuk mewujudkan harapan tersebut, diwujudkan dengan bukti nyata telah terlaksananya program penataan kawasan gedung kantor diantaranya di Kota Balikpapan dan Ruteng. Di dua lokasi tersebut dilaksanakan program gedung kolaborasi dimana dilakukan penggabungan beberapa Satker Kementerian Keuangan dalam Satu gedung dan penggabungan layanan yang disebut dengan kolaborasi layanan. Hal itu tentu saja diharapkan mampu menjadi wujud upaya optimalisasi gedung kantor serta mewujudkan wajah Kemenkeu Satu dalam segi layanan kepada masyarakat.



Keberhasilan implementasi kolaborasi layanan Kemenkeu Satu tidak lepas dari peran penting satuan kerja di daerah serta dukungan unit eselon I yang membawahi. Mereka adalah motor penggerak di garis terdepan, memastikan program ini berjalan sesuai tujuan. Di sejumlah lokasi, kolaborasi ini telah diwujudkan melalui pembangunan gedung kantor bersama dan pelaksanaan layanan terpadu. Dari lokasi-lokasi tersebut, kami berkesempatan menghimpun testimoni dari para Kepala Kantor yang menjadi pengampu program, untuk mengetahui lebih dekat bagaimana kolaborasi ini diterapkan dan dirasakan manfaatnya.



Ikhsan, Kepala KPP Pratama Ruteng memberikan pernyataan bahwa “saya menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas terwujudnya Gedung Kolaborasi Kementerian Keuangan di Kabupaten Manggarai, yang menghadirkan sinergi antara KP2KP Labuan Bajo dan KPPN Ruteng dalam satu lokasi strategis. Kolaborasi ini bukan hanya wujud nyata semangat “Kemenkeu Satu”, tetapi juga sebuah lompatan besar menuju efisiensi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih prima”.



“Melalui inisiatif ini, negara berhasil melakukan penghematan anggaran sewa gedung sebesar Rp553.333.333 per tahun biaya pemeliharaan gedung, biaya daya dan jasa dan seterusnya. Dan yang lebih penting adalah penyediaan prasarana kantor yang lebih baik, mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bangunan tersedia yang layak difungsikan sebagai kantor di wilayah Kota Ruteng. Ini adalah bukti konkret dari upaya Kementerian Keuangan dalam mengelola sumber daya secara optimal, tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Lebih dari sekadar efisiensi anggaran, kolaborasi ini juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan stakeholder Kementerian Keuangan di wilayah Kabupaten Manggarai dan sekitarnya”.

“Harapan ke depan, keberadaan Gedung Kolaborasi ini bukan sekadar co-location, melainkan penguatan identitas Kementerian Keuangan sebagai institusi yang solid dan saling terintegrasi. Model ini diharapkan mampu mendukung proses bisnis yang semakin streamline, khususnya pada lini Customer Service Officer (CSO), sehingga masyarakat dan satuan kerja vertikal dapat merasakan alur layanan yang lebih sederhana dan efisien, tanpa harus memahami batas struktural antar unit”.



“Kolaborasi ini juga memberikan gambaran yang lebih utuh bagi masyarakat terkait hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik dari sisi perbendaharaan, penyaluran pembiayaan, penganggaran, maupun dari sisi fiskal/perpajakan. Pemahaman ini penting untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif masyarakat dan satuan kerja vertikal dalam membangun negeri”.

“Kami optimis bahwa sinergi seperti ini dapat direplikasi di berbagai daerah lain sebagai role model pelaksanaan nilai-nilai collaborative governance dalam tubuh Kementerian Keuangan. Semoga kolaborasi ini terus berkembang dan membawa manfaat luas bagi organisasi, stakeholder dan masyarakat luas”.



Selanjutnya kami pun mendapat pernyataan dukungan dari Kepala Sekretariat Perwakilan Kemenkeu di Kota Balikpapan, Bapak Fitra Riadian mengungkapkan bahwa “Saya lihat, awalnya layanan bersama ini mengakrabkan para pegawai lintas eselon 1. Pelan-pelan para petugas saling bertukar informasi tentang pekerjaan dan misi masing-masing instansi, sehingga menambah wawasan para pegawai menjadi lebih luas. Nah, pada akhirnya, layanan kolaborasi ini memudahkan dan meningkatkan kolaborasi dan sinergi, baik dalam mencapai agenda salah satu unit ataupun tujuan bersama”



Para pejabat pengampu penanggungjawab pelaksanaan Kantor Kolaborasi telah berupaya maksimal dalam menjalankan arahan pimpinan untuk Kemenkeu Satu. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan di lapangan, berbagai tantangan tentu tidak dapat dihindari. Salah satu tantangan terbesar adalah perlunya perencanaan matang agar operasional unit kerja tetap berjalan normal tanpa gangguan signifikan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan dinamika administratif juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan kelancaran penggabungan satuan kerja dan model layanan kolaborasi yang dijalankan.



Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kemenkeu menerapkan sejumlah solusi adaptif. Di antaranya adalah dengan memperkuat koordinasi antara satker di daerah dan unit eselon I nya serta Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku Pengguna Barang Kementerian Keuangan. Selain daripada itu pada akhirnya dampak yang paling signifikan atas pengelolaan aset adalah budaya baru dalam pengelolaan aset negara: budaya perencanaan berbasis kebutuhan, kolaborasi lintas unit, serta orientasi pada peningkatan nilai manfaat aset secara berkelanjutan.



Beralih dari kesuksesan dalam implementasi gedung kantor bersama dan pelaksanaan layanan terpadu, Kementerian Keuangan terus berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hunian para pegawainya. Hingga 2024, penataan telah dilakukan terhadap unit rumah negara melalui optimalisasi, revitalisasi, dan pembangunan baru (landed house, rusunara, hingga asrama).

Optimalisasi Rumah Negara eksisting merupakan langkah jangka pendek yang harus diupayakan dalam memenuhi kebutuhan hunian pegawai dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran.



Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah penertiban administrasi dan penertiban dari penghunian yang tidak berhak baik oleh pensiunan maupun keturunan pensiunan sehingga Rumah Negara dapat dihuni oleh pegawai aktif.

Revitalisasi Rumah Negara bertujuan untuk memberikan hunian yang layak, nyaman, dan sesuai standar kelayakan bagi para pegawai, sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Revitalisasi dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran dan keberlanjutan. Prosesnya juga melibatkan sinergi lintas unit eselon, termasuk koordinasi dengan unit pengguna dan para penghuni rumah negara.

Pembangunan rumah negara dilaksanakan dengan prinsip hati-hati dan berdasarkan penghitungan kebutuhan yang tepat. Pembangunan rumah negara tidak hanya berbentuk rumah tapak namun bisa berupa mess atau rusunara yang diperuntukkan pegawai Kementerian Keuangan. Rumah Negara bukan sekadar aset fisik, tetapi juga instrumen strategis dalam menjaga semangat, loyalitas, dan produktivitas pegawai. Roadmap nasional yang disusun hingga 2028 juga menjadi bukti kuat bahwa langkah ini bukan kebijakan sesaat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang.

## HASIL DAN DAMPAK

Program penataan kawasan aset yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan perubahan signifikan terhadap tampilan fisik dan fungsi kawasan di lingkungan kerja. Salah satu perubahan terbesar yang dirasakan adalah transformasi dari gedung-gedung terpisah menjadi kawasan terpadu yang lebih modern, efisien, dan fungsional. Gedung-gedung kantor yang sebelumnya tersebar di lokasi berbeda kini terhubung dalam satu kawasan yang lebih terorganisir, memungkinkan terciptanya lingkungan kerja yang lebih terintegrasi. Dengan desain yang lebih terbuka dan ramah terhadap teknologi, kawasan ini kini mampu mendukung berbagai aktivitas pegawai secara lebih efektif.

Kolaborasi antar-unit juga meningkat seiring dengan perubahan ini. Sebelumnya, pegawai dari berbagai unit Kemenkeu sering kali merasa terpisah, baik secara fisik maupun dalam hal komunikasi. Dengan adanya ruang kolaboratif yang dirancang khusus untuk mendukung interaksi lintas divisi, pegawai kini dapat lebih mudah bertukar informasi, berkolaborasi dalam proyek-proyek besar, dan memecahkan masalah bersama. Penataan kawasan ini memberikan suasana yang lebih dinamis dan kolaboratif, yang tentunya mendukung pencapaian tujuan bersama Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara secara lebih optimal.

Tak hanya memberikan dampak pada efektivitas kerja, penataan kawasan juga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan pegawai. Salah satu perubahan yang terasa signifikan adalah keberadaan hunian yang nyaman bagi pegawai, terutama di lokasi-lokasi penugasan yang sebelumnya kurang mendukung. Dengan hunian yang lebih baik dan fasilitas yang lebih memadai, pegawai kini dapat merasakan kualitas hidup yang lebih baik, yang berdampak langsung pada motivasi dan produktivitas mereka. Ketersediaan hunian yang layak ini juga menjadi solusi bagi pegawai yang selama ini kesulitan mencari tempat tinggal dekat dengan lokasi kerja, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, perubahan ini juga memungkinkan pegawai untuk mencapai kehidupan kerja yang lebih seimbang (*work-life balance*). Dengan akses yang lebih mudah ke tempat kerja dan lingkungan hunian yang nyaman, pegawai memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga dan kegiatan pribadi. Kondisi ini penting dalam menjaga kesejahteraan mental dan fisik pegawai, yang pada gilirannya berdampak positif pada kinerja mereka. Penataan kawasan ini secara langsung mendukung upaya Kemenkeu untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya efisien, tetapi juga mendukung kualitas hidup pegawai secara keseluruhan.



Testimoni dari pegawai juga menunjukkan dampak positif yang signifikan dari penataan kawasan ini. Banyak pegawai yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh menuju kantor kini dapat bekerja dengan lebih nyaman dan fokus. Proses relokasi dan pembangunan fasilitas yang lebih baik memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai, sehingga mereka dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas mereka tanpa dibebani masalah transportasi yang memakan waktu dan energi. Testimoni ini menggambarkan betapa pentingnya perbaikan infrastruktur dalam menciptakan kondisi kerja yang ideal.

- ➔ Selain dampak langsung pada pegawai, penilaian pimpinan Kemenkeu terhadap hasil program ini sangat positif. Pimpinan menilai bahwa penataan kawasan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pegawai, tetapi juga mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan aset. Fasilitas yang lebih terintegrasi dan mudah diakses mengurangi biaya operasional yang sebelumnya tersebar di berbagai lokasi. Selain itu, dengan adanya kawasan yang lebih terkelola dengan baik, Kemenkeu dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan mengurangi pemborosan yang sering terjadi akibat pengelolaan aset yang tidak efisien.

Penataan kawasan ini juga mendukung nilai-nilai Kemenkeu sebagai institusi yang modern dan adaptif terhadap perubahan. Dengan memanfaatkan konsep ruang kerja yang lebih terbuka dan mendukung teknologi terkini, Kemenkeu menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pegawai, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan dan efisiensi. Hal ini sejalan dengan visi Kemenkeu untuk menjadi lembaga yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan negara, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing di tingkat global.

- ➔ Dalam konteks yang lebih luas, dampak program penataan kawasan ini mencakup kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan strategis nasional. Program ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang baik dapat mendukung agenda besar reformasi birokrasi di Indonesia, dengan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara. Penataan kawasan ini tidak hanya memberi manfaat bagi pegawai Kemenkeu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

- ➔ Dengan demikian, hasil dan dampak dari penataan kawasan aset ini membuktikan bahwa infrastruktur yang baik dapat membawa perubahan signifikan dalam kinerja organisasi dan kesejahteraan pegawai. Program ini tidak hanya mengubah tampilan fisik, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih kolaboratif, sehat, dan produktif. Ini adalah langkah maju bagi Kemenkeu dalam mewujudkan visinya sebagai lembaga yang modern, efisien, dan berkelanjutan.





## [CHAPTER 2] PENGUNAAN BMN

Ditulis oleh Edy Gunawan

*Klunting-klunting.*

Terdengar suara sendok dan piring beradu dari piring Budi dan Siti, ketika Andi baru saja duduk membuka nasi bungkusnya.



"Siti, Apa pendapatmu tentang penetapan status penggunaan BMN?" tanya Budi.

Siti mengangguk pelan sembari menelan makanannya "Menurutku, PSP penting sekali, Kita harus pastikan BMN digunakan sesuai kebutuhan instansi. Status penggunaannya harus ditetapkan berdasarkan analisis yang matang."

"Bagaimana dengan pengalihan status penggunaan BMN? Kalau ada BMN yang tak lagi dipakai satu unit, bisa dialihkan ke yang butuh. Itu jauh lebih efisien." Sambung Andi.

"Setuju," sahut Budi. "Pengalihan mencegah pemborosan. Bahkan, kalau bisa digunakan bersama oleh beberapa instansi, lebih baik lagi."

Siti tersenyum. "Benar. Gedung atau fasilitas bersama bisa memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi."



"Dan memperkuat koordinasi antar instansi," tambah Andi. "Kita bisa saling dukung dengan berbagi sumber daya."

"Kuncinya," ujar Budi, "semua pihak harus paham pentingnya efisiensi BMN. Pemantauan dan evaluasi rutin juga perlu."

Siti mengangguk. "Dengan pemantauan, kita bisa cepat mendeteksi masalah dan memperbaikinya."

"Aku usul," kata Andi, "kita bentuk tim khusus untuk awasi penggunaan BMN secara berkala."

"Ide bagus," jawab Budi. "Dengan begitu, pengawasan lebih terarah, dan penggunaan BMN tetap optimal."

"Dan jangan lupa," kata Siti, "BMN yang idle harus segera dialokasikan. PSP BMN kuncinya."



"Penetapan status itu bukan sekadar formalitas. Ia bantu kita pastikan aset negara dimanfaatkan maksimal dan tetap dalam kendali yang baik." tutup Andi, mengakhiri sesi makan siang bersama hari itu.

Pemanfaatan BMN adalah proses yang menentukan bagaimana aset negara dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang optimal.

"Siti, Andi, Apa pendapat kalian tentang pemanfaatan BMN?" tanya Budi dari balik laptopnya.

Siti menyahut "Pemanfaatan BMN bisa memberikan banyak manfaat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Misalnya, kita bisa menyewakan aset yang tidak digunakan untuk mendapatkan penerimaan selain pajak."

"Selain sewa," tambah Andi, "ada juga pinjam pakai. Kita bisa bantu instansi lain tanpa melepas kepemilikan."

Budi mengangguk. "Atau kerjasama dengan swasta. Kita kelola aset bersama, lalu berbagi hasilnya."

"Bisa juga lewat skema BGS," kata Siti. "Pihak ketiga bangun fasilitas, lalu setelah masa kerjasama, asetnya jadi milik kita."

"Efisien tanpa beban anggaran besar," ujar Andi. "Tapi tetap harus sesuai kebutuhan kita."

Budi menekankan, "Semua bentuk pemanfaatan harus transparan dan sesuai aturan. Dan tentu, diawasi rutin."

"Pemantauan penting untuk identifikasi danantisipasi kendala yang mungkin muncul selama proses pemanfaatan BMN," timpal Siti.

"Aku usul," kata Andi, "kita bentuk tim khusus yang bertugas untuk mengelola pemanfaatan BMN. Mereka analisis potensi aset, cari mitra, dan memantau kerjasama."

"Ide bagus," jawab Budi. "Kita bisa memastikan bahwa pemanfaatan BMN dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan rencana serta mengatasi masalah yang mungkin muncul."

"Jangan lupa, kita juga harus mengatasi masalah BMN yang idle. PSP BMN menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut dapat dialokasikan dan digunakan kembali oleh satuan kerja yang membutuhkan." jelas Siti.

Andi menegaskan, "PSP itu kunci. PSP membantu mengidentifikasi dan mengalokasikan BMN yang idle atau tidak digunakan secara optimal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan satuan kerja yang memerlukan. Dengan demikian, penetapan status penggunaan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan BMN, tetapi juga memastikan pengawasan dan pengendalian yang baik terhadap aset negara."

"Lebih dari itu," kata Budi, "pemanfaatan BMN bisa hasilkan PNBPN yang signifikan. Jadi sumber pendapatan tambahan."

Siti tersenyum. "Benar. Manfaatnya bukan cuma untuk instansi, tapi juga masyarakat."

Di sudut ruang kolaborasi, Budi, Siti dan Andi masih duduk bersantai menghadap laptop masing-masing saat hujan mulai turun menambah dingin suasana malam dikantor itu.

"Hari ini benar-benar melelahkan, tapi hasilnya sangat memuaskan," kata Siti.

Andi mengangguk. "Kerja keras kita membuahkan hasil. Besok kita lanjut lagi."

Budi menatap jendela berkabut. Di luar, hujan masih mengguyur. Tapi di dalam, semangat mereka tetap hangat.



## RENON YANG BARU : KAWASAN HUNIAN MODERN UNTUK MASA DEPAN

Ditulis oleh Edy Gunawan  
Foto oleh Much Hari Cahyo

Di sebuah kota yang indah bernama Denpasar, tepatnya di Renon, terdapat sebuah kawasan yang dulunya penuh dengan rumah-rumah negara yang sudah tua dan rusak. Kawasan ini adalah tempat tinggal para punggawa keuangan negara yang bekerja di Kementerian Keuangan. Namun, kondisi rumah-rumah tersebut sudah tidak layak huni lagi, dan para pegawai merasa kurang nyaman tinggal di sana.

Para pimpinan di Kementerian Keuangan, dengan visi yang jauh ke depan, memutuskan untuk melakukan perubahan besar-besaran. Mereka ingin membangun fasilitas hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga dapat mendukung kinerja dan tugas para pegawai. Diprakarsai oleh program Penataan Kawasan Hunian, proyek besar penataan kawasan kompleks rumah negara di Renon, Denpasar pun dimulai. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Setjen Kemenkeu bersinergi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali serta satker-satker Kemenkeu di Kota Denpasar.

Proyek ini mencakup beberapa kegiatan utama. Pertama, pembangunan Rumah Susun Negara (Rusunara) yang terdiri dari tiga tower. Dua tower tipe 36 dengan empat lantai, dan satu tower tipe 45 juga dengan empat lantai. Rusunara ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian para pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan, dengan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, dibangun juga Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ruang kantor, ruang kelas, asrama, dan sarana lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Balai Diklat Keuangan.

Kawasan Renon di Denpasar, yang dulunya penuh dengan rumah-rumah negara yang sudah tua dan rusak, kini menjadi pusat perhatian dengan proyek penataan yang ambisius. Kompleks Rumah Negara Kementerian Keuangan di Renon memiliki total luas 23.990m<sup>2</sup>. Di dalamnya terdapat 106 unit rumah negara, sebuah gedung pos jaga permanen, Banjar Sembung Sari, dan lapangan tenis. Namun, kondisi awal rumah negara di kompleks ini sangat memprihatinkan. Dari 98 unit rumah milik Kementerian Keuangan, 40 unit dihuni oleh pihak yang tidak berhak atau pensiunan, 45 unit kosong, dan hanya 13 unit yang dihuni oleh pegawai aktif.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Keuangan memulai langkah-langkah penertiban fisik kompleks Renon. Langkah pertama adalah pemetaan kondisi penghuni rumah negara yang tidak berhak. Pemetaan ini dilakukan untuk memahami tingkat kesadaran, kemauan, dan kemampuan penghuni untuk keluar dari rumah negara yang mereka tempati.



*foto : kondisi perumahan kompleks Renon sebelum dilakukan penataan kawasan*



Selain itu, penguatan dari sisi administrasi dan hukum juga dilakukan untuk memastikan langkah penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tim penataan barang milik negara dibentuk berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal, dengan tujuan mempercepat penyelesaian tugas penataan kawasan dan penertiban kompleks Renon. Surat perintah pengosongan rumah negara juga telah dikeluarkan oleh satker-satker Kemenkeu di Kota Denpasar. Dalam upaya penertiban, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk supervisi kegiatan penertiban rumah negara. Kegiatan audiensi dan *courtesy call* dilakukan dengan berbagai instansi, seperti Walikota Denpasar, DPRD Kota Denpasar, Kepolisian Daerah Bali, dan Kejaksaan Tinggi Bali, untuk mendapatkan dukungan dan pendampingan dalam penertiban rumah negara.

Pendekatan persuasif juga dilakukan melalui sosialisasi kepada para penghuni rumah negara yang tidak berhak, serta penawaran dibangun Banjar Sembung Sari yang lebih baik dan representatif bagi masyarakat yang terdampak pembangunan. Strategi komunikasi dan pengelolaan opini publik pun disusun. Penataan kawasan dan penertiban kompleks rumah negara di Renon dilakukan secara persuasif dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan Rusunara ASN Kemenkeu dipercayakan kepada kontraktor PT. Global Karya Sejahtera Raya - PT. Samudra Anugrah Indah Permai, KSO, dengan nilai kontrak sebesar Rp49.530.912.478. Manajemen konstruksi dilakukan oleh PT. Angelia Oerip Mandiri KSO PT. Konindo Panorama Konsultan, dengan nilai kontrak Rp2.220.077.145. Pembangunan ini dijadwalkan berlangsung selama 270 hari kalender, dimulai pada 5 Maret 2024 dan selesai pada 30 November 2024. Setelah itu, akan ada masa pemeliharaan selama 365 hari kalender, dari 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025.

Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar dibangun oleh kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan nilai kontrak sebesar Rp116.146.000.000.

Manajemen konstruksi dilakukan oleh PT. Ciriayasa Cipta Mandiri, dengan nilai kontrak Rp2.663.667.000. Pembangunan gedung ini dijadwalkan berlangsung selama 300 hari kalender, dimulai pada 5 Februari 2024 dan selesai pada 30 November 2024. Masa pemeliharaan juga berlangsung selama 365 hari kalender, dari 1 Desember 2024 hingga 31 November 2025.

Dengan pembangunan Rusunara ASN Kemenekeu dan Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar, kawasan Renon di Denpasar semakin menunjukkan perubahan yang signifikan. Rumah Susun Negara akan menyediakan hunian yang layak bagi para pegawai Kementerian Keuangan, sementara Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar akan menjadi pusat pelatihan yang modern dan lengkap. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup para pegawai, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kinerja dan pelayanan Kementerian Keuangan.

Kawasan Renon yang dulunya terlihat kumuh dan tidak terawat, kini berubah menjadi kompleks hunian yang *modern* dan nyaman. Para pegawai Kementerian Keuangan merasa lebih bersemangat dan termotivasi dalam menjalankan tugas mereka. Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar menjadi pusat pelatihan yang ramai dan produktif, sementara para kepala kantor menikmati rumah dinas baru mereka yang luas dan nyaman. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup para pegawai, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kinerja dan pelayanan Kementerian Keuangan. Denpasar kini memiliki kawasan hunian yang menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia, menunjukkan bahwa dengan visi yang jelas dan kerja keras, perubahan besar dapat tercapai.

Dengan semangat dan kerja keras, proyek ini berjalan lancar. Kawasan yang dulunya terlihat kumuh dan tidak terawat, kini berubah menjadi kompleks hunian yang *modern* dan nyaman. Para pegawai Kementerian Keuangan merasa lebih bersemangat dan termotivasi dalam menjalankan tugas mereka. Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar menjadi pusat pelatihan yang ramai dan produktif, sementara para kepala kantor menikmati rumah dinas baru mereka yang luas dan nyaman.



*Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup para pegawai, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kinerja dan pelayanan Kementerian Keuangan. Denpasar kini memiliki kawasan hunian yang menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia, menunjukkan bahwa dengan visi yang jelas dan kerja keras, perubahan besar dapat tercapai.*





*Gedung BDK Tampak Depan*



*Gedung BDK dan Kelas*



*Gedung Asrama Diklat 2*



*Gedung Asrama*



*Tempat Ibadah (Masjid)*



*Tempat Iba*





s Diklat Tampak Depan



Gedung Kelas Diklat Tampak Depan



Tampak Depan



Gedung Asrama Diklat 1



dah (Pura)



Balai Banjar Sembung Sari





*Rusunara 1*



*Rusunara 1 & 2*



*Kamar Tidur Utama*



*Ruangan*



*Ruang Dapur*



*Laundry*





Tampak Depan



Rusunara 2



Tamu



Kamar Tidur 2



Room



Kamar Mandi dan Toilet





## OPTIMALISASI ASET SITAAAN:

### STRATEGI EFISIENSI ANGGARAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN GEDUNG KANTOR

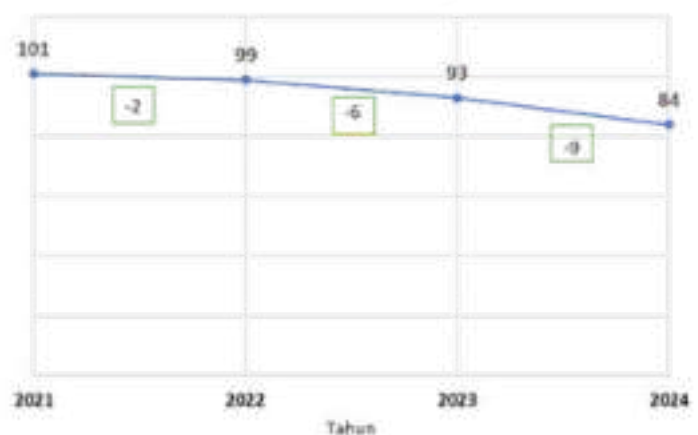
Ditulis oleh Sandi Fajar Pratama  
Foto oleh Much Hari Cahyo

Sejak tahun 2022 Kementerian Keuangan secara konsisten mengambil berbagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja secara lebih hemat dan berkelanjutan, seiring dengan arahan Menteri Keuangan untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Berbagai jurus efisiensi anggaran pun dilakukan. Tidak hanya pembangunan dan optimalisasi gedung sendiri, Kementerian Keuangan juga aktif memanfaatkan aset milik kementerian atau lembaga lain, menerima hibah dan meminjam pakai aset dari pemerintah daerah, hingga mengoptimalkan aset rampasan negara. Langkah-langkah tersebut perlu ditempuh mengingat adanya keterbatasan anggaran yang kita miliki.

Kebutuhan sewa gedung kantor yang sebelumnya tercatat pada awal tahun 2022 sebesar 101 unit satuan kerja dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp345,39 miliar per tahun, secara bertahap berhasil ditekan. Sampai akhir tahun 2024, jumlah satuan kerja yang masih bergantung pada sewa gedung berkurang menjadi 84 unit. Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun, Kementerian Keuangan berhasil memenuhi kebutuhan ruang kantor permanen bagi 17 Satuan Kerja tanpa harus bergantung pada mekanisme sewa lagi.

Capaian itu tidak hanya menunjukkan efektivitas program efisiensi yang dicanangkan, tapi juga menunjukkan bahwa melalui pengelolaan aset yang lebih optimal, kebutuhan operasional tetap dapat dipenuhi tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Selain itu, dari keberhasilan ini, Kementerian Keuangan mampu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp41,39 miliar per tahun. Penghematan ini nantinya bisa dialihkan untuk mendukung program prioritas lain.

Jumlah Satker Masih Sewa per-Tahun



Keterangan:

- = Jumlah satker masih sewa tahun yang bersangkutan
- = Pengurangan satker sewa



Jumlah Biaya Sewa Gedung Kantor per-Tahun  
(dalam jutaan rupiah)



Keterangan:

- = Jumlah biaya sewa GK tahun yang bersangkutan
- = Pengurangan biaya dan persentasenya

Tapi, tugas Kementerian Keuangan tidak berhenti di situ. Masih ada 84 unit satuan kerja yang perlu dipenuhi kebutuhannya. Tantangannya jadi makin berat, seiring dengan ditetapkan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Makanya opsi-opsi pemenuhan gedung kantor tanpa membebani APBN harus makin dikejar. Salah satu yang bisa dijadikan inspirasi untuk satuan kerja lain adalah keberhasilan KP2KP Mocosari memanfaatkan aset eks sitaan KPK.

### Inspirasi dari Mojosari

Di tahun 2022, KP2KP Mojosari masih harus mengeluarkan biaya sewa gedung sebesar Rp78 juta per tahun. Tentu saja, ini menjadi beban yang ingin segera dikurangi. Melihat kondisi itu, Kepala Kantor KPP Pratama Mojokerto, selaku satuan kerja induk dari KP2KP Mojosari, bersama tim KP2KP Mojosari langsung tancap gas: mereka aktif mencari alternatif gedung yang bisa digunakan tanpa perlu sewa lagi.

Usaha mereka membuahkan hasil ketika menemukan informasi soal aset eks rampasan KPK, berupa bangunan seluas 335 meter persegi di atas tanah seluas 492 meter persegi, yang terletak di lokasi strategis di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan.

Menemukan aset potensial baru langkah awal. Tantangan berikutnya: bagaimana caranya supaya aset itu bisa sah digunakan sebagai gedung kantor KP2KP Mojosari? Tim pun bergerak cepat. Mereka melakukan pengecekan lapangan, menjalin koordinasi dengan instansi setempat seperti KPKNL, Pemerintah Daerah, dan Kantor Pengadilan, juga melibatkan unit-unit terkait di Kementerian Keuangan, seperti Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak dan Biromadan. Selaku Pengguna Barang, Biromadan turut aktif berkoordinasi dengan Pengguna Barang KPK untuk memastikan semua proses dan persyaratan dapat dipenuhi.

Setelah semua persiapan matang, pada 7 Maret 2023, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, berdasarkan usulan berjenjang dari KPP Pratama Mojokerto, resmi mengajukan permohonan penetapan status penggunaan aset tersebut kepada KPK. Ini adalah langkah administratif penting agar aset bisa digunakan secara legal dan formal oleh KP2KP Mojosari.

Hasilnya, KPK menindaklanjuti permohonan tersebut dan mengajukan penetapan status penggunaan kepada DJKN selaku Pengelola Barang. Akhirnya, pada 15 Desember 2023, aset tersebut resmi ditetapkan menjadi BMN atas nama Kementerian Keuangan c.q. KP2KP Mojosari.

Tidak berhenti sampai di situ, KPP Pratama Mojokerto dan KP2KP Mojosari, dibantu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak dan Biromadan, langsung bergerak cepat mempersiapkan segala kebutuhan teknis agar aset tersebut bisa segera ditempati oleh KP2KP Mojosari. Hingga akhirnya, aset yang terletak di Jalan Raya Gajah Mada No. 72, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, resmi difungsikan menjadi gedung kantor baru KP2KP Mojosari.

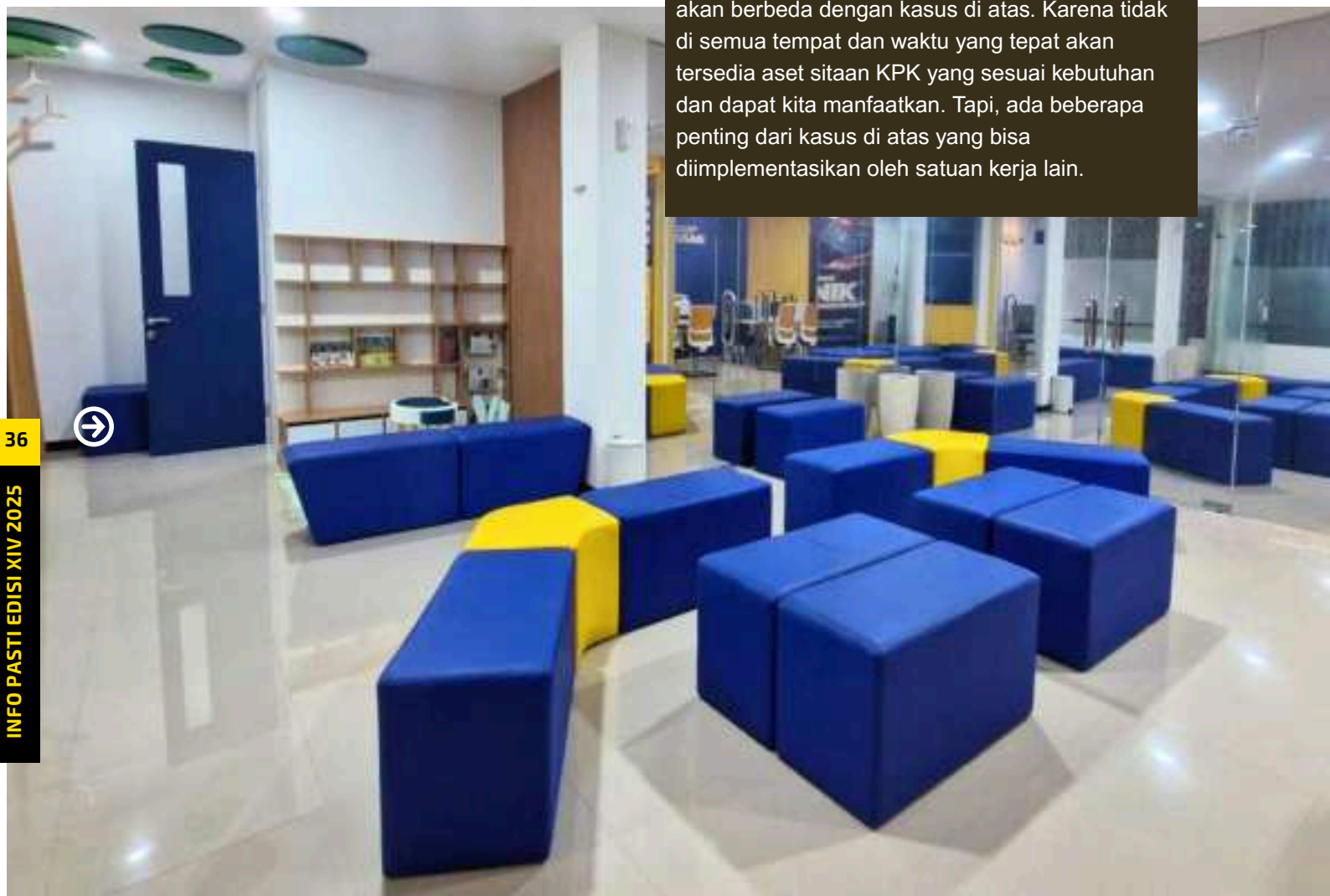




### Pelajaran yang Bisa Dipetik

Apa yang dilakukan KPP Pratama Mojokerto dan KP2KP Mojosari merupakan langkah positif yang dapat menjadi inspirasi bagi satuan kerja lain dalam memenuhi kebutuhan BMN nya. Tantangan dan solusi yang tersedia di tempat lain, mungkin akan berbeda dengan kasus di atas. Karena tidak di semua tempat dan waktu yang tepat akan tersedia aset sitaan KPK yang sesuai kebutuhan dan dapat kita manfaatkan. Tapi, ada beberapa penting dari kasus di atas yang bisa diimplementasikan oleh satuan kerja lain.

➡ foto : kondisi setelah selesai renovasi



Pertama, komitmen adalah kunci utama. Tidak cukup hanya mengandalkan arahan dari atas, satuan kerja perlu aktif mengambil inisiatif untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena yang paling mengetahui kondisi di lapangan adalah satuan kerja itu sendiri. Inilah yang ditunjukkan oleh KPP Pratama Mojokerto dan KP2KP Mojosari dengan komitmen yang kuat, mereka tidak menunggu, melainkan bergerak mencari solusi. Kedua, sikap proaktif dalam mencari peluang menjadi pembeda. Mereka tidak sekadar menerima keadaan harus menyewa gedung, tetapi berani mencari alternatif. Inisiatif kreatif seperti inilah yang membuat perubahan bisa terjadi.

Ketiga, keberhasilan tidak bisa dicapai sendirian. Proses pengalihan aset membutuhkan koordinasi lintas unit, melibatkan banyak pihak mulai dari internal Kementerian Keuangan seperti Biro Madan dan Sekretariat Uni Eselon 1, selaku Pengguna Barang dan Pembantu Pengguna Barang, KPKNL selaku Pengelola Barang, hingga instansi eksternal seperti KPK, Pengadilan, Pemda setempat, dan Kementerian/Lembaga lain. Ini menunjukkan manfaat dan pentingnya kolaborasi. Keempat, pentingnya bergerak cepat setelah peluang ditemukan. KP2KP Mojosari tidak membiarkan peluang berlalu begitu saja; begitu tahu ada aset potensial, mereka langsung melakukan pengecekan, berkoordinasi, dan melengkapi seluruh proses administrasi. Kecepatan dan ketepatan langkah ini juga krusial. Jangan sampai karena kita terlalu lama bergerak, aset yang diincar malah keburu diambil pihak lain yang bergerak lebih cepat.

Kelima, cerita ini mengingatkan kita bahwa pengelolaan aset negara membutuhkan kreativitas sekaligus tanggung jawab. Dengan pendekatan yang cerdas, aset yang sebelumnya tidak dimanfaatkan bisa diubah menjadi fasilitas produktif yang memperkuat layanan publik.

Terakhir, yang tidak kalah penting, upaya efisiensi ini adalah hasil kerja kolektif. Memang, penghematan Rp78 juta per tahun dari satu unit terlihat kecil, tetapi jika semangat ini menular ke banyak satuan kerja lain, dampaknya terhadap keuangan negara akan sangat besar.

Cerita KP2KP Mojosari membuktikan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin aset sitaan dari KPK tidak tersedia di daerah Bapak/Ibu sekalian. Tapi bisa jadi ada informasi soal aset idle atau aset eks BLBI yang dimiliki oleh KPKNL dan menunggu kita gali. Bisa juga ternyata pemerintah daerah siap menghibahkan asetnya untuk mendukung pelaksanaan operasional satuan kerja Kementerian Keuangan yang merupakan salah satu counterparts mereka dalam fungsi pemerintah. Atau solusi-solusi lain di lapangan.

Dengan komitmen, inisiatif, dan kolaborasi yang kuat, satuan kerja bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus terus bergantung pada anggaran sewa. Lebih dari sekadar penghematan, langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan aset negara bisa dilakukan dengan kreatif dan bertanggung jawab. Semua itu perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan *good governance* dan mematuhi aturan yang berlaku. Biro Madan selaku Pengguna Barang siap berkolaborasi untuk bersama memenuhi kebutuhan gedung kantor bagi seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan.



# MENGOPTIMALKAN ASET NEGARA: EFISIENSI ANGGARAN UNTUK MASA DEPAN INDONESIA

Ditulis oleh Jeri Martin  
Foto oleh Much Hari Cahyo




Foto PLTS pada atap Gedung Dhanapala

- ➔ Dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN) secara optimal, Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan penggunaan sementara BMN, seperti ruang kerja, gedung kantor, dan tanah yang dipinjamkan kepada kementerian atau lembaga lain. Langkah ini bertujuan memastikan aset negara dimanfaatkan dengan baik guna mendukung operasional pemerintahan, mengurangi kebutuhan pengadaan baru, serta meningkatkan efisiensi anggaran. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan BMN, penggunaan sementara aset negara memungkinkan kementerian dan lembaga memanfaatkan fasilitas yang tersedia tanpa harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk pembangunan atau penyewaan gedung.

## **Efisiensi Anggaran dan Arahan Presiden**

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN dan APBD 2025.

Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengurangi pengeluaran tidak esensial dan meningkatkan efisiensi belanja negara. (<https://www.nasional.kompas.com>)

Dalam APBN 2025, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun. Alokasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas guna mempercepat transformasi ekonomi. (<https://www.media.kemenkeu.go.id>)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga menekankan pentingnya optimalisasi aset negara agar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian. Beliau menegaskan bahwa aset negara tidak boleh dibiarkan "tidur", tetapi harus dikelola dengan baik agar menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan negara. (<https://www.money.kompas.com>)

Pada akhir 2023, nilai aset pemerintah mencapai Rp13.072,8 triliun. Sri Mulyani menyoroti bahwa aset sebesar ini tidak boleh sekadar menjadi angka di neraca keuangan, tetapi harus dimanfaatkan secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. (<https://www.tempo.co.id>)

### **Peran Pengelola Aset dalam Efisiensi Anggaran**

Sebagai pengelola aset negara, kita memiliki tanggung jawab memastikan aset digunakan secara maksimal. Aset yang menganggur atau tidak dimanfaatkan dengan baik merupakan bentuk pemborosan yang harus dihindari. Oleh karena itu, sebagai pegawai Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, kita bertanggung jawab untuk memastikan aset negara dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kementerian, lembaga, dan masyarakat.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah meninjau aset yang terindikasi idle, yaitu aset yang tidak digunakan secara optimal atau tidak dimanfaatkan sesuai tujuan awal pengadaannya. Dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset idle, kita dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara sekaligus mencegah pemborosan sumber daya.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menggunakan skema pinjam pakai dalam pemanfaatan aset negara. Pinjam pakai adalah mekanisme pemanfaatan aset negara atau daerah oleh instansi lain dalam jangka waktu tertentu tanpa mengubah kepemilikan aset tersebut. Skema ini memungkinkan pemerintah daerah memperoleh sarana dan prasarana yang dibutuhkan tanpa harus melakukan pengadaan baru, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.

### **Manfaat Efisiensi untuk Kepentingan Publik**

Dengan memanfaatkan aset yang sudah tersedia, kementerian dan lembaga dapat menghemat anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan gedung atau penyewaan ruang kerja. Dana yang berhasil dihemat bisa dialihkan ke sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Sebagai contoh, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi 732 sekolah di berbagai daerah, memperbaiki fasilitas kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, serta membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan komunikasi. Infrastruktur yang lebih baik membantu mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan serta menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh negeri.

Selain itu, sektor kesehatan juga mendapat perhatian melalui penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pengembangan infrastruktur data nasional guna memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik dan merata.

### **Peran Abdi Negara dalam Efisiensi**

Sebagai bagian dari pemerintahan, setiap individu memiliki peran dalam mendukung efisiensi anggaran, baik dalam kebijakan besar maupun tindakan kecil sehari-hari.

Di tingkat staf, efisiensi bisa dimulai dengan menghemat listrik, mencetak dokumen hanya jika diperlukan, serta menggunakan kembali peralatan kantor yang masih layak pakai. Sementara itu, bagi pejabat dan pengambil keputusan, kebijakan optimalisasi aset, integrasi ruang kerja, serta mekanisme kerja sama antar-instansi dapat menjadi strategi efektif dalam memanfaatkan aset negara tanpa membebani APBN.

Dengan kontribusi kecil dari setiap individu, kita dapat menciptakan perubahan besar dalam pengelolaan keuangan negara. Mari bersama-sama berperan dalam membangun Indonesia yang lebih efisien dan berdaya guna. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.



## SUCCESS STORY

# PEMANFAATAN BMN BERUPA SEWA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN



Ditulis oleh Dimpos T. Simamora  
Foto oleh Much Hari Cahyo

### Peranan Sewa BMN

Negara membutuhkan alternatif penerimaan selain pajak untuk membiayai program unggulannya namun negara juga mengalokasikan anggaran yang bersifat tetap dan cukup tinggi yaitu pelunasan utang dan dukungan manajemen. Dukungan manajemen terbesar selain belanja pegawai yaitu pemenuhan kebutuhan Barang Milik Negara meliputi rehabilitasi, renovasi, restorasi, rekonstruksi dan pengadaan baru. Semakin tinggi kebutuhan BMN maka semakin tinggi pula kebutuhan anggaran atas BMN tersebut, demikian sebaliknya. Jika aset dimaksud menganggur atau digunakan oleh pihak tidak berhak, maka pengeluaran yang telah dilakukan justru semakin memperparah optimalisasi APBN.

Pengelolaan BMN memiliki andil di 2 (dua) sisi untuk optimalisasi APBN yaitu efisiensi penganggaran dan monetisasi pendapatan dimana kedua sisi tersebut saling berhubungan. Untuk efisiensi, para manajer aset perlu menghitung BMN yang *overutilized* dan *underutilized* kemudian mengupayakan adanya pertemuan BMN *underutilized* antara satker yang tidak menggunakan dengan Satker yang membutuhkan. Jika “temu butuh” (temu antara satker pencatat dengan satker yang membutuhkan BMN) tidak dapat dilakukan, maka aset dimaksud perlu dimonetisasi melalui pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa.

Sewa merupakan kegiatan pengelolaan BMN dengan memberikan hak penguasaan sementara kepada mitra tanpa mengubah status kepemilikan BMN. Dalam ekonomi dan bisnis, sewa berkontribusi untuk mendayagunakan aset yang tidak digunakan atau ruang tertentu yang tak terpakai pada suatu entitas. Selain PNBP, sewa ditujukan pada 4 peranan yaitu pertama, pengamanan aset negara karena adanya penguasaan fisik secara legal sehingga mengurangi resiko dikuasai tidak berhak/sengketa. Kedua, pengurangan biaya pemeliharaan bahkan belanja modal karena penyewa bertanggung jawab menjaga aset serta diperkenankan melakukan renovasi sepanjang tidak mengubah struktur. Ketiga, pengembangan perekonomian dan bisnis masyarakat sekitar. *Value added* ini tentunya berkontribusi meskipun tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan perkapita pada wilayah tersebut. Ke empat yang tidak kalah pentingnya yaitu menyediakan sarana dan prasarana bagi jenis usaha atau lembaga *sui generis* yang tujuan pendiriannya untuk membantu pemerintah mewujudkan tujuan bernegara. Peranan ini diberikan kementerian keuangan untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang merupakan Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Pentingnya peranan tersebut tentu menuntut pengelolaan BMN yang optimal dan produktif.

"Saya menyampaikan seharusnya aset itu tidak tidur. Asetnya tidur orangnya kerja keras, tapi aset harus bekerja keras sehingga dia memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian," kata Sri Mulyani dalam acara Anugerah Reksa Bandha di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, November 2023). Tutar Menteri Keuangan ini sudah berkali-kali didengungkan untuk mengobarkan mindset pengelolaan BMN agar aset digunakan seluruhnya atau jika tidak digunakan seluruhnya, perlu dilakukan pemanfaatan dimana salah satunya melalui jasa penyewaan. Di lingkungan Kementerian Keuangan, arahan menteri keuangan dimaksud dimotori oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (Biomadan).

Biomadan yang merupakan hasil likuidasi Biro Perlengkapan dan LPSE di tahun 2019 terus mengupayakan produktifitas aset negara yang

berkelanjutan. Tantangan dan rintangan antar periode dijawab oleh Biomadan/Biro Perlengkapan (Biro) dengan cara yang elegan dengan menunjukkan kinerja sukses salah satunya melalui sewa BMN. Artikel ini akan mengupas success story sewa BMN yang digerakkan oleh Biomadan untuk eksekusi oleh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat 3 (tiga) hal kunci kesuksesan Kinerja Sewa BMN yaitu penguatan tata kelola sewa Barang Milik Negara, penguatan rencana dan realisasi, serta pembinaan yang efektif.

### **Kunci Sukses pertama, Penguatan Tatakelola Sewa Barang Milik Negara**

Tata Kelola yang memadai dimulai di masa reformasi Keuangan yang ditandai dengan terbitnya 3 (tiga) paket Undang-Undang (UU) diantaranya undang-undang 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 Tentang Perbedaharaan Negara dan Undang-undangan 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sebelum adanya UU tersebut, tatakelola Keuangan Negara masih berdasarkan Indische Comptabiliteitswet (ICW) yang diterbitkan oleh Pemerintah kolonial belanda. Latar belakang perbaikan tatakelola tidak lepas karena adanya krisis moneter pada tahun 1998. Keruntuhan ekonomi tersebut, membuat Indonesia mereformasi diseluruh lini termasuk ekonomi dan keuangan negara.

Berdasarkan ICW, pemerintah fokus pada bagaimana menghabiskan anggaran dan tidak terlalu memikirkan pengelolaan lebih lanjut atas aset yang dihasilkan. Istilah Barang Milik Negara (BMN) dan sewa BMN juga tidak dikenal dalam terminologi tatakelola keuangan. Negara tidak memiliki standar prosedur sewa dan tidak terdapat data dan informasi mengenai aset tetap pada Laporan Keuangan. Masa suram tersebut diatasi dengan transformasi kementerian keuangan meliputi pembagian kewenangan yang jelas antara pengelolaan aset secara umum dengan Pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh pengelola (Chief operating Officer) dan pengguna (Chief operating Officer). Pengelolaan aset secara umum secara fungsional dilaksanakan oleh DJPB, DJPK dan DJA sedangkan BMN dilaksanakan oleh DJKN.





DJKN selaku pengelola membagi kewenangan pada Biro selaku pengguna barang. Pembagian tugas selanjutnya yaitu penguatan transparansi dan kualitas keuangan dengan mempertajam fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dan APIP. BPK dan APIP bersinergi dengan rumpun eksekutif untuk menjaga tatakelola sewa BMN yang lebih baik.

Dengan adanya kewenangan selaku COO, Biro membuat terobosan-terobosan untuk tatakelola lebih baik yaitu melalui penyusunan kebijakan sewa yang sesuai dengan karakteristik organisasi dan pendelegasian kewenangan pengguna barang. Kebijakan sewa BMN tersebut meliputi dokumen persyaratan pengusulan, pengaturan mengenai bentuk dokumen, penetapan tarif final sewa serta pengawasan dan pengendalian yang memadai





### **Kunci Sukses Kedua, Penguatan Rencana dan Realisasi Sewa Barang Milik Negara**

Menurut para ahli, perencanaan merupakan jembatan antara posisi organisasi saat ini dan posisi yang diinginkan kedepannya. Oleh sebab itu, dalam proses manajemen, perencanaan merupakan hal yang paling krusial. Pareto, dengan teori 80/20-nya yang sangat terkenal, menyatakan bahwa 80% hasil yang didapat berasal dari 20% pekerjaan yang dilakukan. Dengan menggabungkan 2 pernyataan ini, maka 80% keberhasilan disumbangkan oleh 20% perencanaan yang baik. Hal ini berlaku pula untuk kunci sukses sewa BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.



Tantangan yang dihadapi diawal era transformasi keuangan yaitu tidak tersedianya data. Negara menyusun Neraca pertama kali pada tahun 2004 dengan data yang seadanya. Selanjutnya setelah dilaksanakannya Inventarisasi dan penilaian pada tahun 2004-2009, Biro melakukan pengawalan dan pendampingan tindaklanjut IP secara langsung kepada Satker dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pertama kali pada tahun 2011. WTP mengindikasikan bahwa Kementerian keuangan dapat menyajikan data keuangan yang memadai. Dengan semangat yang tinggi untuk perbaikan data yang lebih baik, maka ditahun 2012, untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan melaksanakan inventarisasi. Hasil inventarisasi ini berdampak pada data yang lebih valid karena diketahui kesesuaian antara data dan riil fisik.



Namun pada tahun-tahun tersebut, Kementerian Keuangan tidak memiliki data aset untuk disewakan. Untuk itu, Biro membuat profiling database potensi BMN yang dapat disewakan. Dengan keterbatasan aplikasi, Biro berkoordinasi dengan Unit Eselon I bahu membahu membuat data yang lebih baik. Dengan terjun langsung ke lapangan, makan diketahui ruangan atau BMN tertentu yang menganggur dan tidak dibutuhkan oleh Satker yang lain. Kegiatan profiling meliputi penyusunan identitas data aset, keberadaan dan kelengkapan dokumen sumber, data pengamanan BMN, rincian luasan yang dapat disewakan dan foto BMN untuk setiap Satker di lingkungan Kementerian Keuangan.



Selanjutnya Biro membuat inovasi baru dengan mengubah cara kerja sewa BMN dari Top to Down menjadi Down to Top melalui rencana penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan (RP4) pada tahun 2019. RP4 merupakan subsistem pada pengelolaan BMN yang berisi data rencana pemanfaatan BMN tiga tahunan hasil kompilasi mulai dari Satker sampaikan dengan Unit Eselon I. Dengan adanya data rincian objek sewa BMN pada tahun tersebut dan 2 tahun selanjutnya, maka pengguna barang dengan mudah mendorong Satker merealisasikan sewa karena data dimaksud berasal dari Satker bukan “dorongan” dari pihak lain.



### **Kunci Sukses ketiga, Pembinaan yang efektif dan efisien**

Salah satunya kekurangan mekanisme sewa yaitu tidak adanya reward dan punishment. Tidak adanya stimulus tersebut, membuat Biro gencar melakukan pembinaan yang efektif dan efisien. Pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk BMN award serta pengawasan dan pengendalian (wasdal). BMN award diselenggarakan oleh Biro dengan menilai pelaksanaan pengelolaan BMN termasuk kegiatan PNPB. Hasil penilaiannya menentukan juara 1,2,dan 3 untuk Satker terbaik. Sejalan dengan teori Abraham maslow, program tahunan ini mampu memotivasi pegawai di Satker dengan memberikan penghargaan dan aktualisasi. Dengan adanya apresiasi dimaksud, Satker termotivasi untuk meningkatkan monetisasi sewa BMN.

Wasdal merupakan kegiatan pemantauan dan penertiban BMN yang dilakukan secara insidental dan periodik dengan menangkap informasi mengenai adanya sewa yang tidak sesuai ketentuan bahkan tanpa ketentuan. Biro melaksanakan wasdal berkoordinasi dengan Satker dan Unit Eselon I yang berdampak pada peningkatan penerimaan sewa BMN.

Kunci sukses melalui wasdal ini sangat dirasakan pada periode penyebaran Covid 19 pada tahun 2020-2021. Jasa penyewaan mengalami penurunan signifikan karena adanya kebijakan social distancing. Kebijakan tersebut membuat usaha kantin, penginapan dan perkantoran ikut terdampak. Namun, sewa BMN Kementerian Keuangan memang berdampak namun tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yaitu pada tahun 2020 nilai sewa BMN yaitu Rp24,7 miliar dan ditahun 2021 sebesar Rp20,36 miliar sedangkan pada tahun 2022, yaitu periode pasca kebijakan social distancing, sebesar Rp28,72 miliar. Biro melakukan wasdal dan menindaklanjuti hasil wasdal dimana salah satunya yaitu menangani pengenaan sewa kepada mitra-mitra yang memohon kompensasi akibat dampak social distancing. Dengan pendekatan humanis disertai review APIP yang efektif, maka negara tetap menerima uang disamping menjaga perekonomian para mitra.

Tidak ada hasil yang baik tanpa komitmen menjalankan niat. Demikian pula pemikiran Biro bahwa setiap proses usulan penerbitan keputusan sewa harus ada RP4 nya. Jika tidak ada, maka Satker perlu melakukan revisi. Perbedaan mendasar Kemenkeu dengan K/L lain yaitu adanya penerbitan keputusan Sewa oleh Pengguna Barang. Kebutuhan adanya keputusan sewa yaitu mempertajam peranan Biro dalam mengawal penerimaan negara karena terdapat fungsi kontrol terpusat. Hal inilah yang membuat konsistensi penerimaan negara setiap tahunnya meskipun kondisi ekonomi yang sedang sulit. Keberhasilan RP4 tersebut kemudian disadur dan diperluas untuk seluruh K/L melalui Rencana Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan (RP3) yang dibuat pengelola barang kepada seluruh Kementerian/Lembaga.

Disamping itu, untuk pelaksanaan realisasi yang lebih baik, Biro membuat aplikasi e-sewa untuk digunakan Satker di lingkungan Kementerian Keuangan. E-sewa yang menyadur konsep e-commerce marketplace, membuat calon mitra nyaman dan mudah melakukan survey dan transaksi. Sama dengan digital platform lainnya, e-sewa menghadirkan objek sewa dengan fitur menarik yang dapat dipilih dimanapun dan kapanpun. Hal ini tentunya mempercepat Satker untuk mengeksekusi rencana sewa. Data masyarakat yang tertarik tersebut dapat direalisasikan sebagai calon mitra penyewa sehingga Satker dapat berkoordinasi dengan segera mengajukan usulan sewa dan melakukan penyetoran sewa BMN.





### Capaian Pengelolaan Sewa Barang Milik Negara

Dengan menjalankan 4 kunci kesuksesan tersebut, Kementerian Keuangan mulai memetik hasil manis dengan tinggi nya goodwill Kementerian keuangan sekaligus tersedianya pendapatan negara yang konsisten setiap tahunnya. Goodwill dimaksud yaitu nama baik dan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat bahwa kementerian keuangan mampu menjalankan amanah selaku pengelola dan pengguna barang. Dalam 5 tahun terakhir, masyarakat dapat melihat raihan penghargaan yang konsisten dibidang barang milik negara diantaranya juara 1 kategori utilisasi BMN pada anugerah reksa bandha/BMN award ditahun 2024 dan 2022, juara 3 masing-masing di kategori utilisasi BMN dan peningkatan tatakelola berkelanjutan di ajang yang sama. Anugerah Reksa Bandha yaitu penghargaan 2 tahunan dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang kepada para Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang yang melakukan pengelolaan BMN terbaik. Kemenkeu dianggap mampu mengelola aset terbaik salah satunya karena PNBP yang dihasilkan oleh Sewa BMN cukup menjanjikan yaitu Rp35,38 miliar di tahun 2024 dan Rp36,978 miliar ditahun 2023.

Salah satu contoh saksi bisu kesuksesan sewa yaitu sewa aula dhanapala yang beralamat di Jl Wahidin Raya No 1. Aula dhanapala berlokasi di gedung Soetikno Slamet dimana saat ini dikelola oleh PT Bahana Sakti Jaya seluas 2.755m<sup>2</sup> termasuk lahan parkir seluas 2.616m<sup>2</sup> pada setiap hari sabtu, minggu dan hari libur dengan total setoran PNBP sebesar Rp4,4 miliar per tahun. Gedung yang selesai dibangun 20 tahun yang lalu ini, dimanfaatkan penyewa sebagai tempat pernikahan dan event UMKM. sebagai tempat pernikahan, maka keberadaannya mampu menggerakkan pelaku usaha yang lain seperti papan bunga, catering, jasa transportasi dan lain-lain.

Akhir kata, kedepannya Biro diharapkan membuat kebijakan dan terobosan yang baru sehingga sewa BMN lebih ekstensif dan masif di lingkungan Kementerian Keuangan karena potensi sewa BMN cukup besar dan PNBP secara umum diharapkan oleh pimpinan kementerian keuangan dapat lebih produktif dari tahun ke tahun.

## [CHAPTER 3] PENGAMANAN BMN

Ditulis oleh Edy Gunawan

Pagi ini, Budi dan Siti tiba hampir bersamaan di kantor, mereka langsung bergegas ke ruang rapat untuk mendiskusikan penugasan terkait siklus pengelolaan BMN selanjutnya. Andi menyusul di belakang mereka.

*Slap, slap, slap~*

Siti membuka dokumen di depannya dan mulai menjelaskan. "Pengamanan BMN adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melindungi BMN dari berbagai risiko yang dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan aset negara. Pengamanan BMN mencakup tiga aspek utama: aspek administrasi, fisik, dan hukum," katanya.

Andi, yang sudah siap dengan catatannya, menambahkan, "Kita perlu memastikan bahwa semua langkah yang kita ambil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat melindungi aset negara dengan efektif."

Budi mengangguk. "Kita tinjau langkah-langkah yang perlu diambil. Semua aspek harus tercakup."

"Aku setuju, Budi. Pengamanan BMN sangat penting untuk melindungi aset negara dari berbagai risiko. Kita harus memastikan bahwa pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek administrasi, fisik, dan hukum." Siti menanggapi, mendukung Budi.

"Aspek administrasi itu soal pencatatan. Semua BMN harus terdokumentasi lengkap," tambah Andi.

"Benar," lanjut Budi. "Lalu aspek fisik soal sistem keamanan, pagar, hingga CCTV, semua penting."

"Dan jangan lupakan aspek hukum," ucap Siti. "Status hukum BMN harus jelas, biar kita nggak kerepotan kalau ada sengketa."

Andi mengangkat tangan. "Bagaimana kalau kita bentuk tim khusus untuk urus pengamanan? Mereka bisa inspeksi rutin dan lapor ke kita."

"Bagus," jawab Budi. "Dengan tim itu, kita bisa tangani masalah lebih cepat."

"Dan kita butuh sosialisasi," kata Siti. "Semua pihak harus paham tanggung jawabnya."

Andi mengangguk. "Kalau semua sadar, kerja kita bakal lebih ringan."

Budi melanjutkan, "Ada beberapa kegiatan penting juga untuk pengamanan aset, seperti sertifikasi tanah, penetapan status golongan rumah negara, penertiban rumah negara, dan pengasuransian BMN. Sertifikasi tanah akan memastikan bahwa semua tanah yang kita miliki memiliki dokumen legal yang sah."

"Penetapan status golongan rumah negara juga penting, Budi. Dengan menetapkan status golongan, kita bisa memastikan bahwa rumah negara digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan." sambung Siti.

Andi menambahi "Penertiban rumah negara akan membantu kita mengatasi masalah rumah negara yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kita bisa melakukan inspeksi dan penertiban untuk memastikan bahwa semua rumah negara digunakan dengan benar."

"Jangan lupa pengasuransian BMN. Dengan mengasuransikan BMN, kita bisa melindungi aset negara dari risiko kerugian atau kerusakan yang tidak terduga. Ini akan memberikan perlindungan tambahan bagi aset yang kita miliki." tambah Budi.

Namun, perjalanan menuju pengamanan BMN yang efektif tidaklah mudah. Proses sertifikasi tanah menghadapi berbagai tantangan yang tidak terduga mulai dari masalah kepemilikan yang rumit, proses birokrasi yang memakan waktu lama dan melibatkan banyak pihak.

Hari ini, Budi, Siti, dan Andi berhasil mengatasi tantangan dalam proses sertifikasi tanah. Koordinasi dengan pihak berwenang, melengkapi dokumen yang diperlukan, dan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah.

Pagi yang cerah menyinari ruang rapat. Hangat matahari menembus jendela besar saat Budi, Siti, dan Andi duduk bersiap untuk pertemuan hari itu.

Budi membuka rapat dengan senyum. *"Selamat pagi, teman-teman. Hari ini, kita akan fokus membahas pemeliharaan BMN. Tujuan utama kita adalah memastikan bahwa BMN selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan secara optimal,"* katanya.

Siti mengangguk setuju *"Pemeliharaan BMN adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga nilai dan fungsi aset negara, serta memperpanjang masa manfaatnya. Kita perlu memastikan bahwa semua prosedur dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,"* tambahnya.

Andi, yang sudah siap dengan catatannya, menambahkan, *"Kita juga perlu melakukan inspeksi rutin, perbaikan segera, dan dokumentasi yang lengkap. Semua langkah ini penting untuk memastikan bahwa BMN kita tetap dalam kondisi prima."*

Budi membuka dokumen di hadapannya. *"Kita mulai dari daftar aset yang butuh pemeliharaan. Pastikan penilaian sudah dilakukan agar kita tahu prioritasnya."*

Siti mengusulkan, *"Inspeksi rutin dan perawatan berkala jangan sampai terlewat. Itu dasar menjaga kondisi aset."*

Andi menimpali, *"Kalau ada kerusakan, langsung diperbaiki. Jangan tunggu parah. Kerusakan kecil bisa jadi bencana kalau diabaikan."*

*"Setuju,"* Budi mengangguk. *"Kita juga perlu jadwal pemeliharaan yang jelas agar bisa mengantisipasi kerusakan sebelum muncul."*

*"Kita bisa kerja sama dengan teknisi atau pihak ahli,"* tambah Siti. *"Mereka punya kompetensi untuk pastikan perawatan dilakukan dengan tepat."*

Budi tak lupa menekankan pentingnya dokumentasi. *"Semua kegiatan pemeliharaan harus tercatat. Ini bantu pengawasan dan evaluasi."*

Siti mengangguk mantap. *"Dokumentasi pemeliharaan akan memberikan informasi yang jelas tentang kondisi BMN dan tindakan yang telah dilakukan. Dengan begitu, kita bisa terus meningkatkan kinerja dan efisiensi pemeliharaan BMN."*

Rapat selesai, mereka menuju ke kantin bersama-sama untuk istirahat dan makan bersama.



# BUDAYA EGO OFFICE : JADI CUAN



Ditulis oleh Suroso  
Foto oleh Much Hari Cahyo

### **Menghasilkan Uang dari Sampah di Rumah Tangga Kecil: Solusi Cerdas, Kreatif, dan Berkelanjutan**

Di era modern ini, masalah sampah menjadi tantangan besar bagi masyarakat, termasuk di rumah tangga kecil. Namun, selain menjadi masalah, sampah juga dapat diubah menjadi peluang untuk menghasilkan uang. Dengan kreativitas dan pendekatan yang tepat, sampah rumah tangga tidak hanya bisa dikurangi, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan pendapatan. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah di rumah tangga, mulai dari mendaur ulang, membuat kerajinan tangan, hingga menjual produk yang dihasilkan dari limbah.

Langkah pertama dalam menghasilkan uang dari sampah rumah tangga adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dapat didaur ulang seperti plastik, kertas, logam, dan kaca. Banyak pengepul atau perusahaan daur ulang yang membeli bahan-bahan ini. Dengan memisahkan sampah sesuai jenisnya, kita bisa menjualnya kepada pihak yang membutuhkan, yang akan mengolahnya menjadi produk baru. Hal ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan, tetapi juga memberi kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan dengan menjual limbah yang ada.

Selain itu, sampah organik seperti sisa makanan dan limbah kebun bisa diubah menjadi kompos yang sangat berguna untuk pertanian atau kebun rumah. Membuat kompos di rumah juga menjadi solusi ramah lingkungan karena sampah organik yang terurai di tempat pembuangan sampah dapat menghasilkan gas metana yang berbahaya. Dengan menjual kompos yang dihasilkan, Anda bisa mendapatkan keuntungan sambil turut berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Teknik vermikomposting atau penggunaan cacing untuk mengurai sampah organik juga bisa diterapkan di rumah, dengan hasil berupa kompos berkualitas tinggi yang dapat dijual kepada petani atau tukang kebun.

Untuk yang lebih kreatif, sampah rumah tangga bisa diolah menjadi berbagai produk kerajinan tangan yang menarik dan bernilai jual. Misalnya, botol plastik bekas bisa diubah menjadi vas bunga atau tempat pensil, sementara kaleng bekas bisa dijadikan lampu hias. Kerajinan dari barang bekas ini bisa dijual di pasar lokal atau melalui platform online. Menciptakan produk-produk unik dari sampah tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan potensi pendapatan bagi rumah tangga kecil yang kreatif.

Langkah lainnya adalah dengan menjual limbah elektronik atau e-waste, seperti ponsel lama, komputer rusak, atau charger yang tidak terpakai. Banyak perusahaan yang mengelola e-waste dan membeli perangkat elektronik bekas untuk didaur ulang. Bagian-bagian dari perangkat tersebut, seperti logam atau komponen lainnya, memiliki nilai ekonomi. Dengan menjual e-waste, rumah tangga kecil bisa mendapatkan uang tambahan sambil membantu mengurangi limbah elektronik yang sulit terurai dan berbahaya bagi lingkungan.

Jika tidak mau repot dengan pengolahan sampah secara mandiri, bisa menjual sampahnya tanpa diolah terlebih dahulu. Kini, dengan melakukan pemilahan sampah di rumah, sudah cukup. Saat ini telah tersedia berbagai layanan dari vendor pengolah sampah yang bersedia menjemput sampah langsung ke rumah dan menukarkannya dengan sejumlah uang. Vendor-vendor semacam ini telah hadir di berbagai kota besar di Indonesia. Vendor-vendor tersebut diantaranya Waste4Change, eRecycle, Octopus, Plastavfall Bank, Mountrash, Komunitas Pilah Sampah, dan lain-lain.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, rumah tangga kecil tidak hanya dapat mengurangi jumlah sampah, tetapi juga menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan.





Menghasilkan uang dari sampah tidak hanya bermanfaat bagi keuangan rumah tangga, tetapi juga merupakan cara yang efektif untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan kreativitas, kita semua bisa memainkan peran dalam mengurangi dampak negatif sampah dan mengubahnya menjadi sumber daya yang bernilai.

Mengelola sampah bukan lagi sekadar kewajiban, tapi bisa menjadi peluang bisnis nyata. Rumah tangga kecil dapat mengambil peran penting dalam ekonomi sirkular dengan mengubah limbah menjadi sumber pendapatan. Langkah kecil dari rumah bisa membawa perubahan besar bagi bumi.



### **Hemat Energi Listrik, Hemat Pengeluaran Rumah Tangga**

Penggunaan energi listrik yang bijak di rumah tangga kecil tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penghematan pengeluaran bulanan. Banyak keluarga belum menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil, seperti membiarkan alat elektronik tetap terpasang atau menyalakan

lampu di siang hari, sebenarnya menyedot energi secara terus-menerus dan menambah beban tagihan listrik. Dengan mengubah kebiasaan tersebut, rumah tangga bisa menghemat ratusan ribu rupiah setiap bulannya. Salah satu langkah yang paling efektif adalah mengganti lampu biasa dengan lampu LED. Lampu LED mengonsumsi jauh lebih sedikit listrik namun tetap memberikan pencahayaan maksimal.

Misalnya, mengganti lima lampu pijar 40 watt dengan lampu LED 7 watt yang digunakan selama lima jam per hari bisa menghemat hingga 24,75 kWh per bulan, atau sekitar Rp37.125 jika dikalkulasi dengan tarif listrik standar. Selain itu, membiasakan diri mencabut steker peralatan elektronik saat tidak digunakan juga menghindari konsumsi listrik dalam mode standby, yang bisa menghemat sekitar Rp27.000 per bulan.

Penggunaan pendingin ruangan (AC) juga menjadi salah satu faktor besar dalam konsumsi listrik rumah tangga. Mengurangi waktu penggunaan AC, misalnya dari 10 jam menjadi 6 jam per hari, dapat menghemat hingga 96 kWh atau setara dengan Rp144.000 per bulan. Begitu pula dengan penggunaan mesin cuci yang lebih bijak, dengan-

Tak kalah penting, memanfaatkan cahaya alami dengan membuka jendela dan mematikan lampu di siang hari dapat memberikan penghematan tambahan. Dua lampu yang tidak dinyalakan selama 6 jam di siang hari dapat menghemat sekitar 7,2 kWh atau setara dengan mencuci pakaian hanya tiga kali seminggu dibanding setiap hari, penghematan energi bisa mencapai 8 kWh atau Rp12.000 setiap bulan. Rp10.800. Total dari seluruh langkah sederhana ini, rumah tangga bisa menghemat sekitar 153,95 kWh atau kurang lebih Rp231.000 per bulan.

Dengan komitmen untuk menerapkan kebiasaan hemat energi, keluarga tidak hanya membantu menekan biaya hidup, tetapi juga ikut menjaga lingkungan dari pemborosan energi. Jika dilakukan secara konsisten sepanjang tahun, penghematan ini bisa mencapai lebih dari Rp2,7 juta, jumlah yang cukup besar untuk dialokasikan ke kebutuhan lain. Menghemat listrik bukan sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan hidup berkelanjutan yang bisa dimulai dari rumah sendiri.

💡 <u>Sumber Penghematan</u>	⚡ <u>Energi Dihemat (kWh)</u>	🌱 <u>Penghematan Estimasi (Rp)</u>
<u>Ganti lampu biasa dengan lampu LED</u>	24,75	37.125
<u>Cabut alat elektronik saat tidak pakai</u>	18	27.000
<u>Penggunaan AC lebih efisien</u>	96	144.000
<u>Gunakan mesin cuci lebih bijak</u>	8	12.000
<u>Matikan lampu siang hari</u>	7,2	10.800
<b>TOTAL PENGHEMATAN</b>	<b>153,95</b>	<b>231.000</b>

## Hemat Energi Listrik, Hemat Pengeluaran Rumah Tangga

Penggunaan energi listrik yang bijak di rumah tangga kecil tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penghematan pengeluaran bulanan.

### Ganti Lampu LED



Mengonsumsi lebih sedikit listrik namun memberikan pencahayaan maksimal

### Cabut Steker



Menghindari konsumsi listrik dalam mode standby

### Kurangi Penggunaan AC



Mengurangi waktu pemakaian dapat menghemat banyak ene-

### Mamfaatkan Cahaya Alami



Membuka jendela dan mematikan lampu di siang hari

Jika dilakukan secara konsisten sepanjang tahun, penghematan bisa mencapai lebih dari Rp2,7 juta

## Menghasilkan Uang dari Sampah Rumah

Solusi Cerdas, Kreatif, dan Berkelanjutan

### Daur Ulang



Kumpulkan plastik, kertas, logam, dan kaca. Jual ke perusahaan atau pengepul daurulang

### Kerajinan Tangan



Ubah sampah menjadi barang seperti vas dan tempat pensil. Tewarkan di pasar lokal atau online

### Penjualan E-Waste



Jual perangkat elektronik bekas ke perusahaan pengolah e-waste

### Penbuatan Kompos



Jual perangkat elektronik bekas ke perusahaan pengolah e-waste

Kreativitas adalah kuncinya — Ubah limbah menjadi sumber pendapatan!

# ECO OFFICE

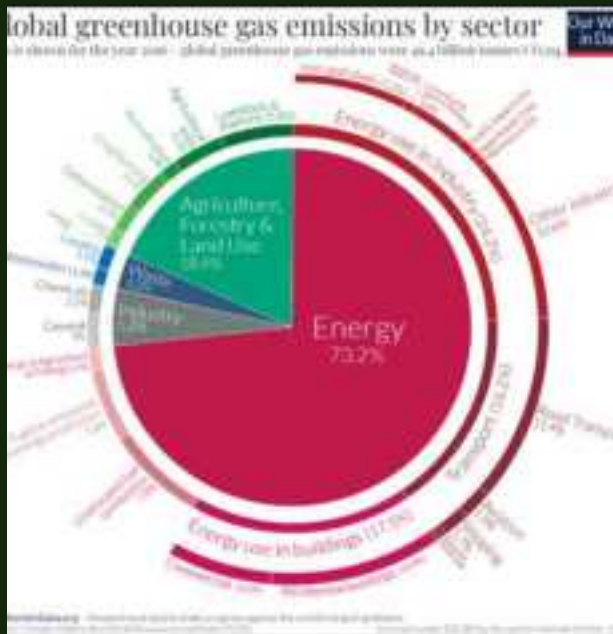
## ECO OFFICE KANTOR KU Efisiensi Jalan Ninjaku

Ditulis oleh Komang Debby Puspita Rini & Ryan Octa Pradana  
Foto oleh Much Hari Cahyo

Kita semua adalah penghuni yang menumpang sementara di Bumi, sedangkan Bumi sudah lebih dulu ada jauh sebelum kita lahir. Sadarkah kalian ketika awal tahun 2000, kebutuhan kita terhadap AC tidak seperti sekarang. Berapa AC yang kalian miliki di rumah ketika awal tahun 2000an? Saat ini, rasanya kita perlu AC di setiap ruangan rumah. Inilah salah satu dampak langsung dari pemanasan Global. Berdasarkan penelitian yang dilakukan World Meteorological Organization (WMO) alias Organisasi Meteorologi Dunia, Suhu permukaan global tahunan pada tahun 2024 adalah  $1,55\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,13\text{ }^{\circ}\text{C}$  lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 1850–1900. Berdasarkan Laporan Iklim Tahunan Tahun 2023 oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), suhu gabungan darat dan laut telah meningkat dengan rata-rata  $0,06\text{ }^{\circ}\text{C}$  per dekade sejak tahun 1850. Tahun 2024 merupakan tahun terpanas dalam catatan observasi selama 175 tahun.



Sebagai informasi, pengukuran rata-rata suhu global tahunan menggunakan periode tahun 1850-1900. Periode tersebut digunakan sebagai periode acuan karena beberapa alasan penting. Pada periode tahun tersebut, data suhu yang cukup lengkap sudah tersedia dan dapat diandalkan secara global. Saat itu termometer sudah ditemukan dan stasiun cuaca di Eropa dan Amerika Utara sudah mencatat suhu secara sistematis. Periode ini menjadi standar Internasional dalam Ilmu Iklim yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga ilmiah global. Selain itu, periode ini merupakan masa sebelum Revolusi Industri atau masa di mana emisi gas rumah kaca belum meningkat drastis.



Emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan setiap sektor

Meningkatnya emisi gas rumah kaca disebabkan utamanya dari kegiatan industri, transportasi, dan deforestasi. Kegiatan deforestasi menyumbang sekitar 10-15% dari total emisi karbon global per tahun, menurut Global Carbon Project. Kegiatan transportasi membutuhkan bahan bakar fosil yang dalam proses pengambilan dan pengolahannya saja sudah menghasilkan emisi gas rumah kaca. Walaupun begitu, kegiatan industri menjadi penyumbang terbesar dalam efek rumah kaca. Lalu bagaimana dengan kegiatan perkantoran? Termasuk sektor yang mana kah?



Kegiatan perkantoran meskipun terlihat sebagai aktivitas “ringan”, sektor ini turut menyumbang emisi secara tidak langsung melalui konsumsi energi dan penggunaan sumber daya. Menurut data dari Our World in Data, sektor energi adalah penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca global dengan kontribusi sekitar 73,2%.

Dari jumlah ini, 30% berasal dari pembangkitan listrik dan panas, kebutuhan yang sangat vital dalam operasional perkantoran. Listrik digunakan untuk penerangan, komputer, pendingin ruangan (AC), lift, dan alat elektronik lainnya. Kegiatan administratif seperti pencetakan dokumen, konsumsi alat tulis, serta penggunaan kertas secara masif turut berkontribusi pada emisi dari sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (18,4%), terutama akibat deforestasi yang terjadi untuk produksi bahan baku kertas. Selain itu, limbah dari kegiatan perkantoran seperti sampah kertas, plastik sekali pakai, dan makanan turut menambah beban pada sektor limbah. Meskipun limbah hanya menyumbang 3% emisi gas rumah kaca, tetapi seharusnya menjadi bagian dari total emisi yang harus dikurangi.

Untuk itu, penting bagi sektor perkantoran untuk berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Langkah-langkah seperti menggunakan energi terbarukan, menerapkan sistem kantor digital (paperless),





➔ mengoptimalkan penggunaan cahaya alami, dan memilah limbah dengan benar bisa secara nyata menurunkan kontribusi emisi dari aktivitas perkantoran. Kesadaran kolektif dan komitmen institusi dalam membangun budaya kerja ramah lingkungan akan sangat membantu dalam mencapai target emisi nol bersih di masa depan.

Sebagai upaya konkret, Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384 Tahun 2024 (KMK-384) yang memuat Pedoman Penerapan Gedung Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office). Regulasi ini menjadi pedoman resmi bagi satuan kerja di bawah Kemenkeu untuk menerapkan praktik perkantoran hijau, baik untuk gedung yang sudah ada, pembangunan baru, maupun bangunan cagar

**Standar yang diatur dalam Penerapan Eco Office**

Ada 7 (tujuh) ruang lingkup penerapan gedung kantor ramah lingkungan yang diatur oleh KMK-384. Berikut gambaran umum ruang lingkup sebagaimana dimaksud antara lain:

- **Pengelolaan Sampah.** Penyediaan tempat sampah terpilah, seperti sampah organik, sampah kertas, sampah kaca, logam, dan plastik, dan sampah residu. Hal ini dimaksudkan agar sampah tidak tercampur sehingga mudah diolah kembali. Namun, sebelum jauh pada mengolah sampah, sebaiknya diupayakan untuk mengurangi sampah atau menggunakan kembali barang-barang yang masih layak agar tidak menghasilkan sampah baru.

➔ pembangunan baru, maupun bangunan cagar



budaya. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung target pengurangan emisi dan keberlanjutan sistem kerja birokrasi.

➔ Pedoman tersebut mencakup sembilan aspek penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas kantor: mulai dari pengelolaan sampah, penghematan energi dan air, penataan ruang kerja, pengendalian kualitas udara, hingga tata ruang luar gedung. Praktik seperti mematikan AC sentral setelah jam kerja, penggunaan sensor cahaya, pengolahan air limbah wudhu, dan optimalisasi penggunaan kertas bekas menjadi bagian dari kebijakan ini. Hal ini tidak hanya mengurangi emisi, tapi juga meningkatkan efisiensi biaya operasional.



- **Penghematan Energi Listrik.** Mematikan AC sentral pada akhir jam kerja dan peralatan listrik yang tidak digunakan dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. Pemilihan penggunaan alat elektronik dengan tingkat efisiensi tertentu juga bisa membantu menghemat energi listrik.
- **Penghematan Penggunaan Air.** Air yang sehari-hari kita pakai, keluar melalui keran. Sebaiknya memilih keran yang mampu menghemat air seperti keran aerator, keran tekan, dan keran sensor otomatis. Selain itu, air bekas perkantoran seperti air bekas wudhu, buangan air bersih dan kotor, dan buangan air AC tidak begitu saja dibuang, tetapi bisa diolah terlebih dahulu misalnya untuk menyiram taman.

- *Penataan Ruang Kerja.* Ruang kerja yang nyaman akan menciptakan produktivitas pegawai. Penataan ruang kerja meliputi menjaga kebersihan, menjalankan prinsip clean desk, mengatur suhu ruang pada 23-26 °C, menyediakan tirai untuk pencahayaan alami serta menjaga tingkat kebisingan.
- *Pengendalian Kualitas Udara Dalam Ruang.* Penyediaan ventilasi dan jendela yang bisa dibuka dapat meningkatkan sirkulasi udara. Adanya tanaman di dalam ruangan menambah kualitas udara dalam ruang. Penyediaan ruangan khusus merokok yang terpisah dari ruang kantor atau di luar gedung kantor menjadi win win solution bagi perokok dan non perokok.
- *Monitoring.* Untuk melakukan monitoring, laporan mengenai informasi tingkat konsumsi energi listrik dan air, serta pengurangan sampah dan air limbah wajib dibuat dan ditampilkan. Pelaksanaan program internalisasi penerapan eco office secara berkala merupakan program yang tidak kalah pentingnya.
- *Pengaturan Tata Ruang Luar Gedung.* Pada sisi luar gedung dapat disediakan area hijau dan tanaman alami di teras, balkon, dinding luar bangunan atau di halaman. Penggunaan sepeda mendukung pengurangan emisi yang disebabkan oleh kendaraan bermotor sehingga perlu disediakan parkir khusus sepeda di area gedung kantor.

Penerapan kantor ramah lingkungan yang berdampak pada efisiensi biaya operasional sejalan dengan prioritas utama Pemerintah Indonesia pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran negara. Kebijakan ini mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memangkas belanja rutin dan operasional tanpa mengorbankan efektivitas pelayanan publik. Sejalan dengan itu, penerapan pedoman eco office menjadi strategi yang tepat karena tidak hanya mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap efisiensi energi, penghematan air, dan digitalisasi proses bisnis yang berdampak pada penghematan anggaran negara. Biaya yang berhasil dihemat dari penerapan eco office dapat dialokasikan ke program lain yang lebih prioritas, misalnya pendidikan.

Jika eco office diterapkan secara masif, berapa biaya yang berhasil dihemat dan berapa program prioritas lain tersebut yang mendapat tambahan anggaran?

Sebagai role model eco office, Biro Umum - Kementerian Keuangan sudah merasakan manfaat efisiensi yang diperoleh dari penerapan eco office. Biro umum melakukan monitoring penggunaan energi listrik pada Gedung Djuanda I dan Djuanda II. Pada bulan Januari 2025, biaya operasional untuk energi listrik yang dikeluarkan sekitar Rp1,03 Miliar atau sebesar 714.623,04 kWh. Pada Februari 2025, biaya operasional untuk energi listrik sebesar Rp725,6 Juta atau sebesar 501.488,51 kWh. Jika dihitung secara presentase, biaya operasional yang dihemat untuk listrik sebesar dari bulan Januari 2025 ke Februari 2025 sebesar 29,55%.

Untuk menghasilkan efisiensi biaya operasional ini, Biro Umum memiliki rencana aksi yang akan dilakukan sepanjang tahun 2025 ini. Aksi yang dilakukan bersifat no cost investment (tanpa biaya investasi) dan low cost investment (investasi dengan biaya rendah). Aksi yang bersifat no cost diantaranya Pengaturan jam operasional AC mulai jam 06.00 sampai dengan 17.00, memastikan lampu pada ruang public seperti lobi, koridor, dan area mezzanine, serta pengaturan jam operasional lift. Untuk aksi yang bersifat low cost yaitu regrouping lampu yang dilaksanakan secara bertahap dari 2021 sampai sekarang. Bayangkan jika hal ini dapat dilakukan oleh 872 satuan kerja Kementerian Keuangan, seberapa besar Kementerian Keuangan bisa menghasilkan efisiensi, seberapa 'bahagia' Bumi ini nantinya. Oleh karena itu, mari KMK 384/2024 dicoba diterapkan.

Selain penghematan biaya operasional, satuan kerja yang menerapkan prinsip eco office akan mendapatkan penilaian dan penghargaan dalam bentuk Piagam Eco Office dengan kategori Silver, Gold, atau Platinum. Sistem ini diharapkan menjadi pendorong internal yang memperkuat budaya kerja berkelanjutan di lingkungan pemerintahan. Penilaian dilakukan oleh tim khusus berdasarkan parameter seperti pengurangan energi, volume limbah, kualitas udara dalam ruangan, dan tingkat partisipasi pegawai dalam praktik ramah lingkungan.



Secara keseluruhan, penerapan konsep eco office adalah jembatan antara isu global dan tindakan lokal yang nyata. Ketika perkantoran mengadopsi prinsip efisiensi energi, digitalisasi, pengurangan sampah, dan pelestarian lingkungan, maka bukan hanya emisi yang ditekan—tetapi juga tercipta ruang kerja yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan. Transformasi ini perlu dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan, baik oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta, untuk bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih hijau. Perubahan besar dimulai dari yang kecil. Sebagai insan Kementerian Keuangan, kontribusi mulia itu bisa dimulai dari kantor, yang nantinya terbawa ke aspek lainnya. Kita membawa titipan generasi mendatang. Semoga harapan baik generasi tetap ada walau kita sudah tinggal nama.





## [CHAPTER 4] PEMINDAHTANGANAN BMN

*Ditulis oleh Edy Gunawan dan Much Hari Cahyo*

Bbrrmmm brrrrmmmm tin tiin~

Suara deru mesin dan klakson terdengar dari dalam mobil, ketika Budi, Siti dan Andi dalam perjalanan keluar kota untuk menghadiri rapat pemindahtanganan BMN.

"Apa pendapat kalian tentang langkah-langkah yang perlu kita ambil?" tanya Budi dari kursi kiri baris kedua.

→ "Pemindahtanganan BMN sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan aset negara yang tidak lagi diperlukan. Kita harus memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku." jawab Siti.

Andi menyahut "Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa BMN yang akan dipindahtangankan telah dilakukan penilaian yang akurat untuk menentukan nilai aset tersebut."

"Kita juga harus memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan lengkap dan akurat. Dengan dokumen yang lengkap, kita bisa menghindari masalah hukum yang mungkin muncul di kemudian hari." tambah Budi.

"Jangan lupa, kita juga harus memastikan bahwa proses pemindahtanganan memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah dan masyarakat." Siti memperjelas.

→ "Dengan pemindahtanganan yang efektif, kita bisa mengoptimalkan penggunaan aset negara dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat." kata Andi yang sedang memandang langit luar dari belakang supir.

"Sosialisasi akan membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pemindahtanganan BMN. Dengan begitu, semua pihak akan bekerja sama untuk mendukung proses ini." kata Siti.

"Kita harus mempertimbangkan beberapa kegiatan pemindahtanganan BMN, seperti pemindahtanganan melalui hibah dan penjualan. Hibah BMN merupakan kontribusi untuk peningkatan kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, dan penyelenggaraan negara/daerah. Misalnya, hibah BMN dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintah Daerah oleh 6 Satker dan hibah BMN dalam rangka menunjang kegiatan sosial masyarakat." sahut Budi.

Siti menyambung "Betul, Hibah BMN bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemindahtanganan melalui penjualan. Penjualan BMN bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah."

→ "Setuju!" kata Andi "Dengan pemindahtanganan melalui penjualan, kita bisa mengoptimalkan nilai aset yang tidak lagi diperlukan dan mendapatkan pendapatan tambahan yang bisa digunakan untuk program-program pembangunan."

Langit di luar mulai gelap, dan hujan deras mengguyur kota dengan suara gemuruh yang menggema. Di dalam kantor, Budi, Siti, dan Andi baru saja menyelesaikan tugas mereka. Penilaian aset, penyusunan dokumen, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait telah dilakukan dengan baik. Hasilnya, BMN yang tidak lagi diperlukan dapat dipindahtangankan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah dan masyarakat.

Pagi itu, Budi, Siti, dan Andi baru saja tiba di gudang penyimpanan BMN. Udara masih segar, dan matahari baru saja terbit, memberikan cahaya hangat yang menyinari area sekitar gudang.

Budi membuka pintu gudang dan mengajak timnya masuk. *"Baiklah, teman-teman. Kita harus memastikan bahwa semua prosedur pemusnahan BMN berjalan dengan lancar hari ini,"* katanya dengan tegas.

Siti mengangguk sambil memeriksa daftar aset yang akan dimusnahkan. *"Kita perlu memeriksa dan memastikan bahwa semuanya sudah tercatat dengan benar sebelum dimusnahkan,"* tambahnya.

Mereka mulai berjalan di antara rak-rak penyimpanan, memeriksa setiap item yang akan dimusnahkan. Budi mencatat setiap detail, sementara Siti dan Andi memastikan bahwa semua dokumen sudah lengkap dan siap untuk proses pemusnahan.

*"Setelah kita selesai memeriksa, kita bisa mulai proses pemusnahan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,"* kata Budi sambil memeriksa daftar di tangannya.

Budi berhenti sejenak dan menekankan, *"Teman-teman, kita harus memastikan bahwa semua BMN yang akan dimusnahkan sudah tidak memiliki nilai guna dan tidak bisa diperbaiki lagi."*

Siti menimpali *"Oh iya, Kita harus memastikan bahwa semua barang yang dimusnahkan sudah tidak bisa digunakan lagi."*

Andi mengangguk *"Betul sekali, Siti. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa proses pemusnahan dilakukan dengan aman dan tidak merusak lingkungan."*

Namun, tiba-tiba terjadi konflik antara Budi dan Andi mengenai metode pemusnahan yang akan digunakan. *"Andi, aku pikir kita harus menggunakan metode pembakaran untuk memusnahkan barang-barang ini."* ujar Budi sambil menunjuk beberapa barang rusak.

Andi langsung menolak *"Aku tidak setuju, Budi. Pembakaran bisa merusak lingkungan. Kita harus mencari metode lain yang lebih ramah lingkungan."*

Suasana mulai memanas. Siti buru-buru angkat bicara, mencoba menenangkan keduanya. *"Teman-teman, mari kita tenang. Kita bisa mencari solusi yang terbaik bersama-sama. Bagaimana kalau kita mencari metode pemusnahan yang aman dan ramah lingkungan?"*

Budi dan Andi saling pandang, kemudian mengangguk setuju.

*"Baiklah,"* kata Budi. *"Yang bisa didaur ulang, kita serahkan ke pihak ketiga yang punya izin. Sisanya kita hancurkan dengan mesin penghancur."*



# OPTIMALISASI LAYANAN PERKANTORAN DALAM EFISIENSI ANGGARAN

Ditulis oleh Kus Purwaning Tiyas, Imam Teguh Pambudi, Indra Alfian  
Foto oleh Much Hari Cahyo



## INFO PENGADAAN

Melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, telah ditetapkan bahwa APBN Tahun 2025 terdiri atas Belanja Negara Tahun 2025 sebesar Rp3.621,3T dengan Target Pendapatan Negara tahun 2025 sebesar Rp3.005,1T dan Pembiayaan sebesar, Rp616,2T. Nilai Belanja Negara tahun 2025 yang meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024 terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun serta Transfer ke Daerah Rp919,9T.

Selayaknya pada tahun-tahun sebelumnya, pada periode bulan November – Desember 2024 beberapa Satker pada Kementerian/Lembaga telah



lebih dulu melakukan proses pengadaan pra-DIPA TA 2025 khususnya untuk pekerjaan yang bersifat operasional, rutin, dan harus berjalan sejak awal tahun anggaran. Pengadaan secara pra-DIPA dilakukan dengan harapan agar kontrak pekerjaan dapat ditetapkan sejak awal tahun sehingga tidak terdapat kekosongan kegiatan

operasional rutin yang bisa menyebabkan gangguan kegiatan perkantoran (misal : penyediaan tenaga kebersihan, operator/teknisi, lisensi perangkat lunak, dsb). Pada tanggal 22 Januari 2025, terbit Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.



Melalui peraturan tersebut, Presiden memberi instruksi kepada para pimpinan kementerian/lembaga serta kepala daerah untuk melakukan efisiensi atas belanja negara tahun 2025 sebesar 306 triliun yang terdiri atas efisiensi belanja KL sebesar 256 triliun dan efisiensi transfer ke Daerah sebesar 50 triliun. Instruksi tersebut ditanggapi dengan respon yang beragam oleh berbagai instansi di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Beberapa respon disambut positif namun ada juga respon yang ditanggapi negatif oleh masyarakat bahkan beberapa sampai membuat heboh publik.

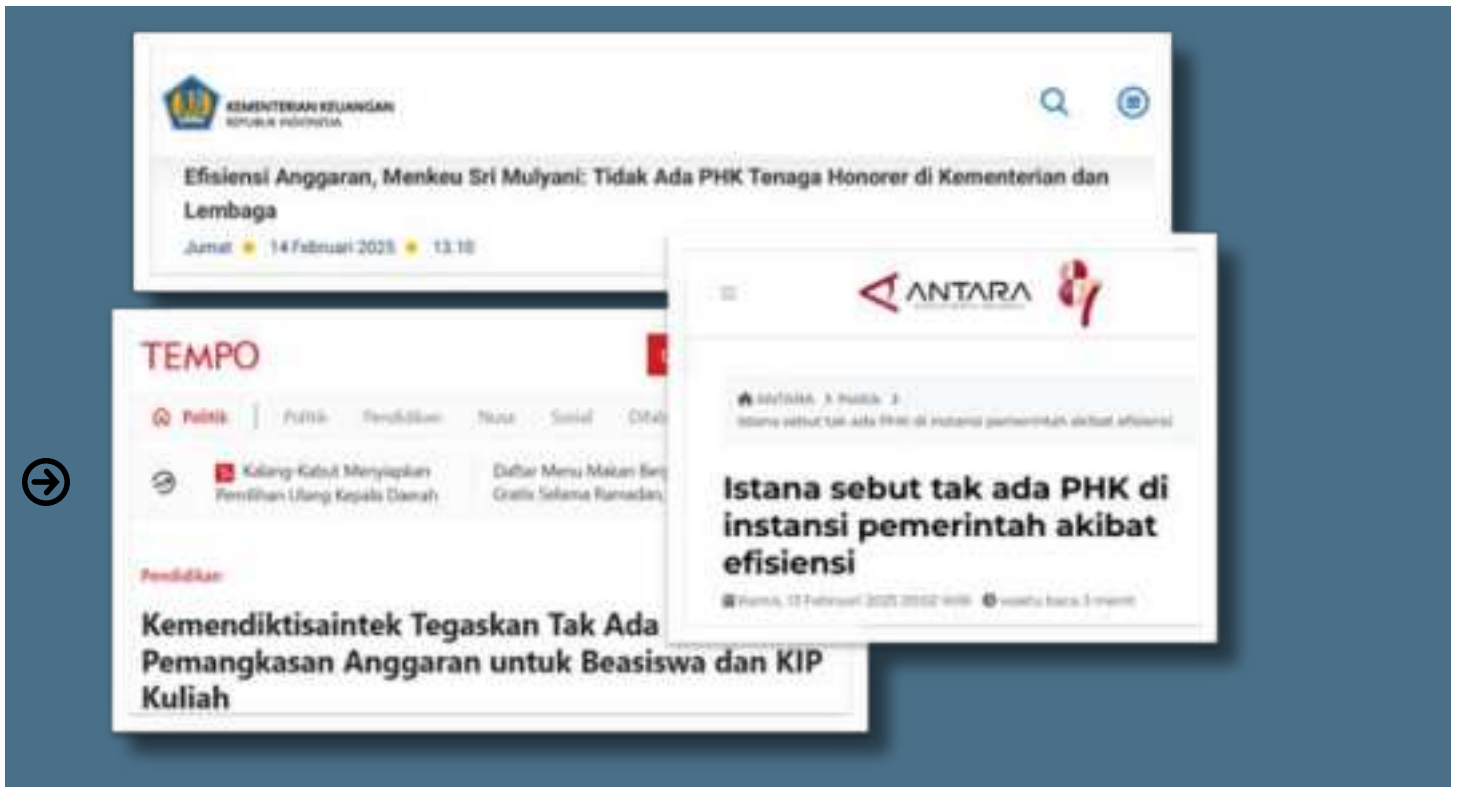
Sejatinya Instruksi efisiensi belanja dari presiden tersebut belum bersifat final sepanjang Anggaran Perubahan (APBN-P) belum ditetapkan. Artinya dalam proses identifikasi anggaran masih melalui tahap pembahasan antara pemerintah dengan unsur legislatif (DPR). Namun, ditengah proses pembahasan tersebut, isu negatif yang bergulir di masyarakat semakin berkembang dan makin disorot oleh berbagai pihak baik pengamat ekonomi, pelaku bisnis, maupun masyarakat. Beberapa isu yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat diantaranya adalah adanya resiko Pemutusan Tenaga Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah, Pemotongan belanja sosial, serta penurunan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Guna meminimalisir semakin liarnya opini publik, Presiden serta para pimpinan instansi terkait memberikan pernyataan bahwa efisiensi tersebut tidak akan mengakibatkan Pemutusan

Hubungan Kerja, belanja sosial, serta tidak akan mengurangi layanan kepada masyarakat.

Adanya pernyataan tersebut, tentunya merupakan kabar baik bagi masyarakat khususnya bagi para pekerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang berstatus non-ASN. Namun disisi lain, hal itu adalah tantangan bagi masing-masing Instansi dalam melakukan identifikasi anggaran agar target efisiensi tetap terpenuhi tanpa adanya PHK dan mengurangi kualitas layanan.

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku operasional rutin gedung kantor, kawasan kantor pusat, serta rumah jabatan pimpinan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan yang melibatkan tidak kurang dari 600 tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terlibat sudah tentu yang paling banyak dibanding lingkup kesekretariatan di unit eselon I lainnya mulai dari Layanan keamanan, operator/teknisi, jasa cleaning service dan gardener, serta hospitality. Nyatanya, Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum mampu menjawab tantangan memaksimalkan efisiensi tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja atau PHK tenaga kerja. Melalui penelidikan lebih dalam mengenai strategi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam melakukan efisiensi tanpa pengurangan tenaga kerja (PHK), diharapkan dapat memperkaya wawasan serta bahan pertimbangan bagi Unit kerja lain yang menghadapi tantangan serupa.



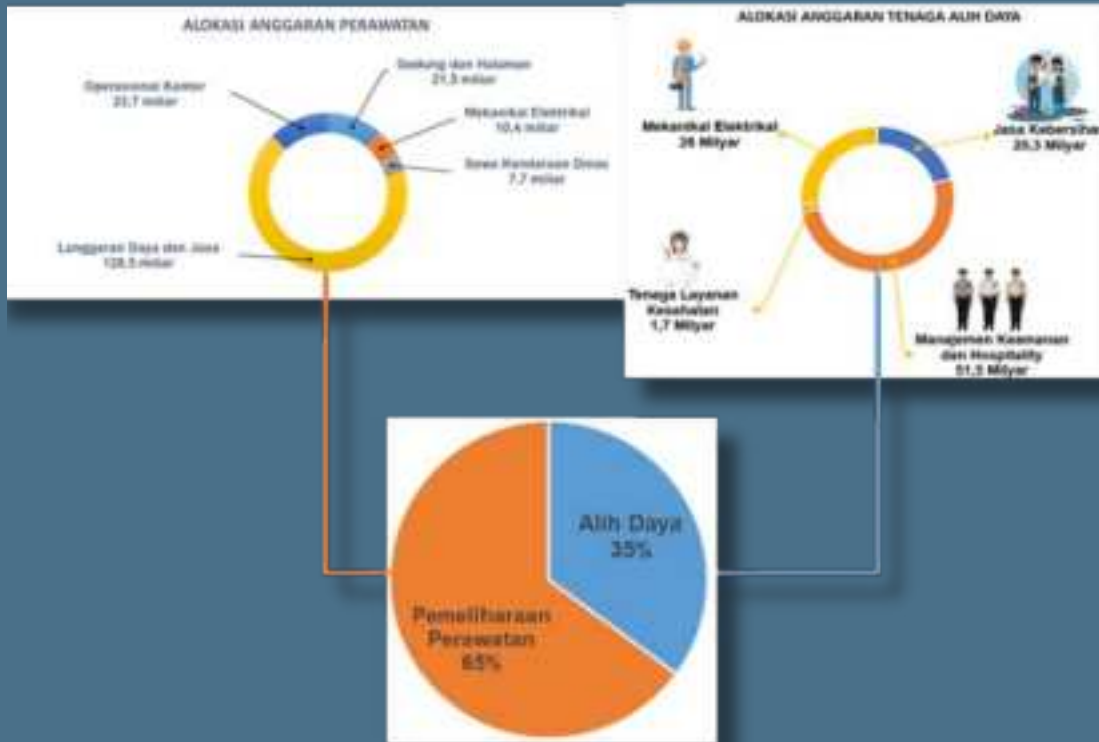


**Profil Anggaran dan Kegiatan Operasional Biro Umum**

Untuk Biro Umum telah mengalokasikan dana sebesar 295 triliun rupiah untuk memenuhi Layanan perkantoran. Anggaran tersebut meliputi biaya langganan daya dan jasa, belanja operasional, belanja pemeliharaan, belanja sewa, dan belanja keperluan perkantoran. Untuk kegiatan yang melibatkan tenaga kerja alih daya (outsourcing) dana yang disiapkan adalah sebesar ±104 miliar atau berkisar 35% dari total seluruh belanja layanan perkantoran yang dialokasikan untuk tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan hospitality, tenaga kesehatan, serta Teknisi mekanikal/elektrikal. Selebihnya, anggaran sebesar ±191,9 miliar atau berkisar

65% dari belanja layanan perkantoran dialokasikan untuk masing-masing pemeliharaan dan perawatan Gedung dan Halaman, Mekanikal elektrikal, kendaraan dinas, belanja sewa, operasional kantor, serta belanja langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, dll). Terbitnya inpres Nomor 1 Tahun 2025 mendorong Biro Umum untuk memangkas anggaran belanja operasional khususnya belanja birokrasi dan belanja modal. Melihat porsi alokasi anggaran pekerjaan alih daya dari total belanja layanan perkantoran yang signifikan, maka Biro Umum harus mengambil langkah strategis dalam menentukan anggaran-anggaran yang akan dikurangi/efisiensi tanpa mengurangi Tenaga Kerja Alih Daya.

Kode MAK	Belanja	Anggaran 2025 (Rp)
<b>5473.EBA.994</b>	<b>LAYANAN PERKANTORAN</b>	<b>295.947.603.000,-</b>
<b>2</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	
A	Keperluan Sehari hari Perkantoran	77.948.964.000,-
B	Langganan Daya dan Jasa	124.591.286.000,-
C	Pelaksanaan Operasional Kantor	23.771.584.000,-
D	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.997.673.000,-
F	Sewa Lainnya	7.729.620.000,-



**Prinsip Kehati-hatian Dalam Pelaksanaan Pemotongan Biaya Pekerjaan**

Melihat dari revisi DIPA ke-3, pemangkasan biaya layanan perkantoran diambil pada pos anggaran belanja langganan listrik, anggaran belanja obat-obatan dan bahan laboratorium, anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, anggaran belanja sewa kendaraan insidentil pimpinan. Total anggaran yang dihemat dari pos anggaran tersebut mencapai sebesar 125 milyar dengan komposisi sebagai berikut:

Sebagaimana terlihat pada tabel, efisiensi terhadap anggaran layanan perkantoran secara rata-rata sebesar 61%. Diantara anggaran yang terdampak efisiensi, terdapat anggaran alih daya Teknisi/Operator, yang anggaran tersebut menjadi perhatian karena beresiko terjadi pengurangan tenaga kerja. Adanya pemangkasan anggaran tersebut tetap tidak berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja karena efisiensi diambil dari komponen pekerjaan non-esensial. Hal itu seharusnya bisa menjadi preferensi untuk alokasi anggaran tenaga alih daya kebersihan, tenaga kesehatan, dan manajemen keamanan yang saat ini belum terdampak efisiensi anggaran.

Anggaran Belanja	Sebelum	Efisiensi	%	Sesudah
Langganan Listrik	124.591.286.000,-	80.324.324.000,-	64%	44.266.962.000,-
Obat dan Bahan Lab	1.699.003.000,-	1.699.003.000,-	100%	-
sultan Pemeliharaan Ged	600.000.000,-	366.000.000,-	61%	234.000.000,-
Pemeliharaan Gedung	19.233.217.000,-	15.095.412.000,-	78%	4.137.805.000,-
eliharaan Mekanikal Elek	10.412.400.000,-	6.203.425.000,-	65%	4.208.975.000,-
sewa Kendaraan Insident	795.000.000,-	795.000.000,-	100%	-
alih Daya Teknisi/Operat	26.020.000.000,-	7.400.000.000,-	28%	18.620.000.000,-
TOTAL	183.350.906.000,-	111.883.164.000,-	61%	

Sumber : Revisi DIPA ke-3 Biro Umum Tahun Anggaran 2025

Selain anggaran alih daya, efisiensi juga terjadi pada anggaran langganan listrik serta pemeliharaan peralatan dan mesin yang mana kedua hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan perkantoran. ketiadaan listrik serta dukungan peralatan dan mesin (lift, perangkat elektrik kantor) tentu akan sangat menghambat kegiatan perkantoran. oleh karenanya, efisiensi anggaran terhadap kedua komponen ini perlu langkah-langkah tindak lanjut serta mendapat perhatian serius baik dari Biro Umum selaku pengelola maupun dari seluruh stakeholder gedung agar anggaran yang tersisa dapat mencukupi layanan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.



### **Paket Kebijakan Layanan Kantor Pasca Efisiensi Anggaran**

Sebagai tindak lanjut atas efisiensi anggaran, Biro Umum mau tidak mau harus mengeluarkan paket kebijakan layanan kantor sebagai bagian dari solusi kecukupan anggaran. kebijakan tersebut meliputi penghematan dan efisiensi energi, air, dan management tenaga alih daya. untungnya, hal ini bukan merupakan barang baru bagi para stakeholder di lingkungan kantor pusat kementerian keuangan. kebijakan-kebijakan itu telah tersosialisasi sebelumnya melalui gerakan eco-office, sehingga saat ini yang dibutuhkan hanya penegasan serta penguatan kesadaran dari seluruh stakeholder. apa saja kebijakan-kebijakan yang dimaksud ? berikut kami paparkan berdasarkan hasil wawancara dari pemangku kebijakan (Biro Umum c.q. Bagian Rumah Tangga).




- *Pembatasan Operasional Lift.* Pemeliharaan lift tahun 2025 semula dianggarkan sebesar 1,69 miliar, saat ini anggaran yang ada sebesar 200jt artinya penghematan atas kegiatan ini adalah sebesar 1,46 milyar (93% dari anggaran semula). mengingat anggaran saat ini sangat minim, operasional lift gedung dibatasi. 3 dari 5 lift akan berhenti beroperasi diluar jam sibuk antara jam 10 - 12 dan antara jam 2 - 3. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menghemat penggunaan daya listrik serta mengurangi kemungkinan sparepart yang haus sehingga memperpanjang umur ekonomis lift.
- *Pembatasan Operasional Air Conditioner Gedung.* Salah satu penggunaan daya listrik



yang cukup besar pada sebuah gedung salah satu diantaranya adalah Air Conditioner (AC). Gedung-Gedung di lingkungan Kantor Pusat sudah semuanya menggunakan sistem AC Central. maka dengan membatasi operasional AC Central diharapkan dapat secara signifikan menekan biaya langganan listrik gedung. pembatasan tersebut berupa pengaturan jam operasional AC central hanya pada pukul 6 - 17 WIB serta mengatur suhu ruangan pada 24 Celcius. pengoperasian AC untuk keperluan lembur dilakukan secara selektif dan hanya untuk keperluan mendesak.

- *Memaksimalkan Cahaya Matahari untuk Penerangan Ruangan.* Sejalan dengan seruan eco-office, kebijakan ini ditegaskan kembali dalam rangka penghematan anggaran. melalui himbauan secara lisan kesetiap pengguna gedung, diharapkan agar selama beraktivitas hanya menggunakan sebgaiian lampu ruang, dan membuka gorden curtain gedung agar memaksimalkan pencahayaan alami sebagai penerangan ruangan. selain itu, jam operasional lampu taman/area luar gedung dibatasi mulai pukul 18.00 - 06.00 WIB.
- *Optimalisasi Pemanfaatan ABW.* Pada kesehariannya, unit-unit kerja senantiasa membutuhkan ruangan untuk mendukung kegiatan perkantoran rutin maupun lembur. namun seringkali jumlah individu dengan luasan ruangan tidak sepadan. umpamanya, terdapat 3 pegawai yang bekerja/lembur di ruangan kerja untuk kapasitas 20 orang. tentu daya listrik yang terpakai minimum untuk mencukupi 20 orang hanya untuk memfasilitasi 3 orang yang bekerja. oleh karenanya himbauan untuk memanfaatkan ABW digaungkan kembali agar unit-unit kerja yang memiliki kondisi serupa dapat memampatkan occupancy ruang ABW.
- *Pembatasan BBM Kendaraan Dinas.* Selain penghematan layanan perkantoran dilingkungan gedung kantor, hal lain yang terdampak dari efisiensi anggaran adalah layanan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas. Mempertimbangkan bahwa pemeliharaan rutin kendaraan adalah hal yang prioritas karena jika kendaraan rusak akan memakan lebih banyak anggaran, maka penghematan dilakukan dengan menekan biaya BBM kendaraan serta memaksimalkan occupancy kendaraan dinas yang beroperasi.



Unit-unit kerja diminta untuk mempertimbangkan urgensi penggunaan kendaraan dinas baik dari sisi intensitas, jarak, serta jumlah penumpang. selain itu, diharapkan juga mengurangi segmentasi penggunaan kendaraan dinas berdasarkan unit kerja untuk memaksimalkan jumlah penumpang.

- Sosialisasi Penghematan Kepada Pengguna Gedung. Biro Umum menyadari bahwa penghematan, pembatasan, serta himbauan energi akan berdampak pada berkurangnya kenyamanan dan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan seluruh stakeholder gedung. sebagai pengelola dan pemangku kebijakan layanan perkantoran, Biro Umum memiliki keterbatasan pada jangkauan pengawasan, identifikasi kebutuhan, serta prioritas pemanfaatan ruangan. untuk itu adanya kesadaran serta integritas seluruh stakeholder dibutuhkan untuk menjawab keterbatasan tersebut.

Melalui himbauan rutin, Biro Umum senantiasa mengingatkan serta mengajak seluruh stakeholder untuk senantiasa menerapkan serta mendukung kebijakan penghematan layanan kantor. melalui sosialisasi terus menerus, diharapkan perilaku menjadi sebuah kebiasaan yang positif tidak hanya di kantor namun juga di keseharian individu. dengan demikian, layanan perkantoran serta penggunaan daya kedepannya dapat efisien tanpa adanya seruan efisiensi anggaran.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

## DAMPAK INPRES NO 1 TAHUN 2025 TERHADAP PENGADAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditulis oleh Kus Purwaning Tiyas & Yelly Metasari  
Foto oleh Much Hari Cahyo

Sejak ditetapkan nya Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah anggaran 2025, diinstruksikan adanya efisiensi lebih kurang sebesar 200 triliun. Prioritas efisiensi atau pemotongan anggaran adalah kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan, dan infrastruktur. Pemerintah menerbitkan inpres yang ditandatangani pada 22 Januari 2024 ini, sebagai bentuk konkret dalam memastikan pemotongan anggaran untuk efisiensi belanja APBN dan APBD.

Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat stabilitas fiskal dan daya saing ekonomi Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini ditujukan kepada seluruh Menteri Kabinet, Panglima TNI, Kaporlri, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia. Hampir semua Kementerian dan Lembaga terkena efisiensi anggaran. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Nilai efisiensi adalah belanja barang dan belanja modal adalah efisiensi 8,9 Triliun.

Efisiensi ini mengakibatkan sektor pengadaan barang/jasa juga terkena imbasnya, banyak proyek konstruksi yang tidak dilaksanakan. Proyek di pusat maupun daerah terkena dampaknya. Terhambatnya Pembangunan infrastruktur penting seperti fasilitas pendidikan, Kesehatan, sistem irigasi, jalan raya, jalan tol, layanan transportasi. Efisiensi anggaran ini mengakibatkan terjadinya penyesuaian rencana umum pengadaan (RUP), pembatalan pelaksanaan tanda tangan kontrak, menurunnya volume pekerjaan konstruksi dan semakin ketatnya persaingan dalam tender proyek.

Proyek strategis menjadi sorotan, terutama untuk proyek yang sudah tanda tangan kontrak, sudah berjalan, dan dipastikan agar proyek tidak mangkrak. Hal ini penting, karena bila berhenti, maka pertumbuhan ekonomi akan sangat berpengaruh. Efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah berdampak pada seluruh aspek. Salah satu aspeknya adalah sektor Pembangunan, khususnya bidang konstruksi. Proyek pengadaan barang jasa terkait konstruksi di Kementerian keuangan terkena imbas efisiensi.



Anggaran:

1. Anggaran PBJ sebelum efisiensi sebesar Rp11.263.112.046.000
2. Anggaran PBJ setelah efisiensi sebesar Rp5.606.590.565.000

Paket Pengadaan:

- Paket PBJ sebelum efisiensi 691 paket
- Paket PBJ setelah efisiensi 173 paket

Sejak dikeluarkan nya Inpres No 1 Tahun 2025, terdapat beberapa paket pengadaan yang tidak jadi di proses tender nya, antara lain :

Beberapa Paket Pengadaan yang tidak jadi di proses tender pada tahun 2025		
Satuan Kerja	Pekerjaan	Pagu
BDK MEDAN	Rumah Negara Tipe C Permanen	1.083.988.000,00
BDK PEKANBARU	Biaya Konstruksi Fisik	4.508.400.000,00
BPPK	Renovasi Interior Gedung Kantor	2.890.198.000,00
BPPK	Renovasi Interior Asrama C/Barak - Konstruksi Fisik - BC	1.210.292.000,00
BPPK	Renovasi Selasar Kantor - Konstruksi Fisik - BC	767.000.000,00
KPTIK BMN MEDAN	MDN Biaya Konstruksi Fisik	1.335.040.000,00
KANTOR PUSAT DJKN	Pekerjaan Konstruksi Rumah Negara (Mess DJKN)	10.553.993.000,00
KANTOR PUSAT DJKN	Pekerjaan Konstruksi (Wisma Coolibah)	3.088.111.000,00
KANWIL DJPB PROVINSI NTT	Revitalisasi Kompleks Rumah Negara Jl. R. Soeprato, 1 Unit Gol II Type B dan Revitalisasi Gedung Menjadi Mess	5.580.296.000,00
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Biaya Konstruksi	755.000.000,00
KANWIL DJPB PROVINSI MALUKU	Pekerjaan sarana/Prasarana lingkungan Komplek Rumah Negara Galala/Hative Kecil	3.895.748.000,00
KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pekerjaan konstruksi rehabilitasi Rumah Negara	522.288.000,00
KPKNL MAKASSAR	Pekerjaan Konstruksi	1.034.460.000,00
KPKNL MANADO	Pekerjaan Konstruksi	1.036.735.000,00
KPPN TANJUNG	Biaya Konstruksi Fisik - Renovasi Gedung Kantor Area Middle Office dan Penataan Layout	1.276.145.000,00
KPPN NABIRE	Biaya Konstruksi Fisik	6.665.309.000,00

Sumber: Data Paket Tender 2025 Kementerian Keuangan

Bagaimana paket pengadaan yang sudah terlanjur di eksekusi? Ada sekitar 2,7 T yang sudah berkontrak dan tetap berjalan. Pertanyaan pentingnya lainnya adalah, bagaimana pemerintah menjaga agar proyek pengadaan dapat terus tumbuh dan berkontribusi dalam Pembangunan nasional, lalu bagaimana dampak terbitnya Inpres No 1 Tahun 2024 terhadap dunia pengadaan konstruksi di Indonesia khususnya di Kementerian Keuangan.



➔ Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan belanja negara dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Inpres ini mengatur tentang pembatasan belanja non-prioritas yang tidak memiliki hasil yang terukur. Dengan adanya pembatasan anggaran ini, kita dituntut untuk tetap dapat mencapai kinerja yang optimal dan berkualitas. Dalam situasi anggaran yang terbatas, kreativitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas menjadi keharusan.

➔ Kualitas kinerja bukan hanya ditentukan oleh jumlah anggaran yang tersedia, tetapi oleh bagaimana kita memaksimalkan sumber daya yang ada, bekerja dengan lebih cerdas, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita ambil tetap memberikan hasil yang optimal meski dengan sumber daya yang terbatas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun dengan anggaran yang terbatas. Kerja sama yang solid dari seluruh pegawai tentunya sangat mendukung program efisiensi ini.

➔ Tujuan dari Efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah saat ini untuk Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, Mendukung pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat, Memastikan dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan Memfasilitasi lahirnya inovasi pelayanan.

Efisiensi anggaran dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa. Efisiensi anggaran juga dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan hasil.

Efisiensi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa :

1. Mengurangi pemborosan anggaran, seperti pengeluaran yang tidak sesuai prioritas, duplikasi program, atau inefisiensi dalam pengadaan barang dan jasa
2. Meningkatkan efektivitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa
3. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal
4. Meningkatkan kualitas layanan
5. Memastikan proses pengadaan barang dan jasa tetap berjalan optimal

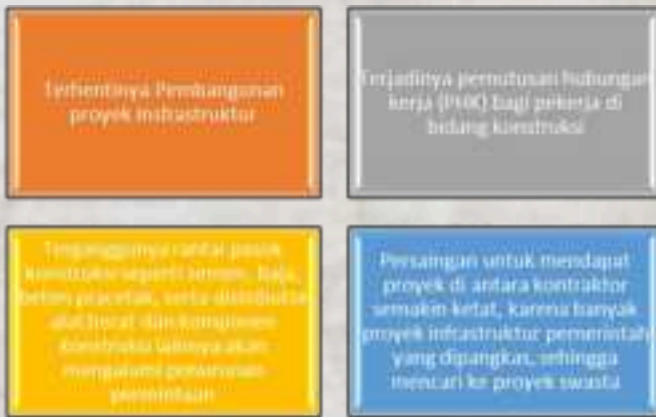
Manfaat efisiensi anggaran terletak pada kemampuan untuk mengelola dana secara tepat, memanfaatkan sumber daya dengan seefisien mungkin, serta mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Selain itu, efisiensi anggaran juga berkontribusi pada dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.

Cara meningkatkan efisiensi anggaran:

1. Penganggaran berbasis kinerja
2. Pengawasan yang ketat
3. Penggunaan teknologi digital
4. Fokus pada prioritas utama
5. Inovasi
6. Evaluasi yang rutin

Sektor pengadaan barang dan jasa, khususnya di bidang konstruksi, merasakan dampak yang signifikan akibat penerapan efisiensi anggaran ini. Banyak proyek konstruksi yang terpaksa tidak dapat dilaksanakan. Efisiensi anggaran tahun 2025 di sektor ini terjadi setelah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memangkas anggarannya sebesar Rp81,38 triliun, yang berkurang dari pagu awal anggaran 2025 yang semula bernilai Rp110,95 triliun.

Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut :



Beberapa proyek pengadaan konstruksi yang terkena dampak efisiensi anggaran di sektor konstruksi di Indonesia:

1. Proyek infrastruktur di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan prasarana strategis tertunda
2. Proyek konektivitas, sumber daya air, dan pengembangan kawasan permukiman tertunda
3. Proyek tol yang terkena dampak efisiensi anggaran di antaranya Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Tol Becakayu) dan Tol Puncak 2

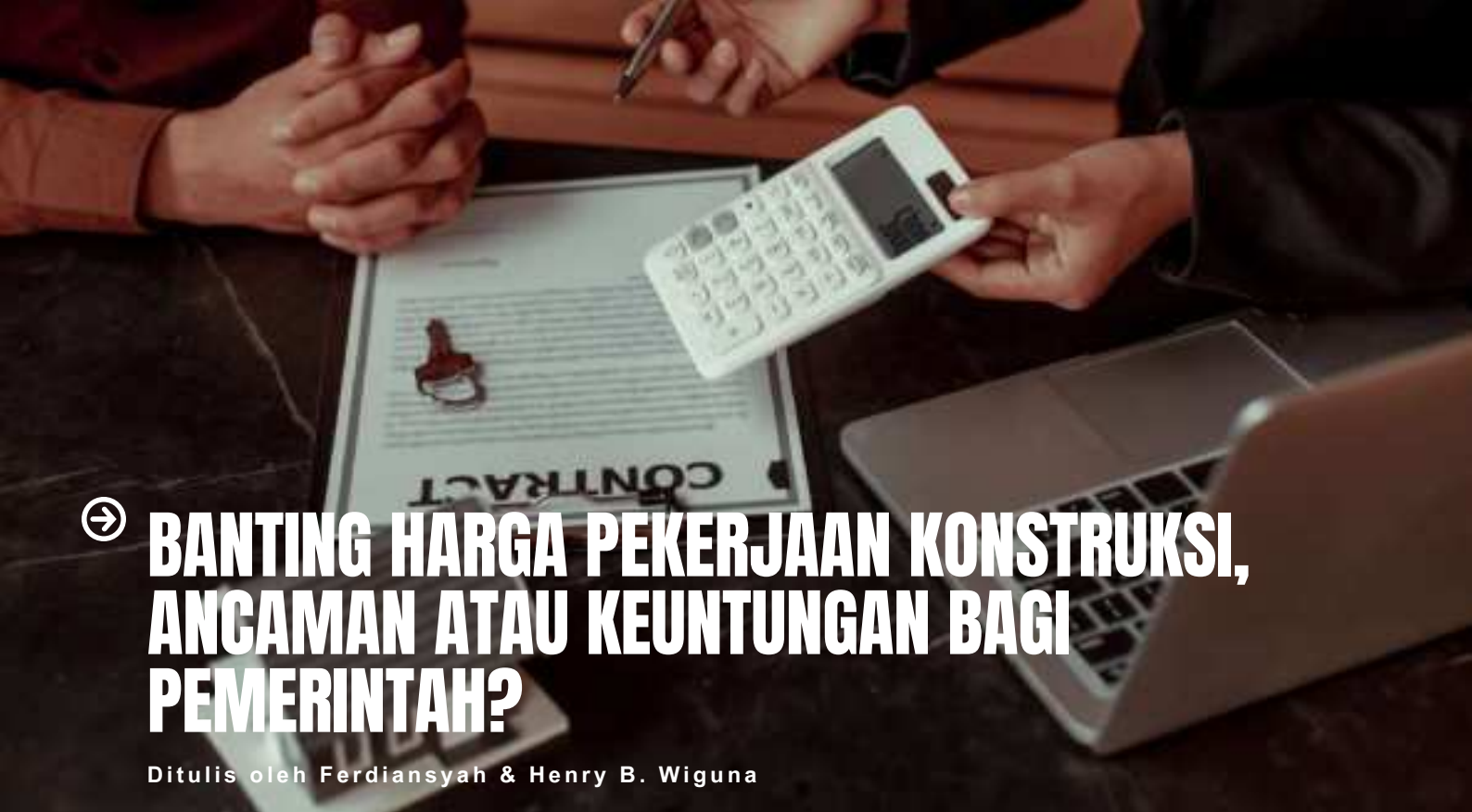
Meskipun demikian, pemerintah menjamin bahwa program-program tersebut akan tetap dilanjutkan, terutama bagi proyek yang telah berjalan. Langkah efisiensi anggaran ini dianggap krusial untuk menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Sektor konstruksi memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, menyerap banyak tenaga kerja, baik dalam proyek yang didanai oleh pemerintah maupun swasta.

Efisiensi anggaran merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara. Penyesuaian anggaran tahun 2025 ini memang suatu urgensi yang harus dilakukan pemerintah. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar, meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas, dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Untuk mengatasi dampak negatif dari efisiensi anggaran ini, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mencari solusi yang lebih seimbang. Salah satu cara adalah melalui percepatan kemitraan publik-swasta (PPP) dalam proyek infrastruktur, sehingga proyek yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan meskipun dengan skema pendanaan yang berbeda. Selain itu, diversifikasi proyek ke sektor properti dan industri dapat menjadi peluang bagi kontraktor dan pemasok untuk bertahan di tengah kondisi yang sulit.

Jika tidak diantisipasi dengan baik, pemangkasan anggaran infrastruktur dapat menjadi pukulan berat bagi industri konstruksi dan rantai pasoknya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi yang lebih inklusif agar pengurangan anggaran ini tidak berakhir pada kontraksi yang lebih dalam dalam sektor konstruksi. Keberlanjutan sektor ini sangat penting, tidak hanya untuk pembangunan nasional, tetapi juga bagi stabilitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berlakunya Inpres No 1 Tahun 2025 memberikan dampak bagi dunia konstruksi di Indonesia, seperti berkurangnya proyek konstruksi, terjadi pemutusan hubungan kerja di sektor konstruksi, Terganggunya rantai pasok jual beli bahan dan alat konstruksi, dan perebutan proyek dikalangan kontraktor. Pemerintah memprioritaskan pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Selain itu, diperlukan regulasi dari pemerintah untuk mempercepat skema pembiayaan kreatif yang melibatkan pihak swasta, sehingga proyek-proyek infrastruktur tetap dapat berjalan meskipun dengan anggaran yang terbatas.



# ➔ BANTING HARGA PEKERJAAN KONSTRUKSI, ANCAMAN ATAU KEUNTUNGAN BAGI PEMERINTAH?

Ditulis oleh Ferdiansyah & Henry B. Wiguna



**S**astrawan dan Budayawan Ahmad Tohari dalam salah satu novelnya “Orang-Orang Proyek” mengangkat cerita tentang dinamika salah satu pekerjaan konstruksi Pemerintahan di Era Orde Baru. Dikisahkan seorang - Insinyur muda bernama Kabul sebagai pekerja mandor berwatak jujur dan penuh dedikasi dihadapkan dengan “permainan proyek” dampak dari kecurangan yang dilakukan atasannya untuk mendapatkan pekerjaan konstruksi dari Pemerintah Daerah setempat. Kabul sang mantan aktivis kampus dipaksa untuk memanipulasi kualitas dan kuantitas material yang digunakan untuk keperluan pembangunan Jembatan Sungai Cibawor hingga pada akhirnya mempertaruhkan mutu bangunan.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kemajuan teknologi, Pemerintah terus menyempurnakan proses tender Pengadaan Barang dan Jasa menjadi lebih efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil; akuntabel dan terdokumentasi dalam sistem informasi yang handal. Perbaikan-perbaikan ini tentu bertujuan agar menghasilkan pemenang-pemenang tender konstruksi yang berkualitas, sehingga tidak ada lagi insinyur – insinyur pelaksana konstruksi yang dihadapkan dengan permainan pelik perusahaan-perusahaan konstruksi culas, seperti dialami Kabul.

Namun demikian, fenomena yang terjadi di lapangan dewasa ini mengindikasikan adanya trend motif moral hazard baru dari Badan Usaha Konstruksi yang secara data dan regulasi dapat diterima namun berdampak buruk pada kualitas hasil pekerjaan yaitu permainan harga tidak wajar atau banting harga. Kompetisi yang semakin ketat dan kemudahan persyaratan kualifikasi dan teknis diduga menjadi faktor pemicu para kontraktor membanting harga penawaran terlampau murah atau dibawah kewajaran. Bagaimana faktor pemicu tersebut terjadi? Apa saja risikonya? Apa yang harus diperhatikan pemilik pekerjaan dalam mengelola pekerjaan konstruksi dengan harga kontrak tidak wajar, tanpa mempertaruhkan biaya, mutu dan waktu penyelesaian pekerjaan?



Gambar: Salah Satu Pekerjaan Renovasi 26 Rumah Dinas Kantor Wilayah DJP Bali Tahun Anggaran 2024



Seberapa besar risiko kegagalan proyek tersebut? Berikut beberapa hasil analisis yang penulis kumpulkan berdasarkan data olahan, studi literatur peraturan dan wawancara mendalam kepada Pelaku Usaha Konstruksi, Konsultan Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen.

### Kompetisi Ketat dan Kemudahan Persyaratan

Sebagai gambaran atas kondisi pengadaan konstruksi, berikut ini data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana Tabel 1. *Pengadaan Konstruksi, 2022-2025.*

Tahun Anggaran	Nilai Anggaran (Triliun Rupiah)	Keterangan
2022	1,032	Nilai anggaran untuk pekerjaan konstruksi.
2023	1,299	Naik 25,8% dari tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP.
2024	4,235	Anggaran dengan tematik infrastruktur (Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2024).
2025	4,003	Anggaran sesuai dengan agenda Prioritas Pembangunan (Konferensi Pers RAPBN 2025).

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Konferensi Pers APBN

Catatan:

- Anggaran ini mencakup pekerjaan konstruksi seperti gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui tender elektronik menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- Prosedur pengadaan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Besarnya nilai anggaran tersebut ditambah adanya kepastian pembayaran dari Pemerintah yang dijamin oleh Undang-Undang tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Badan Usaha untuk terlibat dalam Proyek Konstruksi Pemerintah dibandingkan dengan dari swasta yang sangat fleksibel dan sistem tender yang tidak terstandardisasi. Untuk menjadi peserta tender, Badan Usaha Konstruksi cukup mendaftar pada satu website SPSE Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (KLPD) dan dapat mengikuti tender di seluruh SPSE KLPD lain secara nasional tanpa melakukan registrasi dan verifikasi ulang. Sebagai gambaran seberapa kompetitif pemilihan penyedia konstruksi, Penulis mengambil sampel di salah satu Kementerian dengan Pagu Anggaran Besar yaitu, Kementerian Keuangan.

Merujuk data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Keuangan pada Tahun 2024, kesimpulan awal menunjukkan kondisi berikut ini. Selain nilai yang besar dan sistem pendaftaran yang inklusif, faktor pemicu lain yang membuat ketatnya kompetisi adalah regulasi dalam penyusunan persyaratan pemilihan penyedia yang semakin sederhana Tabel 2. *Perbandingan Pengadaan Konstruksi 2023 dan 2024.*

Tahun	Paket Pekerjaan Konstruksi	% Kenaikan	Nilai Pagu (Triliun Rupiah)	% Kenaikan	Badan Usaha Izin Konstruksi	Perbandingan Jumlah Peserta dan Paket
2023	190	-	4,788	-	-	-
2024	261	373%	142	19,591%	18.231	1:70

Sumber: RUP Kementerian Keuangan 2024 dan SIKap LKPP, diolah.

Sejak diberlakukannya Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pemerintah telah memberikan relaksasi kepada Pelaku Usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15 Miliar diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi dan penghapusan persyaratan kualifikasi keuangan bagi penyedia Nonkecil. Selanjutnya diatur bahwa Persyaratan Kualifikasi Penyedia meliputi persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan Kualifikasi Teknis, sehingga persyaratan kualifikasi penyedia terkait kemampuan keuangan tidak diperkenankan untuk ditambahkan.

Pokja Pemilihan juga dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar tidak menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha guna mewujudkan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif.

Secara sederhana untuk tender pekerjaan konstruksi dengan proses pascakualifikasi dan metode evaluasi Harga Terendah, selain dokumen kualifikasi usaha seperti Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, Sertifikat Badan Usaha (SBU), NPWP dan Bukti Pengalaman Pekerjaan Terakhir, Dokumen teknis yang perlu disiapkan peserta di tender pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil hanya tiga yaitu Bukti Kepemilikan Peralatan Utama, Daftar Personel Manajerial dan terakhir Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi. Selanjutnya, Penawar harga terendahlah yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan untuk kemudian berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

### **Risiko dari Nilai Kontrak yang Tidak Wajar**

Ketatnya persaingan dan kemudahan persyaratan ini tentu berdampak pada perilaku peserta dalam menentukan strategi untuk memenangkan tender, salah satunya adalah dengan menawar serendah mungkin atau senilai 80% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun PPK. HPS Pekerjaan Konstruksi disusun oleh Konsultan Perencana Konstruksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan HPS juga telah memperhitungkan besaran margin keuntungan dan overhead yang biasanya di kisaran yakni 10%-15% dan menimbang hasil survey harga material di lokasi pekerjaan beserta standar upah sebagaimana diatur Pemerintah Daerah setempat.

Namun demikian, fakta yang terjadi saat ini, banyak Badan Usaha rela menawar dengan harga tidak wajar demi memenangkan tender (Tabel 3). Bahkan banyak diantara penawar tersebut berbeda jauh domisili dengan lokasi pekerjaan.

Tabel 3. Badan Usaha yang Relat Menawar dengan Harga Tidak Wajar

Tahun	Persentase Paket dengan Harga Tidak Wajar ( $\leq 80\%$ HPS)
2022	33.33%
2023	51.56%
2024	64.44%

Sumber: Data Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi di Kemenkeu, diolah.

Menurut Deni Ragil Setiawan, Konsultan Konstruksi dari PT Kalayman Arsitek, fenomena banyaknya penawaran harga yang terlampau rendah muncul di saat pasca pandemi COVID-19. Penyebabnya adalah sulitnya mencari pekerjaan, para kontraktor ini berlomba-lomba membanting harga demi mencari proyek (Tabel 4). Masalah tersebut diperburuk oleh kurangnya kesamaan visi dan kemampuan manajerial yang buruk.



Tabel 4. Penyebabnya Kontraktor Membanting Harga Demi Mencari Proyek

Pernyataan	Penjelasan
Banyak kontraktor menembak harga penawaran langsung di 80% HPS atau lebih rendah	Kontraktor sering menawar harga sangat rendah tanpa mempelajari dokumen pemilihan secara seksama.
Dokumen yang sering tidak dipelajari: Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Spesifikasi Material (RKS)	Dokumen penting yang sering diabaikan oleh kontraktor saat menawar harga.
Dampak jika kontraktor seperti ini menang tender	Terjadi misleading dalam pelaksanaan pekerjaan, mengancam penyelesaian proyek, dan tujuan pekerjaan tidak tercapai.
Penyebab tambahan masalah	Tidak ada kesamaan visi dan kemampuan manajerial yang buruk.

Sumber: Penulis 2024

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa PPK, banyak diantaranya yang merasa khawatir bila mendapatkan penyedia jasa konstruksi dengan penawaran kurang dari atau sama dengan 80% HPS, terlebih bila penyediannya berasal dari luar wilayah domisili pekerjaan. Kekhawatiran yang terjadi antara lain adalah pekerjaan yang dijual, penyelesaian yang lambat dan terseok-seok sampai dengan pekerjaan yang ditinggal kabur hingga mangkrak. Hal ini selain merugikan Negara juga berdampak pada kinerja PPK dan Organisasi. Walaupun demikian, kekhawatiran tersebut tentu tidak dapat digeneralisir, karena trend penawaran harga tidak wajar yang terus meningkat, tentu ada beberapa kasus pekerjaan konstruksi dengan harga terindikasi tidak wajar yang dapat selesai dengan memuaskan. Lantas, apa yang harus diperhatikan PPK dalam mengelola pekerjaan konstruksi dengan kondisi tersebut.

**Mengapa Pekerjaan Tetap Dapat Selesai Sesuai Target, Meski Harga Terindikasi Tidak Wajar?**

Menanggapi pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan, LKPP sebagai perwakilan Pemerintah yang bertugas untuk mengembangkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, telah menerbitkan SE Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk menyamakan persepsi antara Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dan menghindari penolakan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena ditemukannya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan evaluasi kewajaran harga sekaligus untuk menjaga kualitas pekerjaan dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Proses Evaluasi Kewajaran Harga (EKH) inilah yang menjadi gerbang terakhir Penyedia dengan harga penawaran terindikasi tidak wajar sebelum ditetapkan sebagai pemenang. Proses EKH dilakukan Pokja Pemilihan dengan mengklarifikasi penawaran harga apakah Badan Usaha masih dapat membiayai biaya overhead dan profit minimal dalam suatu proyek dengan mengklarifikasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Besaran harga satuan dasar Upah, Material, dan Peralatan beserta bukti-bukti pendukungnya. Penyedia yang total harga hasil klarifikasinya lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran penyedia dinyatakan gugur. Sedangkan yang total harga hasil klarifikasinya lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan dinyatakan lulus untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dari mana sumber keuntungan tersebut, sedangkan porsi margin, overhead dan sisanya dengan total 20% sudah dipangkas habis karena banting harga?



Selanjutnya, penulis mengambil sampel pada salah satu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Keuangan (Tabel 5).

Tabel 5. Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Renovasi 26 Rumah Dinas Kantor Wilayah DJP Bali Tahun Anggaran 2024

Nama Pekerjaan	Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Renovasi 26 Rumah Dinas Kantor Wilayah DJP Bali Tahun Anggaran 2024
Tanggal Pengumuman	8 Maret 2024
→ Nilai HPS Pekerjaan	Rp3,50 Miliar
Jumlah Penawar	24 Penawar
Penawar di Bawah 80%	11 Peserta
Penawar di 80%	9 Peserta
Penawar di Atas 80%	4 Peserta
Pemenang	CV Tangkas Karya Sejati (Bali) dengan nilai penawaran 74,33%
Hasil Pekerjaan	Memuaskan pengguna jasa dan selesai tepat waktu
→ Strategi Manajemen Pelaksanaan Kontrak	1. Metode Kerja, 2. Manajemen Tenaga Kerja dan Material, 3. Kemampuan Permodalan

Sumber: Penulis 2024

Untuk mengetahui bagaimana Strategi Manajemen Pelaksanaan Kontrak dengan harga terindikasi tidak wajar, berikut ini penjelasan I Putu Widyarsana, salah satu Pengurus dari CV Tangkas Karya Sejati.

### 1. Metode Kerja

Metode kerja yang efektif dan efisien disusun dengan memahami Dokumen Pemilihan secara komprehensif. Dari dokumen pemilihan inilah nantinya diketahui material dan peralatan apa saja yang dibutuhkan, berapa tenaga kerja yang diperlukan, bagaimana medan pekerjaan dan biaya-biaya non teknis di luar RAB seperti logistik, kebutuhan listrik dan air, penginapan, mobilisasi material, keamanan, bongkar muat, biaya sosial dan lain-lain. Biaya Non teknis apabila tidak dikoordinasikan dengan baik kemungkinan besar akan semakin menggerus margin kontraktor, sehingga kontraktor harus cermat dilapangan untuk mengkoordinasikannya.

Semakin besar nilai proyek akan semakin besar biaya non teknis yang dibutuhkan.

Metode kerja ini juga tidak terlepas dari penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). Penyusunan AHSP pekerjaan konstruksi secara detail diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun demikian, banyak diantara kontraktor, umumnya yang telah memiliki jam terbang tinggi akan menyesuaikan koefisien dan komponen dari beberapa pekerjaan dengan justifikasi analisis produktivitas yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menekan harga. Penyesuaian tersebut merupakan hal-hal yang harus sudah diantisipasi oleh Pokja Pemilihan dan diklarifikasi ulang oleh PPK. Apabila tidak ada justifikasi teknis dan kapasitas yang handal, AHSP dapat ditolak dan berdampak pada hasil klarifikasi kewajaran harga.

## 2. Manajemen Tenaga Kerja dan Material

Menurut Ahli Muda Keselamatan Kerja Konstruksi kelahiran Denpasar, 8 September 1986 ini, unsur lainnya yang dapat menekan biaya penawaran dan mencegah kebocoran dana pelaksanaan konstruksi adalah manajemen tenaga kerja yang efektif dan kondusif. Strategi yang dapat digunakan antara lain; Penggunaan jumlah tenaga kerja yang memperhitungkan beban kerja, sehingga tidak terjadi kelebihan tenaga kerja; mengutamakan penggunaan tenaga kerja dengan tipikal multi skil, misalnya 1 tukang mampu melaksanakan pekerjaan pemasangan keramik, pengecatan sekaligus plasteran; pemilihan jenis kontrak pekerja harian atau borongan sesuai dengan tipikal pekerjaan; pertimbangan kombinasi asal daerah pekerja, dengan mengkombinasikan tukang dari lokasi setempat dan dari luar daerah, hal ini mampu memitigasi risiko terjadinya absensi pekerja; dan yang paling penting adalah menjaga kondisi psikologis para tukang agar kinerja mereka selalu stabil dan optimal. Celah lainnya bagi kontraktor untuk memperoleh profit adalah melalui taktik pembelian material. Dengan membeli melalui distributor utama atau tangan pertama, kontraktor akan mendapatkan harga dan kualitas terbaik. Tantangannya adalah terkadang pemilihan distributor ini memakan waktu lebih lama dan jika ada kenaikan harga material atau BBM akan membuat perkiraan harga meleset. Maka dari itu, diperlukan kemampuan networking yang luas untuk mendapatkan material yang sesuai.

## 3. Kemampuan Permodalan

Menurut Lulusan Magister Manajemen Proyek Universitas Udayana Tahun 2015 ini, kemampuan permodalan yang handal juga berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan. Maka dari itu, untuk mendukung permodalan diperlukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan untuk membiayai pekerjaan dengan mempertimbangkan jangka waktu dan suku bunga. Deni Ragil Setiawan, Konsultan Konstruksi dari PT Kalayman Arsitek juga menambahkan, bahwa suatu Badan Usaha yang menawarkan 80% atau lebih rendah, biasanya akan berhasil, bila didukung dengan paket-paket yang lain untuk menjaga kelancaran arus kasnya.

Di ujung cerita novel Orang-Orang Proyek, Kabul, Sang Mandor, akhirnya mengundurkan diri dari proyek karena tidak dapat mentoleransi kecurangan yang dilakukan pimpinanya. Kabul akhirnya melanjutkan karirnya sebagai arsitek di proyek-proyek milik swasta. Satu tahun kemudian, apa yang dikhawatirkan Kabul benar terjadi. Jembatan Sungai Cibawor yang saat diresmikan tampak gagah, setahun kemudian telah rusak, mangkrak dan sepi. Tentu tidak dijelaskan dalam novel tersebut berapa harga penawaran yang ditawarkan perusahaan tempat Kabul dulu bekerja saat memenangkan tender. Yang jelas masyarakat umum yang dirugikan oleh ulah kontraktor yang suka menyuap, kongkalikong, melakukan apa saja asal dapat untung dan menjadikan proyek-proyek sipil sebagai ajang bancaan.

Kinerja buruk Kontraktor tempat Kabul dulu bekerja dan Kinerja terpuji dari CV Tangkas Karya Sejati dalam mengelola kontrak konstruksi dengan penawaran harga yang relatif ekonomis tentu tidak dapat dijadikan patokan ke semua Badan Usaha. Namun demikian, latar belakang dan strategi yang dilakukan dapat dijadikan pemahaman bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan. Bahwa tidak semua fakta lapangan dapat terungkap dalam data, maka perlu kehati-hatian Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menyikapi harga penawaran pekerjaan konstruksi yang terkesan tidak wajar. Dengan mengklarifikasi kembali seberapa kuat perusahaan tersebut dari segi pengalaman, relasinya terhadap penyediaan material dan kemampuan permodalan yang handal, Belanja Pemerintah untuk penyediaan infrastruktur diharapkan dapat optimal, tepat biaya, mutu, waktu dan prosedur.

Tata Cara Evaluasi menggunakan harga terendah sebagai acuan dalam penentuan pemenang pekerjaan konstruksi perlu dikaji lebih lanjut oleh perumus kebijakan pengadaan barang jasa agar output hasil pemilihan menghasilkan kontraktor yang kompeten. Kepuasan kerja/rekomendasi yang positif, baik di pekerjaan yang pernah dikerjakan maupun kewajiban perbankan yang tidak bermasalah perlu dirumuskan sebagai persyaratan sedemikian rupa agar dapat menilai, bagaimana kesehatan keuangan suatu Badan usaha.

## **Langkah-langkah Pencegahan**

Untuk mencegah praktik banting harga yang merugikan, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah strategis yang terstruktur dan terukur. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa berjalan transparan, adil, dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang optimal. Beberapa langkah tersebut antara lain:



### **1. Transparansi dan Publikasi Informasi**

Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan harga satuan dasar maupun harga satuan pekerjaan konstruksi (HSP) secara terbuka. Langkah ini telah dilakukan oleh regulator di bidang jasa konstruksi yaitu Kementerian PUPR melalui pengembangan sistem informasi harga perkiraan sendiri terintegrasi (SIPASTI). Harga satuan dasar terutama terkait bahan/material agar terupdate secara berkala sesuai kondisi harga pasar sehingga dapat menghasilkan HSP yang akurat dan relevan dengan kondisi pasaran. Agar kiranya SIPASTI yang selama ini hanya digunakan dalam lingkungan internal Kementerian PUPR dapat digunakan juga oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (KLPD) selain Kementerian PUPR sehingga para pihak pemangku kepentingan memiliki acuan yang sama dalam penyusunan biaya dalam pekerjaan konstruksi.



### **2. Pengawasan yang Ketat**

Pengawasan yang ketat melalui audit internal dan eksternal sangat penting untuk memastikan tidak ada kecurangan atau penyimpangan dalam proses pengadaan. Pemerintah dapat melakukan audit secara berkala dan mengadakan inspeksi lapangan untuk memantau pelaksanaan proyek. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak.



### **3. Regulasi Pemilihan Penyedia Jasa yang Baik**

Memastikan bahwa penyedia jasa memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai adalah langkah penting dalam mencegah praktik banting harga. Pemerintah dapat menilai kinerja penyedia jasa berdasarkan proyek-proyek sebelumnya untuk memastikan mereka dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Evaluasi ini mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif, seperti kepuasan

pengguna dan kepatuhan terhadap jadwal dan anggaran.

### **4. Kontrak yang Jelas dan Terukur**

Menyusun kontrak dengan spesifikasi teknis yang jelas dan terukur sangat penting untuk menghindari interpretasi yang berbeda. Kontrak harus mencakup jadwal pelaksanaan yang realistis dan dapat dicapai oleh penyedia jasa. Dengan demikian, kontraktor memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat menghindari potensi masalah di kemudian hari.

### **5. Pengendalian Mutu**

Pengujian dan pengendalian mutu secara ketat harus dilakukan untuk memastikan barang dan jasa yang disediakan memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Pemerintah dapat menetapkan standar kualitas yang tinggi dan melakukan pengujian yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

## **Evaluasi Kinerja**

Untuk mengevaluasi kinerja kontraktor yang menawar dengan harga rendah dan memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah berikut ini.

### **1. Penetapan Kriteria Evaluasi**

Pemerintah perlu menetapkan kriteria evaluasi yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Kriteria kualitatif meliputi kepuasan pengguna, sementara kriteria kuantitatif mencakup kepatuhan terhadap jadwal dan anggaran. Dengan menetapkan kriteria yang jelas, pemerintah dapat mengukur kinerja kontraktor secara objektif dan komprehensif.

### **2. Pengumpulan Data Kinerja**

Mengumpulkan data kinerja secara berkala sangat penting untuk memantau perkembangan proyek. Pemerintah dapat mengumpulkan laporan kemajuan proyek dari kontraktor dan umpan balik dari departemen atau unit yang menggunakan barang/jasa. Data ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja kontraktor dan membantu dalam mengambil keputusan yang tepat.

### 3. Analisis Data

Analisis data kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci (KPI). KPI ini mencakup parameter yang telah ditetapkan, seperti kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap jadwal, dan efisiensi biaya. Selain itu, evaluasi 360 derajat dapat dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber, termasuk manajer kontrak, rekan kerja, dan kontraktor itu sendiri. Evaluasi ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kinerja kontraktor.

### 4. Tindakan Korektif

Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada kontraktor untuk memperbaiki kinerja mereka. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan sanksi bagi kontraktor yang tidak memenuhi standar dan memberikan insentif bagi kontraktor yang berkinerja baik. Tindakan korektif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan memastikan bahwa proyek selesai sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan.

### Regulasi Tambahan

Untuk memperketat persyaratan tender tanpa mengurangi transparansi dan kompetisi, pemerintah dapat mempertimbangkan regulasi tambahan berikut ini.

#### 1. Pengetatan Persyaratan Kualifikasi

Pemerintah dapat menambahkan persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan yang lebih ketat untuk memastikan kontraktor memiliki kapasitas finansial yang memadai. Selain itu, persyaratan pengalaman proyek serupa dapat diperketat dengan mewajibkan kontraktor memiliki pengalaman dalam proyek serupa dengan skala yang sama.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kontraktor yang terlibat dalam proyek memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

#### 2. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian

Melibatkan pihak ketiga independen untuk mengawasi proses pengadaan dan pelaksanaan proyek dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pengendalian mutu yang ketat dengan menetapkan standar kualitas yang lebih tinggi dan melakukan pengujian yang lebih ketat dapat memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Langkah ini juga membantu dalam mendeteksi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

#### 3. Penggunaan Teknologi Informasi

Menggunakan teknologi informasi untuk memantau pelaksanaan proyek secara real-time dapat membantu dalam mendeteksi potensi masalah sejak dini. Sistem pemantauan real-time memungkinkan pemerintah untuk memantau setiap tahap pekerjaan dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, menyediakan platform pengaduan terbuka bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan dalam proses pengadaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan langkah-langkah pencegahan, evaluasi kinerja, dan regulasi tambahan ini, diharapkan pemerintah dapat mengurangi risiko praktik banting harga yang merugikan dan memastikan kualitas pekerjaan konstruksi tetap terjaga.





# SEHABIS JEDA, KITA BICARA LAGI

Ditulis oleh Ima Zanu Setyaningrum  
& Imam Teguh Pambudi

Foto oleh Much Hari Cahyo

Sinar matahari Jakarta terasa hangat menembus jendela ruang tamu tengah lantai 36 Gedung Juanda III, menghangatkan sisa-sisa obrolan santai setelah makan siang. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan aroma soto daging yang tajam.

Terhampar puluhan laptop yang membuka ratusan dokumen yang tergeletak di meja, pengingat akan evaluasi dokumen yang tak kunjung terhenti dan rapat klarifikasi dan pembuktian yang masih menunggu. Terkecamuk pikiran menyebalkan kepada para klien yang beragam, lebih memusingkan daripada dokumen mereka.

Ode, JF Pertama, lajang dan enerjik, tengah mengetuk-ngetukkan jemarinya ke permukaan meja. Ritme gelisah yang tak diiringi musik. Di hadapannya, Bu Ning, JF Madya yang sudah lama belajar berdamai dengan irama institusi, menyeruput kopi dengan ketenangan yang nyaris seperti hening. Sorot matanya lurus pada Ode, tapi tak tergesa menyela. Ia tahu, Ode akan lebih tenang jika diizinkan bicara lebih dulu.

"Bu Ning," suara Ode akhirnya keluar, nyaris serak, "menunggu hasil... itu lebih menegangkan daripada prosesnya sendiri. Setiap notifikasi email rasanya seperti gemuruh ombak di dada. Apalagi setelah" ia ragu, "setelah panggilan-panggilan dari mereka yang berseragam abu-abu itu."

Kata-kata terakhirnya menggantung di udara. Tak perlu dijelaskan lebih lanjut. Seragam abu-abu bukan sekadar warna; ia adalah simbol ketegangan, pemeriksaan, ketelitian yang menyorot dari balik kaca satu arah. Keberadaan mereka tak bisa dihindari, mereka yang datang dengan pertanyaan yang mematikan, yang bisa mengguncang keyakinan, membuat perasaan terombang-ambing, dan meninggalkan jejak cemas di setiap proses yang sudah disiapkan dengan begitu hati-hati.

Bu Ning menurunkan cangkirnya, matanya tak lepas dari Ode. "Saya tahu. Bahkan saya pernah mengalami panggilan itu di waktu yang tak siap," katanya pelan. "Dan saya belajar: rasa takut justru tumbuh paling besar dari ruang kosong yang kita ciptakan sendiri, ruang kosong akibat ragu, akibat tidak bercerita."

Ada sesuatu dalam kata-kata Bu Ning yang menenangkan. Seolah beban yang terasa begitu berat mendadak sedikit lebih ringan, karena dalam keheningan ini, Ode mulai merasa ada tempat untuknya berbagi, tanpa harus merasa terkucilkan atau dinilai.

Ruang itu sunyi sejenak. Hanya terdengar gerakan office boy merapikan piring sisa makan siang dan percakapan samar dari ruangan sebelah. Ode menatap layar laptopnya yang terbuka pada puluhan tab dokumen. Ia menutup satu per satu, seolah menutup ruang yang selama ini membuatnya lelah.

"Bu," ujarnya, "bagaimana kita bisa membangun ruang tunggu yang tidak menjadi ladang keresahan? Cara kerja yang tidak hanya menjaga administratif, tapi menjaga kita bisa terus bergerak tanpa beban?"

Bu Ning tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi semacam senyum orang tua yang telah melewati gelombang pasang. "Kita mulai dari keterbukaan," katanya. "Tempat ini, ruang kecil ini, bukan hanya tempat berkumpul. Ini ruang kecil keberanian. Tempat kita menaruh beban, tanpa takut di-judge. Tempat kita mengucap jujur, meski suara kita gemetar."

Ia melanjutkan, "Lalu pemahaman. Kita harus tahu persis tiap baris dalam pekerjaan kita. Karena saat seragam abu-abu datang dengan pertanyaan yang tak terduga, hanya pemahaman yang bisa menjadi perisai. Kita harus yakin, sepenuhnya yakin, bahwa apa yang kita buat sudah benar sesuai dengan standar, tanpa cela. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang masih mengganjal. Sebab, keraguan akan membuka celah bagi ketidakpastian yang menggerogoti fokus kita."

"Dan yang paling penting: kebersamaan. Kita bukan pekerja lepas, kita keluarga karir. Satu cemas, yang lain menenangkan. Satu lelah, yang lain menyeduhkan kopi. Jangan pernah merasa menghadapi sistem ini sendirian."

Ode terdiam, lalu mengangguk pelan. Kata-kata Bu Ning bukan hanya untuk menenangkan, namun lebih untuk memberi kekuatan baru. Sebuah pengingat bahwa, meski ada ketidakpastian, mereka tetap berdiri bersama, sebagai satu kesatuan yang saling menopang. Bukankah itu inti dari setiap perjuangan yang berarti, kerja bersama, bukan sendirian?

Tiba-tiba, suara siaran berita dari layar TV memecah suasana. Ode menoleh, napasnya tercekak. Kabar yang sudah lama dinantikan, akhirnya datang juga.

"Bu... hasil Pemilu diumumkan. Presiden baru sudah resmi."

Bu Ning mendengar tanpa menyela. Hanya menunduk sedikit, seakan menyiapkan diri menghadapi kenyataan yang sudah di depan mata. Ode melanjutkan, "Salah satu arah kebijakannya: efisiensi anggaran. Termasuk pemangkasan belanja operasional... dan pengadaan barang/jasa."



Hening. Ruangan seperti ikut menunduk, meresapi makna yang dalam dari setiap kata yang terucap. Efisiensi, penghematan, pemotongan, kata-kata yang berat, yang akan membawa perubahan besar dalam cara kerja mereka.

"Ini akan mengubah peta kerja kita, ya Bu?" tanya Ode, merasa resah menggerogoti pikirannya.



"Ya," jawab Bu Ning, *"meski mungkin tidak sekaligus. Tapi arahnya sudah jelas."* Suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Dia tahu ini adalah langkah yang tidak bisa dihindari, sebuah babak baru dalam perjalanan mereka sebagai penjaga keuangan negara. Nagara Dana Rakca.

Beberapa hari setelahnya, kabar datang beruntun. Surat edaran turun. Proyek-proyek non-prioritas ditangguhkan. Pagu-pagu anggaran disesuaikan. Rapat-rapat diwarnai pertanyaan tanpa jawaban pasti. Ketidakpastian merasuk, membuat setiap langkah terasa lebih hati-hati.

Namun di ruang tamu itu, Bu Ning dan Ode tetap duduk bersama. Bukan dalam ketakutan, tapi dalam upaya membentuk ulang cara berpikir.



*"Seperti waktu COVID dulu,"* ujar Bu Ning. *"Dulu pembatasan fisik memaksa kita berinovasi. Sekarang pembatasan fiskal menuntut kita untuk lebih jernih memilih: mana yang benar-benar berdampak. Mana yang menjadi prioritas dalam menghadapi anggaran yang terbatas."*

Ode mengangguk, matanya tetap menatap jauh ke luar jendela, meski pikirannya berputar cepat. *"Kita harus siap menghadapi perubahan ini, Bu. Tapi kadang rasanya seperti berlayar di lautan berkabut. Kita nggak tahu apa yang ada di depan sana..."*



Bu Ning tersenyum, meski lebih lelah daripada yang terlihat. *"Itulah yang disebut hidup, Ode. Ketidakpastian akan selalu ada. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan kita tetap terjaga, baik tubuh maupun pikiran. Kita bukan hanya harus efisien, tapi juga harus menjaga kewarasan. Tubuh, pikiran, dan ritme kerja. Jangan sampai sistem membuat kita kering pelan-pelan."*

la menyebut satu per satu: teknik manajemen waktu yang tak sekadar membagi jam, tetapi menjaga kewarasan. Ritual kecil yang terlihat sepele, segelas air hangat sebelum mulai kerja, napas dalam sebelum membuka e-mail, dan langkah kaki yang disengaja saat menuju dispenser, semua itu bukan jeda kosong, melainkan pagar yang menjaga agar tak larut dalam arus pekerjaan yang tiada henti.

Lalu, dengan nada lebih dalam, Bu Ning berkata, *"Dan yang paling penting... adalah jeda. Karena justru dari jeda itulah akal sehat kita tumbuh. Di situlah kita belajar mengenali suara hati sendiri, memisahkan antara urgensi sistem dan kebutuhan jiwa. Recharge bukan sekadar istirahat, tapi pembaruan. Bukan hanya tubuh yang butuh diisi ulang, pikiran, cara pandang, dan keyakinan kita pun perlu disegarkan."*

Ode menatap keluar jendela. Langit tetap biru, dan awan-awan bergeser perlahan seperti aliran waktu yang tak peduli pada kecemasan manusia. Namun kini, ada yang bergeser dalam dirinya, bukan jawaban, tapi keberanian untuk tak lagi berharap banyak.


Ketenangan itu tidak datang dari selesainya masalah, tapi dari kesadaran bahwa barangkali, memang semua harus begitu. Bahwa kita tidak bisa mengendalikan zaman, tapi kita bisa memilih untuk tetap kuat di tengah perputarannya.

Di lantai 36 itu, dalam ruang tunggu yang senyap namun penuh gejolak, Ode menemukan satu kenyataan kecil: bahwa kadang, perbaikan tidak datang dari sistem. Tidak dari regulasi. Tidak dari struktur. Melainkan dari kita yang mulai merapikan isi kepala, meski dunia di luar masih berantakan.

Dan sore pun menua. Bayangan lampu mulai memanjang di lantai. Laptop masih terbuka, grup whatsapp masih berdenting, tapi Ode belum menyentuhnya.

Ada sesuatu yang ia sapa lebih dulu, bukan bu Ning, bukan grup. Melainkan jeda.

Lalu perlahan, ia berdiri. Dan berjalan ke arah yang bahkan dirinya belum tahu, akan membawanya ke mana.



*“Terkadang, perbaikan tidak datang dari sistem, regulasi ataupun struktur. Melainkan dari kita yang mulai merapikan isi kepala, meski dunia di luar masih berantakan.”*

- @Ima Zanu Setyaningrum



# DIET KETAT APBN :

## Trik Permak Anggaran Tanpa Bikin Proyek Mangkrak

Ditulis oleh Veranita Sinaga  
Foto oleh Much Hari Cahyo



Bayangkan Anda sedang asyik menyusun rencana belanja bulanan, tiba-tiba bos besar memerintahkan: *“Potong pengeluaran 20 persen, tapi semua kebutuhan harus tetap terpenuhi!”*

Kira-kira begitulah yang dialami Kementerian Keuangan saat Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Diet anggaran yang menyasar pemotongan fantastis sebesar Rp306,69 triliun ini membuat kementerian/lembaga (K/L) garuk-garuk kepala. Lantas, bagaimana nasib proyek konstruksi yang sudah direncanakan? Bagaimana pula reaksi Kementerian Keuangan, sang “dokter keuangan negara”, dalam menyiasati efisiensi superketat ini tanpa membuat proyek-proyek strategis pemerintah tumbang?

Presiden Prabowo Subianto, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Nasional, menekankan pentingnya penghematan dalam penggunaan APBN. Arahannya ini disambut dengan berbagai penyesuaian di hampir semua kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, di sektor konstruksi, penerapan kebijakan ini memunculkan tantangan baru, mengingat pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas nasional.

### INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

## ***Kenapa Harus Diet Ketat? Ada Apa dengan APBN 2025?***

Tentu ada alasan kuat di balik diet ketat ini. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 adalah langkah strategis untuk menekan defisit fiskal yang diproyeksikan mencapai Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Selain itu, efisiensi juga digunakan untuk membiayai program unggulan Kabinet Merah Putih dan beban utang luar negeri yang jatuh tempo. Efisiensi juga diharapkan menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi potensi korupsi melalui pengawasan lebih ketat. Berkaca dari analisis laporan keuangan pemerintah tahun sebelumnya, Presiden menilai kinerja pemerintah belum optimal dibandingkan realisasi anggaran yang telah diserap. Maka, lahirah Inpres ini-sebuah “wake up call” bagi birokrasi.

### ***Efisiensi Anggaran: Siapa yang Kena?***

Kementerian Keuangan, si pemegang kendali duit negara, juga harus memastikan efisiensi ini benar-benar efektif tanpa bikin ekonomi nasional ambruk. Target penghematan Rp306,69 triliun secara nasional, dengan Rp256,1 triliun dari pemangkasan K/L dan sisanya dari transfer ke daerah. “Diet ketat” menysar belanja operasional dan non-operasional: dari biaya kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Namun, kebijakan efisiensi ini membawa tantangan besar. Berdasarkan wawancara Kompas.com (31/01/2025), pagu anggaran Kementerian PU dipangkas 74% dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,5 triliun. Tahun ini, Kementerian PU bahkan terlempar dari daftar 10 K/L dengan anggaran terbesar. Lalu, bagaimana cara Kementerian PU tetap menjalankan prioritas nasional melalui infrastruktur dengan “diet ketat” ini?

### ***Strategi Kementerian PUPR: Tetap Gaspol Meski Anggaran Tipis***

Pada 2024, Kementerian PU sukses menghasilkan 6 proyek ketahanan pangan, 3 revitalisasi sekolah/madrasah, 11 proyek IKN, dan 61 proyek strategis lain-dengan realisasi anggaran 93,5% dari Rp181,62 triliun.

Namun, Menteri PU Dody Hanggodo (Kanal Berita Kementerian PUPR, 10 Februari 2025) menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian PU membangun negeri. Program 2025 sudah diatur sedemikian rupa agar pekerjaan infrastruktur yang sedang berjalan tetap “on the track”. Beberapa strategi yang disusun Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR agar tetap “on the track” antara lain melalui:

1. Prioritas kepada Proyek Strategis, dimana fokus Pembangunan mengacu pada Pembangunan bendungan, irigasi, dan jalan tol yang sudah dalam tahap lanjut atau sangat penting bagi ekonomi dan masyarakat.
2. Optimalisasi Infrastruktur yang ada, Daripada bangun baru, lebih baik memaksimalkan manfaat infrastruktur yang sudah jadi, misalnya dengan memperbaiki jaringan irigasi agar sawah lebih produktif.
3. Efisiensi Pola Kerja: Batasi perjalanan dinas, kurangi belanja operasional yang tidak penting, dan terapkan sistem paperless office untuk hemat biaya.
4. Kolaborasi dengan Swasta, dengan mendorong kerja sama dengan sektor swasta lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), suatu mekanisme pengadaan proyek infrastruktur yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk menyediakan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum, di mana sebagian atau seluruh pembiayaan dan pelaksanaan proyek menggunakan sumber daya dengan pembagian risiko yang jelas antara kedua pihak.

### ***Pro-Kontra: Antara Harapan dan Kekhawatiran***

Layaknya diet, efisiensi anggaran pun menuai pro dan kontra. Pendukungnya yakin efisiensi akan mendorong birokrasi lebih gesit dan inovatif-budaya baru pengelolaan pemerintahan. Namun, kekhawatiran muncul soal potensi penurunan kualitas layanan publik, terutama di sektor infrastruktur, salah satu contoh yang menonjol adalah proyek Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Hingga April 2025, realisasi fisik IKN baru sekitar 40-45% dari rencana. Agar IKN siap jadi pusat pemerintahan 2028, pemerintah harus tetap memprioritaskan penyelesaian infrastruktur inti: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, jalan, fasilitas publik, dan kawasan penyangga.

Selain itu, terdapat beberapa contoh lainnya antara lain:

- **Pembatalan Proyek Infrastruktur Besar di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).** Efisiensi anggaran memaksa pembatalan 14 bendungan, rehabilitasi irigasi puluhan ribu hektar, pengendalian banjir, pembangunan 57 km jalan, dan sejumlah jembatan. Dampaknya? Layanan air, pengendalian banjir, dan konektivitas jalan menurun-petani, masyarakat, dan ekonomi lokal langsung merasakan.
- **Penurunan Kontribusi dan PHK di Sektor Konstruksi.** Pemangkasan anggaran berpotensi menurunkan kontribusi sektor konstruksi ke ekonomi nasional dan menyebabkan PHK massal-sekitar 2,1 juta tenaga kerja terancam. Rantai pasok material dan jasa ikut terganggu, kualitas dan kelancaran proyek infrastruktur menurun.
- **Kualitas Infrastruktur yang Menurun: Efisiensi pada Material Murah serta Pemeliharaan.** Selain pemangkasan anggaran, kualitas infrastruktur di Indonesia selama ini sudah menghadapi tantangan karena penggunaan bahan murah dan sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Kurangnya dana pemeliharaan infrastruktur menyebabkan jalan cepat rusak, jembatan ambruk, dan fasilitas publik lain menjadi tidak optimal. Efisiensi anggaran yang ketat berpotensi memperparah kondisi ini.

#### ***Pelajaran dari Penelitian dan Kebijakan Global: Efisiensi Anggaran Bukan Sekadar Pangkas, Tapi Reorientasi Prioritas***

Studi yang diterbitkan dalam Indonesian Research Journal on Education menegaskan bahwa esensi dari efisiensi adalah melakukan reorientasi prioritas: pemerintah harus mampu memilah mana program yang benar-benar strategis dan berdampak langsung pada masyarakat, serta memangkas atau menunda program yang kurang mendesak atau memiliki dampak minimal. Penelitian ini juga menyoroti bahwa efisiensi anggaran yang hanya berfokus pada pemotongan angka tanpa strategi jangka panjang justru bisa berujung pada penurunan kualitas layanan publik.

Oleh karena itu, reorientasi menjadi kunci: anggaran harus diarahkan ke sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan manusia-bukan sekadar mengurangi jumlah pengeluaran.

Senada dengan itu, Hasim Hartono dari Universitas Lakidende Unaaha, dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa Inpres 1 Tahun 2025 merupakan langkah strategis yang bisa memperbaiki tata kelola belanja negara. Hartono menyoroti bahwa instruksi presiden ini bukan hanya upaya penghematan, tetapi juga momentum untuk memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Penelitian Hartono juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Efisiensi yang efektif hanya bisa dicapai jika ada pengawasan ketat, pelaporan transparan, dan keterlibatan publik dalam mengawal penggunaan anggaran. Pengalaman negara-negara lain juga menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang sukses selalu ditandai oleh transparansi tinggi dan orientasi pada hasil (output dan outcome).

#### ***Resep Rahasia Sri Mulyani Mengelola Anggaran "Kurus"***

Meski anggaran "dipaksa kurus", Kemenkeu punya jurus rahasia agar proyek-proyek tetap berjalan optimal. *Pertama*, fokus tajam pada lima prioritas utama APBN 2025. Layaknya seorang chef yang memilih bahan terbaik, Kemenkeu memastikan bahwa setiap rupiah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga pengelolaan fiskal yang sehat, mereformasi subsidi, dan memastikan alokasi yang optimal. *Kedua*, Kemenkeu menerapkan strategi "membuang lemak tidak perlu" dengan melakukan efisiensi pada pos-pos yang dianggap kurang produktif. Namun, efisiensi tetap memperhatikan program dan kegiatan penting yang juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Ketiga*, transformasi digital jadi jurus pamungkas! Kemenkeu mendorong optimalisasi teknologi informasi dalam sistem kerja untuk mengurangi biaya. Pendekatan "share outcome, share output, dan share activities" menjadi mantra baru. Dengan kata lain, anggaran boleh kurus, tapi kinerjanya harus tetap "berotot"!





### **KPBU, Menu Alternatif Diet Ketat Pembangunan Infrastruktur**

KPBU merupakan alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah, dengan melibatkan peran serta swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. Mekanisme skema ini sendiri diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015.

Untuk mendukung penerapan KPBU di Indonesia, Kementerian Keuangan telah berkomitmen untuk menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah, yaitu:

1. Fasilitas Penyiapan Proyek
2. Dukungan Kelayakan
3. Penjaminan Infrastruktur

Terdapat beberapa skema dalam KPBU, yaitu:

- Kontrak Operasi & Pemeliharaan (Operation & Maintenance (O&M)): dimana Operator swasta/badan usaha, berdasarkan kontrak, mengoperasikan aset milik Pemerintah.
- Bangun-Keuangan (Build – Finance (BF)): Swasta/badan usaha membangun aset dan membiayai biaya modal hanya selama periode konstruksi.
- Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara (Design-Build-Finance-Maintenance (DBFM)): Badan usaha merancang, membangun, membiayai aset dan menyediakan layanan pemeliharaan (hard facilities management) berdasarkan perjanjian jangka panjang.

- Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara-Operasi (Design-Build-Finance-Maintain-Operate (DBFMO)): Pihak badan usaha merancang, membangun, membiayai, menyediakan layanan pemeliharaan dan operasi di bawah perjanjian jangka panjang.
- Konsesi: Seorang pemegang konsesi pihak swasta/badan usaha melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas untuk jangka waktu tertentu.

Selain itu, terdapat juga skema pengembalian investasi proyek KPBU yakni skema Pembayaran Berdasarkan Ketersediaan Layanan atau yang biasa dikenal dengan Availability Payment atau AP, sebagai jaminan kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha.

### **Kesimpulan: Diet Ketat, Tapi Tetap Sehat**

Ibarat tubuh yang diet, APBN 2025 sedang “menyehatkan diri”. Dengan strategi jitu Kemenkeu, efisiensi anggaran diharapkan tidak mengganggu kinerja proyek pemerintah. Bahkan, jika sukses, anggaran “lebih ramping” bisa membuat birokrasi lebih bugar dan gesit melayani masyarakat. Kemenkeu tak cuma “ngurangin jatah” sembarangan. Mereka punya strategi lengkap: target jelas, monitoring ketat, fokus hasil, pemanfaatan teknologi, sampai evaluasi transparan. Diet anggaran 2025 diharapkan bukan sekadar bikin APBN langsing, tapi juga bikin proyek pemerintah tetap nendang dan bermanfaat bagi rakyat. Seperti kata pepatah: “Ketika uangmu sedikit, kreativitasmu harus berlipat.” Jadi saatnya membuktikan, dengan strategi tepat, diet anggaran bisa menghasilkan kinerja yang atletis!



## [CHAPTER 5] PENGHAPUSAN BMN

*Ditulis oleh Much Hari Cahyo*

Pagi itu, kantor mulai sibuk. Budi sudah berada di ruang rapat, mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses penghapusan BMN. Jarum jam menunjuk pukul 9.

Siti masuk dengan tergesa *"Pagi, Maaf, aku sedikit terlambat. Ini berkas yang kita butuhkan,"* kata Siti sambil meletakkan berkas-berkas di meja.

→ *"Tidak masalah, kita masih punya waktu untuk mempersiapkan semuanya,"* jawab Budi dengan senyum. Tak lama kemudian, Andi masuk dengan tergesa-gesa. *"Maaf, aku terlambat."* katanya sambil mengambil tempat di meja rapat.

Budi mengangguk mengerti. *"Aman"*.

Siti membuka berkas dan mulai menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil. *"Pertama, kita perlu memastikan bahwa semua aset yang akan dihapuskan sudah melalui penilaian yang tepat. Selanjutnya, kita harus menyusun dokumen penghapusan dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,"* katanya.

Budi mengangguk. *"Oke, kita juga harus memastikan bahwa semua BMN yang akan dihapuskan sudah tidak memiliki nilai guna dan tidak bisa diperbaiki lagi serta benar-benar tak bisa dimanfaatkan lagi. "*

→ Siti menyarankan agar barang elektronik rusak diprioritaskan. *"Aku pikir kita harus memprioritaskan penghapusan barang-barang elektronik yang sudah rusak."*

Andi menolak *"Tidak, Kita harus memprioritaskan penghapusan barang-barang yang memiliki nilai tinggi terlebih dahulu."*

Budi memotong mencoba menengahi *"Teman-teman, Bagaimana kalau kita membuat daftar prioritas berdasarkan nilai dan kondisi barang?"*

Setelah berdiskusi, mereka akhirnya sepakat untuk membuat daftar prioritas penghapusan BMN berdasarkan nilai dan kondisi barang.

→

Sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela kantor, memberikan kehangatan yang menyenangkan. Budi, Siti, dan Andi sudah berada di ruang rapat, siap untuk memulai diskusi. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan, memberikan semangat tambahan untuk memulai hari. Di meja, terdapat sepiring pisang goreng yang menggoda selera, siap menemani mereka dalam diskusi pagi ini.

Budi mengambil secangkir kopi dan duduk di kursinya. *"Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai Penatausahaan BMN."* katanya dengan semangat.

Siti mengambil sepotong pisang goreng dan mengangguk setuju. Andi, yang juga sudah siap dengan secangkir kopi, membuka dokumen di depannya. *"Saya sudah menyiapkan beberapa data yang perlu kita tinjau hari ini,"* katanya sambil menunjukkan beberapa berkas.

*"Oke Andi"* jawab Budi sembari mengacungkan jempol kanannya. *"Teman-teman, Apa pendapat kalian mengenai Penatausahaan BMN?"* tanya Budi membuka diskusi

Seperti biasa, Siti adalah orang pertama yang menjawab *"Penatausahaan BMN sangat penting untuk memastikan bahwa semua aset tercatat dengan baik. Kita harus melakukan pencatatan yang akurat dan lengkap."*

*"Sepakat. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa semua dokumen terkait BMN tersimpan dengan baik dan mudah diakses."* sambung Andi.

Ditemani kopi hangat dan manisnya pisang goreng hari itu membuat diskusi berjalan dengan hangat dan mengalir.

Budi mengajukan usulan *"Aku pikir kita harus menggunakan sistem pencatatan manual untuk memastikan keakuratan data."*

*"Tidak, Sistem pencatatan manual bisa memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Kita harus menggunakan sistem pencatatan digital yang lebih efisien."* tolak Siti.

Andi mencoba menengahi: *"Bagaimana kalau kita menggabungkan kedua metode tersebut untuk mendapatkan hasil yang optimal?"*

Setelah berdiskusi, mereka akhirnya sepakat untuk menggabungkan sistem pencatatan manual dan digital untuk memastikan keakuratan dan efisiensi penatausahaan BMN.

Dengan semangat dan kerjasama, mereka berhasil menyusun strategi penatausahaan BMN yang efektif dan efisien. Penatausahaan BMN yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi instansi pemerintah. Aset negara tercatat dengan baik, sehingga dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

# KETIKA ASET NEGARA PUNYA KEMBARAN DIGITAL

**Ditulis oleh Yosia Rimbo Deantama**  
**Foto oleh Much Hari Cahyo**

➔ Apa jadinya gedung kantor kita bisa berbicara. Suatu pagi, saat Anda sedang menyiapkan laporan, tiba-tiba muncul notifikasi di layar komputer: "Lantai tiga mulai lembap, mungkin ada kebocoran. Periksa sekarang sebelum makin parah." Atau kendaraan dinas kita yang otomatis mengingatkan: "Saya butuh servis bulan ini. Jika ditunda, konsumsi bensin akan membengkak." Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, bukan? Namun, semua itu bukan khayalan hal tersebut adalah gambaran nyata dari teknologi bernama Digital Twin.

➔ Konsep ini memungkinkan setiap aset fisik memiliki kembaran digital, yang dapat "hidup", memberikan informasi tentang kondisinya, dan membantu kita membuat keputusan lebih cepat, hemat, dan cerdas. Jika sebelumnya aset negara dikelola dengan kertas, kemudian berpindah ke spreadsheet, lalu ke aplikasi, maka masa depannya ada di dunia digital paralel. Dunia di mana aset negara memiliki versi virtual yang terus berkembang, belajar, dan mendampingi pengelolaannya setiap detik. Konsep ini juga dieksplorasi dalam serial Black Mirror, khususnya dalam episode "Joan Is Awful". Dalam episode tersebut, seorang wanita biasa bernama Joan mendapati hidupnya diadaptasi menjadi serial televisi tanpa persetujuannya, menggunakan versi digital dirinya yang diperankan oleh aktris terkenal.

Episode ini menggambarkan bagaimana teknologi dapat menciptakan replika digital seseorang dan implikasinya terhadap privasi serta identitas pribadi.

## ***Apa Itu Digital Twin?***

Digital Twin kedengarannya seperti nama karakter di film superhero, ya? Tapi ini bukan tentang tokoh fiksi. Digital Twin adalah teknologi yang memungkinkan kita membuat salinan digital dari sesuatu yang ada di dunia nyata. Bisa gedung, mobil, bahkan seluruh kota! Kalau Anda pernah main The Sims, bayangkan Anda membangun rumah virtual, mengatur furniturnya, bahkan mengamati aktivitas penghuninya. Bedanya, kalau The Sims hanya untuk hiburan, Digital Twin digunakan untuk mengelola aset sungguhan secara real time. Dalam dunia nyata, Digital Twin bekerja dengan cara menggabungkan data dari sensor, peta, dan sistem informasi, lalu menyajikannya dalam bentuk visual yang mudah dipantau. Misalnya, apabila sebuah gedung negara punya Digital Twin, kita bisa mengetahui: Apakah AC-nya sedang boros listrik? Apakah ruangnya sering kosong dan bisa disewakan? Apakah ada risiko kebocoran karena kelembapan naik drastis?

Konsep Digital Twin sebenarnya sudah dipakai oleh beberapa perusahaan besar. Tesla, misalnya, menggunakan Digital Twin untuk setiap mobil yang mereka produksi.

Artinya, setiap Tesla punya “saudara kembar digital” yang terus merekam kondisi kendaraan dan bisa memberi tahu kalau ada masalah bahkan sebelum pengemudinya menaiki kendaraan. Sekarang bayangkan kalau itu diterapkan di aset negara: rumah dinas, gedung kantor, kendaraan dinas, bahkan lahan kosong. Kita tidak lagi menunggu aset rusak dulu baru diperbaiki. Kita bisaantisipasi lebih cepat, ambil keputusan lebih tepat, dan hemat anggaran lebih banyak. Digital Twin bukan sekadar peta atau aplikasi statis. Digital Twin merupakan cara baru untuk berinteraksi dengan dunia nyata melalui dunia digital. Kita tidak cuma melihat data, tapi juga bisa “berdialog” dengan aset yang kita miliki.

### **Manfaat Digital Twin untuk BMN**

Kalau aset negara punya kembaran digital, bukan sekadar keren, tapi benar-benar bisa mengubah cara kita mengelola BMN dari reaktif menjadi proaktif, dari manual menjadi cerdas. Berikut beberapa manfaat yang paling terasa:

1. *Prediksi Masalah Sebelum Terjadi.* Dengan Digital Twin, kita bisa tahu sebelum masalah muncul. Contohnya: gedung kantor bisa memberi sinyal kalau ada getaran tidak normal, yang artinya mungkin ada keretakan struktur. Atau sistem pendingin ruangan yang biasanya normal, tiba-tiba mulai boros listrik — pertanda harus dicek teknisinya.
2. *Pemanfaatan BMN yang Lebih Efisien.* Berapa kendaraan dinas yang hanya dipakai seminggu sekali? Dengan Digital Twin, kita bisa tahu: kendaraan mana yang underutilized, kapan terakhir diservis, dan siapa yang terakhir menggunakannya.
3. *Pemantauan BMN 24/7.* Digital Twin bisa memberi gambaran tentang ruang mana yang sering kosong, ruang rapat mana yang paling banyak dipakai, atau bahkan suhu dan kelembapan ruangan.
4. *Pengambilan Keputusan Jadi Lebih Cepat dan Tepat.* Karena semua data sudah terkumpul dan divisualisasikan, kita tidak perlu lagi menunggu laporan berkala, Pimpinan dapat ambil keputusan kapan pun, dari mana pun.
5. *Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas.* Data Digital Twin bisa dibuka (dengan batas tertentu) ke publik. Masyarakat dapat mengetahui gedung mana yang disewakan, rumah dinas mana yang kosong, atau kendaraan mana yang rusak.

Dengan semua manfaat ini, Digital Twin bukan hanya alat. Digital Twin merupakan gaya baru dalam mengelola negara yang lebih cerdas, transparan, dan hemat anggaran.

### **Bagaimana Digital Twin Bisa Diwujudkan?**

Sekarang mungkin Anda bertanya, “Wah keren sih... tapi apa ini bisa benar-benar diterapkan di aset negara?” Jawabannya sangat bisa. Bahkan beberapa langkah awalnya mungkin sudah kita lakukan tinggal kita menaikkan levelnya.

1. *Memasang Sensor Kecil di Aset Fisik (IoT).* Langkah pertama, diperlukan “indera” ke aset negara. Bukan berarti gedungnya atau BMN lainnya diberikan mata dan telinga, tapi cukup sensor suhu, kelembapan, getaran, atau GPS.
2. *Memasang Data ke Cloud atau Server Pusat.* Sensor-sensor tadi akan terus mengirim data. Tapi data mentah saja tidak cukup kita memerlukan tempat untuk menyimpannya. Maka dari itu, dibutuhkan sistem penyimpanan seperti cloud server atau data center Kemenkeu yang bisa menampung dan mengolah semua info yang telah dikumpulkan.
3. *Membuat Dashboard Sederhana untuk Monitoring.* Data yang sudah dikumpulkan dan sudah diolah lalu ditampilkan menggunakan dashboard dengan visual yang sesuai, mudah dibaca, dan bisa diakses siapa saja yang punya wewenang.
4. *Menggunakan AI atau Analitik untuk Prediksi & Saran.* Apabila mau naik level lagi, kita bisa menggunakan teknologi seperti machine learning. Contohnya: sistem bisa mempelajari pola penggunaan gedung dan menyarankan waktu terbaik untuk disewa, dirawat, atau bahkan dipindahtangankan.
5. *Bisa Dimulai Bertahap dan Tidak Harus Mahal.* Tenang, ini semua tidak harus sekaligus. Kita bisa mulai dari aset-aset strategis dulu, di wilayah dengan anggaran dan SDM yang memadai. Pelan-pelan, kita perluas.

Membangun Digital Twin untuk aset negara bukan mimpi kosong. Teknologinya sudah ada. SDM kita makin siap. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk mulai.



### ***Tantangan dan Harapan ke Depan***

Tentu saja, semua hal hebat tidak datang tanpa tantangan. Tapi untuk mengubah ide jadi kenyataan, kita tetap harus melewati jalan yang tak selalu mulus. Salah satu tantangan paling nyata adalah kesiapan infrastruktur. Tidak semua satuan kerja memiliki akses internet yang stabil, atau fasilitas teknologi yang mumpuni. Di beberapa daerah, mengakses dashboard digital saja mungkin masih jadi perjuangan tersendiri. Belum lagi soal sensor dan perangkat pendukung semuanya membutuhkan investasi. Tapi kita juga mengetahui bahwa, banyak hal besar dimulai dari hal sederhana. Apabila beberapa tahun lalu, rapat virtual pun terasa asing, kini panggilan Zoom dan Teams sudah seperti kegiatan harian yang biasa saja. Adaptasi memang butuh waktu, tapi bukan hal yang mustahil.

Di sisi lain, transformasi ini menuntut perubahan pola pikir. Kita butuh lebih dari sekadar perangkat keras tapi kita juga membutuhkan perubahan perangkat lunak dalam kepala. Perubahan sistem kerja berarti juga mengubah cara berpikir. Pegawai yang dulu terbiasa mengisi formulir kertas perlu merasa nyaman membaca data visual. Pengelola aset harus siap membuat keputusan berdasarkan analisis digital, bukan hanya berdasarkan feeling dan pengalaman lapangan. Memang butuh proses, tapi proses itulah yang perlahan akan membentuk budaya kerja yang lebih cerdas dan efisien.

Tak bisa dipungkiri, biaya awal pembangunan sistem Digital Twin ini bisa membuat banyak pihak ragu. Pengadaan alat, pembangunan server, integrasi sistem, semuanya terlihat seperti pengeluaran besar. Tapi jika dilihat dari sisi jangka panjang, ini bukan beban, melainkan investasi. Aset yang dipantau dengan baik tidak akan cepat rusak, kendaraan yang dikelola dengan data tidak akan mangkrak, dan yang terpenting kita bisa memutus siklus aset idle yang terus menggerus efisiensi negara.

Tantangan lainnya ada pada sisi kebijakan. Sebuah inovasi tidak akan hidup tanpa dukungan regulasi dan kepemimpinan yang kuat. Digital Twin perlu naungan, maka dari itu dibutuhkan aturan yang menjamin keterbukaan data, interoperabilitas antar sistem, dan yang paling penting adalah keberanian untuk berubah. Untungnya, kita tidak mulai dari nol.

Kemenkeu sudah punya banyak fondasi dari SIMAN, SI-Kendi, SIMARU hingga Super Apps. Digital Twin hanyalah lanjutan dari cerita transformasi digital yang sudah lebih dulu kita tulis.


Dan dari semua tantangan ini, ada satu harapan besar yang tetap menyala: bahwa suatu hari nanti, seluruh aset negara berupa gedung, rumah dinas, kendaraan, hingga lahan akan bisa kita pantau real-time, cukup dari satu layar. Tak ada lagi aset yang "menghilang". Tak ada lagi rumah dinas yang kosong bertahun-tahun sementara pegawai harus ngontrak. Tak ada lagi keputusan yang diambil tanpa data. Digital Twin bukan hanya soal teknologi, Digital Twin adalah simbol dari cara baru kita bekerja dengan lebih cerdas, lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, aset negara adalah milik rakyat. Dan sudah seharusnya, kita mengelolanya dengan cara terbaik yang bisa kita usahakan.

### ***Mengelola Negara dari Ujung Jari***

Mengelola aset negara mungkin selama ini terdengar sebagai tugas administratif yang berat, rumit, dan penuh dengan birokrasi. Tapi bayangkan jika semua itu bisa kita sederhanakan bukan untuk mengurangi tanggung jawab, tapi untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi. Dengan Digital Twin, kita tidak lagi bicara soal spreadsheet yang membosankan atau laporan fisik yang menumpuk. Kita sedang bicara tentang masa depan, di mana pengambilan keputusan bisa dilakukan dari ujung jari. Gedung kantor yang bisa mengabari jika mulai rusak. Rumah dinas yang bisa "melapor" jika tak pernah dihuni. Kendaraan dinas yang bisa memberi tahu kalau waktunya diservis. Semua aset itu berbicara bukan dalam bahasa manusia, tapi lewat data yang real-time dan bisa dipercaya.

Mungkin sekarang itu masih terdengar seperti ide besar. Tapi setiap perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk bermimpi. Hari ini kita bermimpi tentang aset negara yang punya nyawa digital. Besok, kita mulai menghidupkannya satu per satu. Karena di dunia yang semakin cepat dan kompleks ini, BMN tidak cukup hanya dikelola dengan niat baik BMN juga perlu dikelola dengan cara yang cerdas dan adaptif. Digital Twin adalah salah satu jalan menuju impian tersebut.





Jalan yang membawa kita bukan hanya pada efisiensi anggaran atau transparansi data, tapi pada cara baru memaknai tanggung jawab sebagai pengelola aset publik. Dan siapa tahu, kelak di masa depan kita membaca sejarah pengelolaan aset negara, kita akan menemukan satu bab penting: masa di mana kita mulai membangun kembaran digital untuk menjaga warisan fisik negara.

Semua dimulai dari satu pertanyaan sederhana: "Kalau aset negara bisa bicara, apa yang akan mereka ceritakan kepada kita hari ini?"



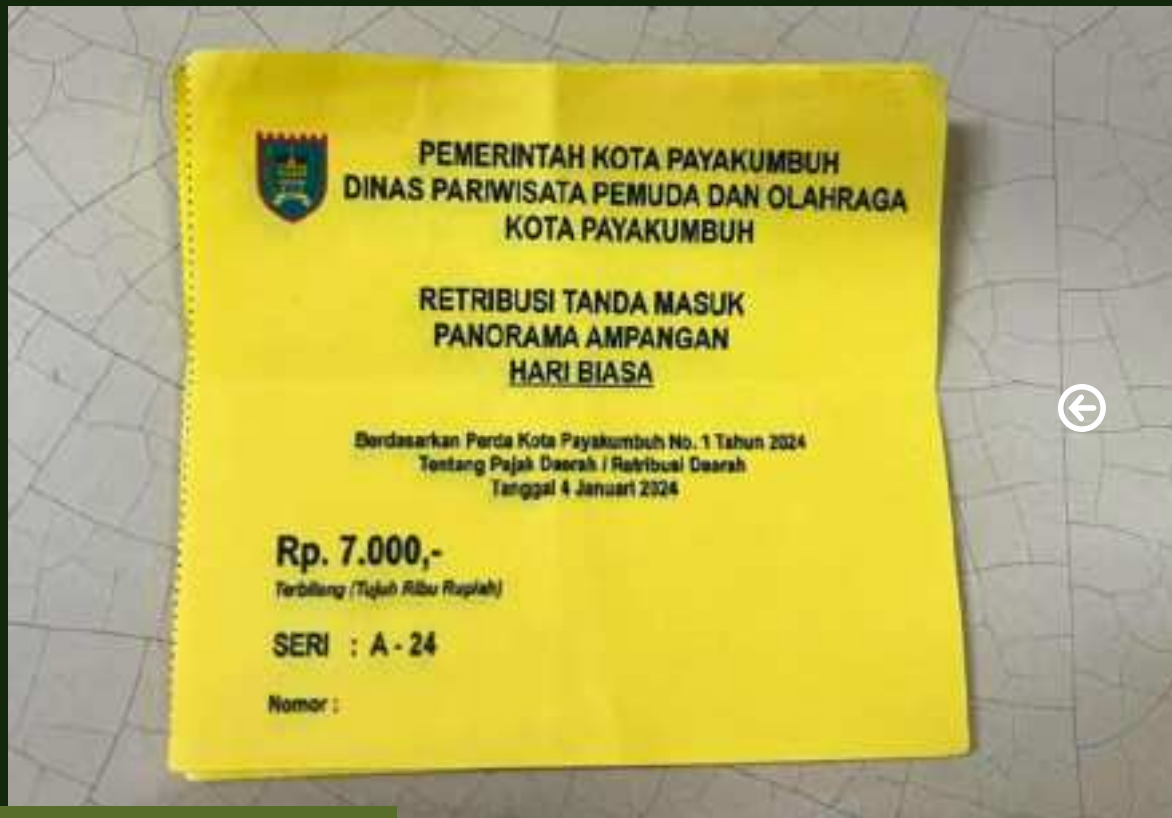
# PANORAMA AMPANGAN

## WISATA TERSEMBUNYI DI KAKI GUNUNG SAGO PAYAKUMBUH

### *Wisata Indah Tersembunyi di Atas Bukit*

Panorama Ampangan merupakan salah satu objek wisata di Payakumbuh yang menarik untuk dikunjungi. Kota payakumbuh menyimpan banyak potensi wisata alam karena daerah ini dikelilingi pegunungan yaitu Gunung Sago, Gunung Marapi dan Gunung Singgalang.

Tulisan dan Foto  
oleh Yelly Metasari



Lokasi Panorama Ampangan terletak di puncak Bukit Ampangan, di kaki Gunung Sago, perbukitan Kenagarian Aua Kuniang, memberikan pemandangan spektakuler dari ketinggian 650 mdpl. Jarak dari pusat kota Payakumbuh kurang lebih 7 KM. Beralamat di Aua Kuniang, Payakumbuh Selatan, Ampangan, Kec. Payakumbuh, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Rute menuju Panorama Ampangan dari Kota Payakumbuh yaitu dapat melalui Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pahlawan, Setelah itu, lanjutkan ke Jalan WR. Supratman di sawah Padang, lalu masuk ke Jalan K.H. Dewantara dan sampailah ke daerah Ampangan, Payakumbuh.

Untuk menuju ke destinasi wisata yang satu ini , kita dapat menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motot dengan waktu sekitar 12-13 menit. Jalanan menuju Panorama Ampangan menanjak dan berkelok serta memiliki pemandangan alam memukau sepanjang perjalanan. Panorama Ampangan berada diatas bukit,tersembunyi dari hiruk pikuk suasana kota. Sangat nyaman bagi kita yang ingin melepas penat dengan aktivitas harian dan hiruk pikuknya ibu kota. Udara yang sejuk, berangin menjadi ciri khas objek wisata ini.

Objek wisata Panorama Ampangan yang dikelola oleh pemerintah daerah menetapkan tarif kunjungan Rp7000 per orang (harga per Desember 2024). Dengan tarif yang murah ini seharusnya dapat menarik minat pengunjung. Namun, intensitas pengunjung masih sedikit, mungkin karena panorama ampangan memang belum terlalu dikenal oleh Masyarakat luas dan letaknya yang diatas bukit, tidak mudah dijangkau dengan kendaraan umum.

Panorama Ampangan adalah destinasi wisata tersembunyi yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa, Dikelilingi suasana alam yang hijau nan asri, objek yang berada di kaki Gunung Sago ini menjadi pelarian yang tepat dari segala kepenatan rutinitas sehari-hari masyarakat perkotaan. Suasana sejuk dan asri di Panorama Ampangan membuat tempat ini sangat cocok untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga.



### ***Kegiatan di Panorama Ampangan***

Keindahan panorama ampangan ini tidak kalah indah dengan objek wisata lainnya. Suasana perbukitan, tumbuhan hijau, awan biru yang cerah, semilir angin pegunungan menjadi kombinasi yang menarik untuk dapat dinikmati bersama teman, pasangan dan sanak saudara. Banyak keluarga yang datang untuk merayakan kebersamaan dan meningkatkan tali silaturahmi dengan mengadakan acara outing, piknik dengan membawa makanan, mengadakan games, karaoke dan lainnya. Rumah pohon dan jembatan gantung menjadi objek menarik di Panorama Ampangan. Dari atas rumah pohon kita dapat menikmati keindahan Pohon-Pohon Pinus dan menikmati Kota Payakumbuh serta sebagian Kabupaten 50 Kota dari Ketinggian.



Suasana yang sejuk semakin menambah rasa nyaman saat berada disini. Selain mendapatkan pemandangan yang indah, tempat ini juga cocok sekali untuk menyalurkan hobi Photography. Panorama Ampangan memiliki angle dan titik Lokasi foto yang amat bagus untuk memuaskan para pengunjung memotret pemandangan dan para fotografer berburu foto yang eksotis khas alam. Banyak spot foto menarik dan instragramable dan menarik yang dapat menjadi Lokasi foto favorit bagi para millennial. Biasanya berfoto di pinggir dan di rumah pohon menjadi spot selfie favorit pengunjung.



Pengunjung dapat melakukan aktivitas bersepeda gunung atau trekking karena puncak ampangan memiliki jalan yang sudah beraspal yang menanjak dan berkelok-kelok, sangat cocok menyalurkan hobi alam. Selain itu, pengunjung dapat mencoba mendirikan tenda dan bermalam sambil menikmati pemandangan cantik kota payakumbuh ditemani kelap kelip lampu di waktu malam hari sambil menyantap jagung bakar dan minum air jahe hangat.

#### ***Event dan Promosi Panorama Ampangan***

Pemerintah Daerah Payakumbuh terkadang mengadakan festival wisata di Panorama Ampangan, salah satunya “Payakumbuh Botuang Festival” yang memamerkan kerajinan bambu yang memukau hasil karya tangan kreatif masyarakat Nagari Aua Kuniang Payakumbuh. Selain keindahan alam dan nilai sejarahnya, Panorama Ampangan juga memikat dengan kreativitas masyarakat setempat yang tercermin dalam kerajinan bambu mereka. Para pengunjung berharap agar ada pembenahan dan promosi yang lebih maksimal terhadap Panorama Ampangan, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung.

Pengunjung berharap agar pembenahan dan promosi Panorama Ampangan dapat dimaksimalkan, sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan. Salah satu faktor yang menyebabkan sepi Panorama Ampangan adalah keberadaan banyak objek wisata di Kota Payakumbuh maupun di sekitarnya. Padahal, Panorama Ampangan memiliki potensi yang layak diakui dunia, karena menawarkan pengalaman wisata yang unik dan tak terlupakan. Mari kita menjelajahi keindahan alam di Kampung Bambu Payakumbuh yang memukau ini.



## [CHAPTER 6] PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN

*Ditulis oleh Muhammad Ibnu Sudjono dan Dwi Citra Lestari*

Jarum jam menunjuk angka 2 saat Budi, Siti, dan Andi sedang berdiskusi di ruang kolaborasi. Di jam-jam ngantuk itu, mereka membahas strategi pengawasan dan pengendalian BMN yang merupakan kunci keberhasilan pengelolaan BMN.

➔ Budi membuka diskusi *"Teman-teman, Apa pendapat kalian mengenai pengawasan dan pengendalian BMN?"*

Siti menjawab pertama seperti biasa *"Menurutku, pengawasan dan pengendalian BMN harus dilakukan secara ketat dan berkala untuk memastikan bahwa semua aset digunakan dengan benar."*

Andi mengangguk setuju. *"lalu bagaimana baiknya cara kita melakukan pengawasan?"* tanya Andi yang melirik Budi.

Budi menjawab *"aku pikir kita bisa menggunakan sistem pengawasan manual untuk memastikan keakuratan data."*

Siti menolak *"Aku tidak setuju, Sistem pengawasan manual bisa memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Kita harus menggunakan sistem pengawasan digital yang lebih efisien."*

➔ Andi mencoba menengahi: *"Bagaimana kalau kita menggabungkan kedua metode tersebut untuk mendapatkan hasil yang optimal?"*

Setelah berdiskusi, mereka akhirnya sepakat untuk menggabungkan sistem pengawasan manual dan digital untuk memastikan keakuratan dan efisiensi pengawasan BMN.

➔

Setelah berbulan-bulan bekerja keras, Budi, Siti, dan Andi akhirnya menyelesaikan tugas mereka dalam mengelola BMN dengan baik. Mereka telah melalui seluruh proses siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, hingga pengawasan dan pengendalian. Setiap langkah dilakukan dengan penuh dedikasi dan komitmen untuk memastikan bahwa aset negara dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel.



Hari itu, mereka berkumpul di ruang rapat untuk menyampaikan laporan akhir mereka. Budi membuka rapat dengan senyum. *"Teman-teman, kita telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Semua kegiatan dalam siklus pengelolaan BMN telah kita selesaikan dengan baik. Saya bangga dengan kerja keras dan dedikasi kita semua,"* katanya.

Siti mengangguk setuju. *"Ya, kita telah memastikan bahwa BMN digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pengamanan dan pemeliharaan BMN juga dilakukan dengan cermat untuk menjaga kondisi dan nilai aset agar tetap optimal,"* tambahnya.

Andi menambahkan, *"Penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN telah kita lakukan dengan baik. Semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hasilnya sangat memuaskan."*

Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka dan Pimpinan mereka masuk dengan senyum lebar. *"Selamat, Budi, Siti, dan Andi. Kalian telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Atas keberhasilan kalian dalam mengelola BMN, instansi kita telah meraih banyak penghargaan. Ini adalah bukti kerja keras dan dedikasi kalian,"* katanya sambil memberikan sertifikat penghargaan kepada mereka.



Budi, Siti, dan Andi merasa sangat bangga dan terharu. Mereka menerima penghargaan dengan senyum lebar dan rasa syukur. *"Terima kasih, Pak. Kami akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi instansi kita,"* kata Budi.

Setelah rapat selesai, mereka keluar dari ruang rapat dengan perasaan lega dan puas. Di perjalanan pulang, mereka merenung tentang semua tantangan yang telah mereka hadapi dan bagaimana mereka berhasil mengatasinya dengan kerja sama dan dedikasi. Mereka merasa optimis bahwa dengan semangat baru, mereka dapat terus memberikan kontribusi yang berarti bagi instansi mereka. Dengan semangat baru, mereka siap menghadapi tantangan berikutnya dan terus berusaha untuk menjaga aset negara dalam kondisi prima.



# info Pasti

MEDIA INFORMASI PENGADAAN DAN ASET TERKINI